



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS INDEKS DISPARITAS KESEJAHTERAAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

TESIS



**HANIF YAHYA
0821206004**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ANALISIS INDEKS DISPARITAS KESEJAHTERAAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh : Hanif Yahya

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Sofyardi, SE, MA dan Prof. Dr. Sjafrizal, SE, MA)

RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan makmur dan sentosa yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik fisik, mater imaupun rohani. Salahsatu sasaran pokok yang menjadi agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009 adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal.

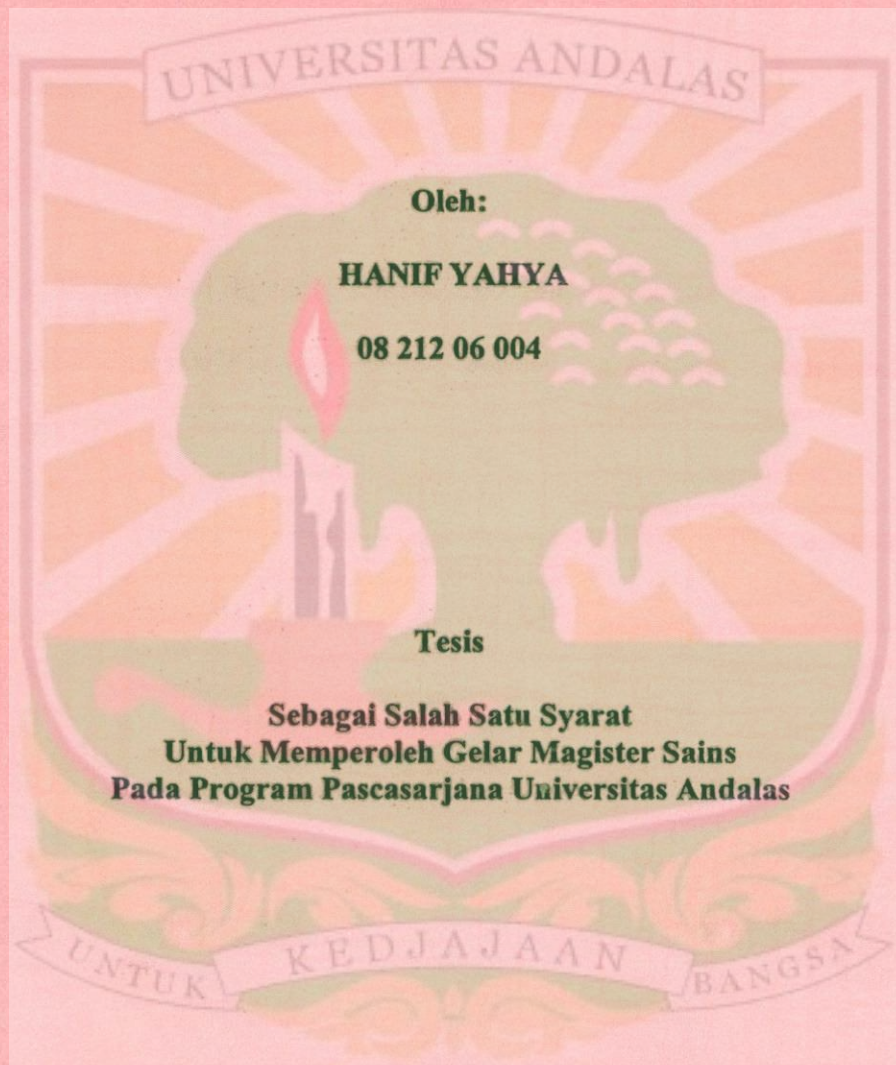
Selama ini keberhasilan pembangunan lebih banyak diukur dengan indikator makro perekonomian seperti meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, menurunnya laju inflasi, angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran. Adakalanya antar indikator makro perekonomian menunjukkan ketidakharmonisan arah pertumbuhan sehingga menimbulkan pertanyaan, misalnya saja ekonomi tumbuh cukup tinggi tetapi pengangguran dan kemiskinan tetap sulit untuk ditekan. Sampai dengan sekarang masih diperdebatkan sejauh mana indikator makro perekonomian dapat merefleksikan pencapaian kesejahteraan di masyarakat.

Hingga saat ini belum banyak dibangun suatu indikator statistik untuk digunakan sebagai proksi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. UNDP (1994) mempelopori penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi untuk mengukur pencapaian pembangunan dengan titik sentral pada kesejahteraan manusianya. Namun demikian sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak semata hanya pada tiga dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak, akan tetapi ada dimensi lain yang perlu dipenuhi untuk melihat bagaimana kesejahteraan penduduk tercapai. Terdapat satu metoda yang diperkenalkan ahli matematika Polandia di bawah pimpinan Florek (1952) dan telah diusulkan oleh Hellwig (1967) kepada UNESCO untuk membandingkan tingkat perkembangan sosial dan ekonomi berbagai negara di dunia dan selanjutnya telah dipelopori penggunaannya oleh Harbison, Mahrulik, dan Resnik (1970) dalam studi pembangunan berbagai negara, metoda tersebut dinamakan metoda Taksonomik. Metode taksonomik pada dasarnya bertujuan untuk menentukan suatu indeks menyeluruh/komposit (*composite index*) dari berbagai ragam ukuran, yang selanjutnya berdasarkan indeks komposit tersebut dibuat peringkat unit spasialnya. Indeks komposit disparitas terdiri dari dua komponen, yaitu (1) pola pembangunan (*pattern of development*) dan (2) ukuran pembangunan (*measure of development*), kemudian dari ukuran pembangunan tersebut dibuat peringkat unit spasial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan Metode Taksonomik dalam menyusun Indeks Disparitas Kesejahteraan (IDK) antar kabupaten/kota, berdasarkan beberapa variabel sosial ekonomi untuk setiap kabupaten/kota, dan mengkaji hasil indeks disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota untuk menentukan arah kebijakan pembangunan masing-masing kabupaten/kota. IDK disusun dengan pendekatan beberapa

dimensi yaitu : kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, perumahan dan lingkungan serta dimensi teknologi dan informasi.

Dari hasil penelitian diperoleh dari sebanyak 34 variabel awal yang akan digunakan dalam menyusun indeks disparitas, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terpilih 17 variabel dari tujuh dimensi termasuk validator yang secara statistic layak digunakan untuk mengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota. Secara keseluruhandimensi IDK diukur dengan menggunakan 17 variabel dengan tingkat reliabilitas 99 persen. Kota Padang, Kota Solok dan Padang Panjang tercatat sebagai daerah dengan peringkat terbaik IDK seluruh dimensi, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan Kepulauan Mentawai menempati peringkat terbawah. Daerah yang berkategori sebagai kabupaten/kota yang efektif dalam penggunaan PDRB untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk adalah Kabupaten Dharmasraya, Padang Panjang, Kota Solok dan Payakumbuh. Daerah yang tidak optimal dalam pemanfaatan potensi perekonomian untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Limapuluh Kota dan Pasaman Barat. Penerapan metode taksonomik dapat memberikan sinyal atau peringatan dini tentang sejauhmana potensi perekonomian daerah seperti tercermin dalam berbagai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang berorientasi kepada rakyat. Untuk mengurangi adanya disparitas kesejahteraan, terdapat 4 (empat) dimensi yang perlu perhatian lebih dalam lagi yaitu dimensi teknologi informasi, perumahan dan lingkungan, pendidikan dan sosial budaya. Keempat dimensi tersebut sangat berpengaruh pada aspek ekonomi maupun produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas keamanan.

**ANALISIS INDEKS DISPARITAS KESEJAHTERAAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul **Analisis Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat** adalah karya saya sendiri dan bukanlah ciplakan/duplikasi dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Oktober 2011

Yang Membuat Pernyataan

Hanif Yahya
08 212 06 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, 23 Mei 1965, anak keenam dari duabelas bersaudara dari pasangan ayahanda Yahya. Z (alm) dan ibunda Jasmaniar.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1976 di SD Muhammadiyah 3 Jakarta dan melanjutkan pada ke SMP Muhammadiyah 18 Jakarta dan tamat pada tahun 1980, pada tahun itu juga penulis melanjutkan ke SMA Negeri 14 Jakarta dan selesai pada tahun 1983.

Pada tahun 1983 penulis melanjutkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik Jakarta dengan status ikatan dinas dan tamat pada tahun 1986, dan pada tahun itu pula penulis langsung bekerja di Badan Pusat Statistik Jakarta. Pada tahun 1992 penulis diberi kesempatan tugas belajar untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) dan tamat pada tahun 1994. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di Program Magister (S2) Jurusan Perencanaan Pembangunan (PPN).

Penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**, dan pada tanggal 11 Oktober 2011 dinyatakan lulus pada sidang ujian Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.

HANIF YAHYA

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta dan keluarga besar (alm) Yahya Z yang tak henti-hentinya mendoakan serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dan juga kepada yang terkasih istriku Dalila dan anak-anakku Ghiffary, Hasna dan Kadzia yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Sofyardi, SE, MA dan Bapak Prof. Dr. Sjafrizal, SE, MA sebagai ketua dan anggota pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan di dalam penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak-bapak penguji Dr. H. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc, Bapak Prof. Dr. Nasri Bachtiar, SE, MA dan Bapak Prof. Dr. Adrimas.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan Yuni Susianto, S.Si, M.Si yang telah banyak membantu dalam pengolahan data untuk tesis ini, juga kepada rekan Teguh Sugiyarto, M.Pop.Hum.Res, rekan Resiwaty Fajrina MZ, S.ST dan Yuliatin, SE yang telah membantu dalam penyediaan data set. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua rekan khususnya di Bidang Statistik Sosial atas pengertian dan kerjasamanya dan BPS Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, namun penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Pada Allah SWT penulis mohon ampun dan pada semua pihak penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Padang, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika	7
1.6 Ruang Lingkup	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pembangunan	9
2.2 Konsep Kesejahteraan	12
2.3 Konsep Disparitas	13
2.4 Penelitian Terdahulu	18
2.5 Kerangka Pikir	21
BAB III METODOLOGI	
3.1 Sumber Data	26
3.2 Metode Analisis	27
3.2.1 Analisis Deskriptif	27
3.2.2 Tahapan Pengukuran Kesejahteraan	28
3.2.2.1 Uji Validitas	29

3.2.2.2	Pengukuran Tingkat Reliabilitas	30
3.3	Metode Taksonomik	31
3.3.1	Metode Penghitungan Indeks Komposit	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Kondisi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Indikator Ekonomi dan Sosial Budaya	39
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat	40
4.1.2	Gambaran Umum Potensi Perekonomian Kabupaten/Kota	41
4.2	Uji Validitas	45
4.3	Uji Reliabilitas	49
4.3.1	Uji Reliabilitas Dimensi Kesehatan dan Gizi	50
4.3.2	Uji Reliabilitas Dimensi Pendidikan	50
4.3.3	Uji Reliabilitas Dimensi Ekonomi	51
4.3.4	Uji Reliabilitas Dimensi Ketenagakerjaan	52
4.3.5	Uji Reliabilitas Dimensi Sosial dan Budaya	53
4.3.6	Uji Reliabilitas Dimensi Perumahan dan Lingkungan	54
4.3.7	Uji Reliabilitas Dimensi Teknologi dan Informasi	56
4.3.8	Uji Reliabilitas Keseluruhan Dimensi	56
4.4	Analisis Deskriptif	59
4.4.1	Deskripsi Dimensi Kesehatan dan Gizi	59
4.4.2	Deskripsi Dimensi Pendidikan	60
4.4.3	Deskripsi Dimensi Ekonomi	62
4.4.4	Deskripsi Dimensi Ketenagakerjaan	63
4.4.5	Deskripsi Dimensi Sosial dan Budaya	64
4.4.6	Deskripsi Dimensi Perumahan dan Lingkungan	66
4.4.7	Deskripsi Dimensi Teknologi dan Informasi	69
4.5	Analisis Indeks Disparitas Kesejahteraan (IDK) Antar Kabupaten/Kota	70
4.5.1	IDK Dimensi Kesehatan dan Gizi	72

4.5.2	IDK Dimensi Pendidikan	76
4.5.3	IDK Dimensi Ekonomi	79
4.5.4	IDK Dimensi Ketenagakerjaan	81
4.5.5	IDK Dimensi Sosial dan Budaya	84
4.5.6	IDK Dimensi Perumahan dan Lingkungan	88
4.5.7	IDK Dimensi Teknologi dan Informasi	91
4.5.8	IDK Keseluruhan Dimensi	94
4.5.9	IDK Level Kabupaten/Kota	100
4.6	Implikasi Kebijakan	104

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

112

LAMPIRAN

114



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Nilai Koefisien Korelasi Spearman dan Nilai Probabilita Masing-Masing Variabel Terhadap Validator	47
4.2	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Kesehatan dan Gizi	50
4.3	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Pendidikan	51
4.4	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Ekonomi	52
4.5	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Ketenagakerjaan	53
4.6	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Sosial dan Budaya	53
4.7	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Perumahan dan Lingkungan	55
4.8	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Teknologi dan Informasi	56
4.9	Reliabilitas Variabel Pada Keseluruhan Dimensi	57
4.10	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Kesehatan dan Gizi	74
4.11	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Pendidikan	78
4.12	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Ekonomi	81
4.13	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Ketenagakerjaan	84
4.14	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Sosial dan Budaya	87
4.15	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Perumahan dan Lingkungan	90
4.16	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik dan Terburuk di Dimensi Teknologi dan Informasi	93
4.17	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terbaik Seluruh Dimensi Dikaitkan dengan Peringkat Indeks Disparitas PDRB	99

4.18	Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDTHAK Terburuk Seluruh Dimensi Dikaitkan dengan Peringkat Indeks Disparitas PDRB	100
4.19	Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Kota Padang	102
4.20	Korelasi Spearman Antara Peringkat Indeks Keseluruhan dengan Peringkat Indeks di Masing-masing Dimensi	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Kerangka Pikir Penelitian Masing Variabel Terhadap Validator	22
4.1	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota	42
4.2	Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota	43
4.3	PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB per Kapita atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota	45
4.4	Variabel Dimensi Kesehatan dan Gizi Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	60
4.5	Variabel Dimensi Pendidikan Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	61
4.6	Variabel Dimensi Ekonomi Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	62
4.7	Variabel Dimensi Ketenagakerjaan Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	64
4.8	Variabel Dimensi Sosial dan Budaya Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	65
4.9	Variabel Dimensi Perumahan dan Lingkungan Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	67
4.10	Variabel Dimensi Teknologi dan Informasi Terpilih Menurut Kabupaten/Kota	70
4.11	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Kesehatan Dan Gizi	73
4.12	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Pendidikan	77
4.13	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Ekonomi	80
4.14	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Ketenagakerjaan	83
4.15	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Sosial Dan Budaya	85

4.16	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Perumahan Dan Lingkungan	88
4.17	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Teknologi Dan Informasi	92
4.18	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Seluruh Dimensi	95
4.19	Peringkat IDK dan Peringkat PDRB Kabupaten/Kota	96
4.20	Peringkat IDK dan Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Kelompok I	97
4.21	Peringkat IDK dan Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Kelompok II	98
4.22	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Kabupaten Kepulauan Mentawai	101
4.23	Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Kota Padang Panjang	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. PersentasePertumbuhanEkonomiProvinsiSumateraBarat, 2005 – 2009	114
2. PDRB atas DasarHargaBerlaku dan atas DasarHargaKonstan MenurutKabupaten/Kota, 2009	115
3. PDRB atas DasarHargaBerlaku dan atas DasarHargaKonstan MenurutKabupaten/Kota, 2009	116
4. Data DimensiKesehatan dan GiziMenurutKabupaten/kota	117
5. Data DimensiPendidikanMenurutKabupaten/kota	118
6. Data DimensiPendidikanMenurutKabupaten/kota	119
7. Data DimensiEkonomiMenurutKabupaten/kota	120
8. Data DimensiEkonomiMenurutKabupaten/kota	121
9. Data DimensiKetenagakerjaanMenurutKabupaten/kota	122
10. Data DimensiKetenagakerjaanMenurutKabupaten/kota	123
11. Data DimensiSosial dan BudayaMenurutKabupaten/kota	124
12. Data DimensiPerumahan dan LingkunganMenurutKabupaten/kota	125
13. Data DimensiPerumahan dan LingkunganMenurutKabupaten/kota	126
14. Data DimensiTeknologi dan InformasiMenurutKabupaten/kota	127
15. HasilPerhitunganIndeksKompositDisparitasKabupaten/Kota	128
16. HasilPerhitunganIndeksKompositDisparitasKabupaten/Kota	129
17. HasilPerhitunganIndeksKompositDisparitasKabupaten/Kota	130
18. HasilPerhitunganIndeksKompositDisparitasKabupaten/Kota	131
19. MakroProgramMatLab	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan nasional yang telah dan sedang dilaksanakan di Indonesia diarahkan pada terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Secara umum pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau system sosial secara menyeluruh menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi (Todaro, 2000).

Sejak kemerdekaan hingga sekarang, pembangunan telah dilaksanakan tidak kurang dari 65 tahun. Sepanjang waktu itu pembangunan dilaksanakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya dengan strategi dan perencanaan yang berbeda. Setiap pemerintahan mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan menyusun visi dan misi pembangunan, yang kemudian dijabarkan dalam program program pembangunan. Hakekat dari tujuan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menjamin keserasian dan keterpaduan pembangunan nasional perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Permasalahan utama dari hasil pembangunan yang selama ini terjadi dan terus diupayakan untuk selalu dikurangi adalah masalah ketimpangan antar daerah. Perbedaan yang cukup mencolok yang selama ini terlihat adalah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), atau Jawa dengan luar Jawa, Jakarta dengan luar Jakarta dan juga antara kota dengan desa.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2008). Terjadinya ketimpangan atau kesenjangan dari hasil-hasil pembangunan pada suatu wilayah, berimplikasi terhadap kondisi perekonomian di wilayah tersebut sehingga akan mengakibatkan terpengaruhnya pada bidang-bidang, seperti rendahnya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka buta aksara, tingkat hunian yang kurang layak dan lain sebagainya. Adanya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Sjafrizal, 2008).

Menurut Dumairy (1996 : 66) ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Pertama adalah karena ketidaksetaraan anugerah (*endowment*), misalnya sumber daya alam, kapital, keahlian/keterampilan, bakat atau potensi atau sarana dan prasarana. Sedangkan faktor kedua adalah kesalahan tumpuan strategi

pembangunan. Sasaran-sasaran pembangunan diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan.

Selama ini keberhasilan pembangunan lebih banyak diukur dengan indikator makro perekonomian seperti meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, menurunnya laju inflasi, angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran. Adakalanya antar indikator makro perekonomian menunjukkan ketidakharmonisan arah pertumbuhan sehingga menimbulkan pertanyaan, misalnya saja ekonomi tumbuh cukup tinggi tetapi pengangguran dan kemiskinan tetap sulit untuk ditekan. Sampai dengan sekarang masih diperdebatkan sejauh mana indikator makro perekonomian dapat merefleksikan pencapaian kesejahteraan di masyarakat.

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga arah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sejalan dengan arah dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam program pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Penentuan Provinsi Sumatera Barat dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi perekonomian Sumatera Barat tahun 2009 dapat dikatakan relatif cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka pertumbuhan positif sebesar 4,16 persen (BPS, 2010). Distribusi menurut sektor menunjukkan bahwa semua sektor memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2009 terutama sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa kinerja

perekonomian Sumatera Barat secara umum menunjukkan hasil yang terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun terjadi penurunan pada tahun 2009 (Lampiran 1). Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sekitar 5,73 persen, kemudian meningkat pada periode 2006 – 2008 yaitu masing-masing sebesar 6,14 persen, 6,34 persen dan 6,37 persen. Pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 4,16 persen (BPS, 2010). Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi tidak selalu dapat diartikan bahwa daerah tersebut telah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan pembangunan ekonomi yang terfokus pada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya mengarah pada ketimpangan atau ketidakseimbangan pembangunan antar daerah. PDRB sering digunakan sebagai indikator yang dapat menilai kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Perbedaan nilai PDRB per kapita baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku pada masing-masing kabupaten/kota merupakan cerminan bahwa proses pembangunan di provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di seluruh wilayah kabupaten/kota. Misalnya Kota Padang pada tahun 2009 mempunyai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 24.941.013,- dan Kabupaten Pesisir Selatan hanya Rp 3.038.771,- serta masih banyak lagi kabupaten/kota yang rata-rata masih dibawah nilai rata-rata PDRB per kapita provinsi Sumatera Barat.

Diakui bahwa mengukur kesejahteraan masyarakat memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ukuran kesejahteraan begitu luas baik dimensi dan

intensitasnya. Mengukur kesejahteraan seperti mengukur samudra, dimana luas dan dalamnya mungkin akan terukur secara tidak sempurna. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi agregat dari kepuasan-kepuasan individu. Kepuasan merupakan ukuran relatif yang akan berubah seiring dengan perubahan waktu dan selera. Meski tidak ada batasan yang jelas tentang substansi kesejahteraan, namun diyakini bahwa kesejahteraan itu mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lahiriah lainnya seperti rekreasi dan hiburan.

Hingga saat ini belum banyak dibangun suatu indikator statistik untuk digunakan sebagai proksi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. UNDP (1994) mempelopori penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi untuk mengukur pencapaian pembangunan dengan titik sentral pada kesejahteraan manusianya. Menurut indeks ini, pembangunan dikatakan berhasil jika berdampak pada kualitas kesehatan, pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Ukuran ini bersifat universal dan juga sangat humanis karena mencerminkan pencapaian harapan setiap insan dalam kehidupannya. Dengan mengetahui informasi perbedaan tingkat hidup antar suatu daerah dengan daerah lainnya tentunya akan memudahkan pemerintah, khususnya instansi/lembaga donor, untuk mengefektifkan program mereka yang berkaitan dengan masalah tingkat hidup. Kemudian dengan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab adanya disparitas tingkat hidup antar daerah akan memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan guna memperkecil bahkan menghilangkan disparitas tingkat hidup.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran penggunaan metode Taksonomik dalam menyusun indeks disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Bagaimana membentuk indeks komposit disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota berdasarkan beberapa variabel sosial ekonomi
3. Bagaimana kondisi hasil indeks disparitas tingkat hidup di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai penggunaan Metode Taksonomik dalam menyusun indeks disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota
2. Menyusun indeks disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota yang merupakan indeks menyeluruh (*composite index*) berdasarkan beberapa variabel sosial ekonomi untuk setiap kabupaten/kota
3. Mengkaji hasil indeks disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota untuk menentukan arah kebijakan pembangunan masing-masing Kabupaten/kota

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Memberikan masukan bagi pemerintah Sumatera Barat dalam menentukan indeks disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota berdasarkan beberapa variabel sosial ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menentukan pola kebijakan pembangunan yang tepat pada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan indeks disparitas kesejahteraan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan ruang lingkup.

Bab II : Tinjauan Pustaka,

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang konsep, teori, kajian penelitian terdahulu dan definisi operasional variabel.

Bab III : Metodologi

Bab ini menjelaskan tentang daerah penelitian, data dan sumber data, metode analisis, serta tahapan penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan berisikan hasil analisis dan pembahasan tentang disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Bab ini juga menampilkan implikasi kebijakan terkait hasil pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan pada level kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, sehingga akan diperoleh Indeks Disparitas Kesejahteraan Kabupaten/Kota. Peringkat indeks komposit menggunakan kota Padang sebagai kabupaten/kota model atau acuan, dengan pertimbangan bahwa Kota Padang sebagai ibukota provinsi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam hal tingkat hidup maupun kondisi perekonomiannya. Kota Padang juga selalu dijadikan sebagai barometer dalam keberhasilan suatu program pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Secara luas pembangunan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan suatu masyarakat atau sistem sosial menuju kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2000). Todaro juga menyebutkan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Jadi hakekat pembangunan mencerminkan perubahan suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.

Sebelumnya pembangunan hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya pembangunan hanya diukur dari tingkat pertumbuhan PDB atau PDRB, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi. Hal ini akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara merata. Namun pada akhirnya banyak negara menyadari bahwa tujuan utama dari pembangunan bukan saja menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga adanya penghapusan

kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan pekerjaan (Todaro, 2000)

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan makmur dan sentosa yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik fisik, materi maupun rohani. Sejalan dengan itu maka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 - 2009 (Anonim, 2005). Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan lima sasaran pokok, yaitu :

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah
3. Meningkatkan kualitas manusia yang tercermin dari angka IPM
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Membaiknya infrastruktur sarana penunjang pembangunan

Dari kelima sasaran pokok di atas, yang berkaitan dengan pembangunan wilayah adalah sasaran pokok yang kedua yaitu berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal. Selain itu juga meningkatnya pengembangan

wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota besar, menengah dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan bangunan (BPS, 2009).

Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan yang diinginkan, baik pada saat sekarang maupun di masa datang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Sjafrizal, 2008:154).

Sjafrizal (2008) juga menyebutkan bahwa sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan juga diperlukan pada tingkat regional (wilayah). Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Disamping itu, antara suatu daerah dengan daerah lainnya terdapat berbagai kaitan sosial ekonomi sehingga kondisi dan perkembangan pada daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing daerah.

Pembangunan regional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Arsyad, 1999 : 108).

2.2 Konsep Kesejahteraan

Menurut *World Bank Institute* dan BPS (2002), ada banyak definisi dan konsep yang berbeda tentang kesejahteraan atau *well-being*. Misalnya, kita dapat mengatakan kesejahteraan seseorang sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komoditas secara umum. Seseorang dikatakan mampu (memiliki kemampuan ekonomi lebih baik) jika dia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya (kekayaan) yang dimilikinya. Atau kita dapat berpikir tentang kemampuan untuk memperoleh jenis barang-barang konsumsi tertentu (misalnya makanan dan perumahan). Seseorang yang kurang mampu untuk andil (berfungsi) dalam masyarakat mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (Sen, 1987) atau lebih rentan (*vulnerable*) terhadap krisis atau gejolak ekonomi dan cuaca.

Konsep lain dari kesejahteraan, baik diukur dari dimensi moneter maupun non moneter adalah ketimpangan. Ketimpangan menitikberatkan pada distribusi dari atribut/variabel terukur (misalnya pendapatan atau pengeluaran) terhadap seluruh penduduk. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa posisi relatif dari individu rumah tangga dalam masyarakat merupakan aspek penting dari

kesejahteraan mereka. Tingkat ketimpangan secara keseluruhan dalam suatu negara, wilayah atau kelompok penduduk, baik dalam bentuk dimensi moneter maupun non moneter juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan secara ringkas tentang tingkat kesejahteraan dalam kelompok tersebut.

Hal lain tentang kesejahteraan adalah kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan didefinisikan sebagai peluang atau resiko menjadi miskin atau jatuh lebih miskin pada waktu-waktu mendatang. Kerentanan merupakan dimensi kunci dari kesejahteraan karena kerentanan berakibat pada perilaku individu (dalam bentuk investasi, pola produksi, strategi penanggulangan) dan persepsi dari kondisi mereka sendiri. Menurut Bank Dunia (2000), "*poverty is pronounced deprivation in well being*", dimana kesejahteraan dapat diukur oleh kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan berbicara.

2.3 Konsep Disparitas

Pembahasan kesenjangan menghendaki pendefinisian kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selain itu kesenjangan juga menggunakan daerah sebagai basis pengelompokkan. Pengelompokkan berbasis daerah tersebut mempunyai implikasi pengamatan kesenjangan masyarakat antar daerah. Berbagai cara pengelompokkan lain yang telah biasa digunakan adalah kelompok masyarakat wilayah desa dan wilayah perkotaan. Secara teoritik kesenjangan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu faktor alam, faktor kultural dan faktor struktural

atau kebijakan (http://www.bappeda-jabar.go.id/does/perencanaan/20070620_065405.pdf).

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori itu dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian dikenal dengan hipotesa Neo-Klasik yang menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan wilayah (Sjafrizal, 2008:105).

Sjafrizal (2009:175) menyebutkan bahwa hampir di semua negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah cukup besar. Hal ini dipicu oleh beberapa hal antara lain : perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan kondisi demografis dan ketenagakerjaan dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu, kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional tersebut.

Rangkaian berbagai penelitian tentang kesenjangan ditandai oleh tonggak-tonggak temuan. Kuznets (1954), tercatat sebagai salah seorang peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Kuznets meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata per kapita pada awal perkembangan negara masih rendah dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata per

kapita naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata per kapita naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antar wilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah.

Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan pada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan harapan tingkat keuntungan yang rendah tidak akan berkembang sehingga terjadi kesenjangan. Teori efek polarisasi menjelaskan kesenjangan antar wilayah yang meningkat karena berpindahnya faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah yang lebih maju. Sebaliknya terdapat teori yang menjelaskan proses yang berlawanan arah, yaitu teori efek penetesannya yang menjelaskan penyebaran faktor produksi dari suatu wilayah yang telah maju ke wilayah yang kurang atau belum maju karena di wilayah yang telah maju terjadi eksternalitas negatif yang makin besar.

Pada penelitian lain, kesenjangan juga dikaitkan dengan faktor alam, yaitu tingkat kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa urbanisasi sebagai akibat dari kesenjangan pedesaan dan perkotaan, merupakan proses menuju suatu bentuk tertentu dari keseimbangan (http://www.bappeda-jabar.go.id/does/perencanaan_20070620_065405.pdf).

Liang (2005) menjelaskan mengenai pola hubungan perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada disparitas antar wilayah di China khususnya kesenjangan wilayah pesisir dan daratan. Penelitian tersebut berusaha mengeksplorasi bagaimana keadaan perekonomian makro di China pasca diberlakukannya dualisme sistem ekonomi China (lebih bersifat kapitalis untuk wilayah pesisir dan sosialis untuk wilayah daratan). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir, tapi tidak memberi dampak pada wilayah daratan. Fakta ini diperburuk oleh lemahnya sektor keuangan di wilayah daratan yang secara kontekstual semakin memperburuk disparitas antara wilayah pesisir dan wilayah daratan di China. Penelitian tersebut menggunakan data PDRB provinsi di China dan melihat tingkat kesenjangan berdasarkan indeks Gini.

Barrios dan Strobl (2006) menuliskan laporan penelitian mengenai hubungan antar wilayah dengan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data PDB di negara-negara Uni Eropa yang diolah dengan metode ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB dengan kesenjangan antar wilayah yang berbentuk kurva huruf U terbalik. Hasil penelitian ini memberikan bukti yang kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki pola kesenjangan wilayah yang berbentuk kurva huruf U terbalik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kuznets. Temuan lain dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel yang berkaitan dengan kebijakan penggabungan ekonomi negara Uni Eropa antara lain struktur anggaran negara

dan desentralisasi fiskal dan mekanisme redistribusi jaminan sosial memberi dampak terhadap kesenjangan antar wilayah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Assuncao (2005) yang mencoba mengeksplorasi peran pengetahuan masyarakat sebagai faktor utama dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah di Brazil. Dalam laporan penelitian tersebut dipaparkan berbagai alternatif untuk sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai saluran atau kanal informasi. Penelitian ini juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Brazil. Tujuan pembangunan milenium tersebut sebagai indikator untuk memperlihatkan perkembangan Brazil dalam peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan wilayah.

Penelitian kesenjangan antar daerah di India yang relatif baru dilakukan oleh B. Bhattacharya dan A. Sakthivel (2004). Penelitian ini menganalisis kesenjangan wilayah yang terjadi di India. Data yang digunakan adalah data PDB, PDRB dan pendapatan per kapita sebagai dasar analisis deskriptif untuk menjelaskan kinerja pertumbuhan wilayah dan perubahan struktur wilayah-wilayah di India. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembangunan industri di India berjalan dengan cepat dan terpusat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur yang memadai. Pola pembangunan seperti ini semakin mempertajam kesenjangan antar wilayah di India. Temuan lainnya adalah adanya korelasi negatif antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pendapatan. Hal ini secara berantai menimbulkan suatu masalah yang simultan, yaitu beban wilayah yang berat dengan jumlah penduduk tinggi dan pendapatan yang rendah, sehingga

mendorong migrasi ke wilayah lain yang lebih maju. Di sisi lain, masalah yang terjadi pada wilayah tujuan adalah tidak meratanya tingkat pendidikan yang menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti pengangguran yang mengarah pada meningkatnya kriminalitas.

Penelitian lain yang relevan dengan desentralisasi dilakukan oleh Lessmann (2006). Penelitian ini untuk melihat hubungan desentralisasi fiskal dengan kesenjangan wilayah. Dengan menggunakan beberapa data statistik ekonomi 17 negara OECD yang diolah dengan analisis deskriptif menghasilkan temuan bahwa negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah. Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besar akan dapat mengurangi kesenjangan. Namun hasil temuan ini hanya berlaku bagi negara-negara maju saja, bagi negara berkembang dan miskin desentralisasi mungkin akan menyebabkan semakin tajamnya kesenjangan antar wilayah. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat korupsi dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Diantaranya adalah penelitian Arief (1983) mengenai adanya ketidakseimbangan dalam penyebaran manfaat dan hasil pembangunan antar regional di Indonesia pada tahun 1971. Dengan menggunakan metode taksonomik, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam menentukan

suatu indeks menyeluruh (*composite index*) yang didasarkan atas beberapa variabel atau indikator sosial ekonomi. Arief menyimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam penyebaran manfaat dan hasil pembangunan antar regional di Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan peringkat indeks disparitas tingkat hidup dan indeks disparitas ekonomi dari 25 provinsi yang diukur (tanpa Irian Jaya dan Timor Timur).

Aplikasi metode taksonomik juga pernah dilakukan oleh Iyanatul Islam dan Habibullah Khan (1989) dalam penelitian tentang disparitas regional dalam pembangunan di Indonesia pada tahun 1980. Penelitian ini menggunakan indikator kebutuhan dasar (kesehatan dan gizi) dan kemiskinan (persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan tertentu) sebagai tolok ukur pembangunan.

Penelitian adanya disparitas tingkat hidup antar provinsi pernah dilakukan BPS tahun 1999. Dalam laporannya, BPS menggunakan lima indikator tingkat hidup yaitu indikator kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan sosial budaya. Dengan menggunakan metode taksonomik, BPS menyimpulkan bahwa lima provinsi yang memiliki peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi di Indonesia tahun 1999 selain DKI Jakarta sebagai provinsi model atau acuan adalah Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali dan Riau. Sedangkan lima provinsi dengan peringkat terbawah adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, NTB, Irian Jaya dan NTT.

Analisis ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Panorama (2003). Untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi, sosial

dan infrastruktur digunakan beberapa indikator yaitu rasio guru terhadap murid, rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk, panjang jalan kabupaten/kota yang diaspal, rasio perkara perdata dan pidana yang masuk per 1.000 penduduk, angka kelahiran bayi, angka kematian total, tingkat harapan hidup, pertumbuhan penduduk, PDRB per kapita serta jumlah PMA dan PMDN. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daerah yang berhasil dalam pembangunan ekonomi adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas. Daerah yang berhasil dalam pembangunan secara keseluruhan baik pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur adalah Kota Palembang. Secara rata-rata indeks ketimpangan pembangunan antar daerah di Sumatera Selatan cenderung turun. Agar pembangunan daerah dapat berhasil dari segala aspek kehidupan, maka diperlukan program kerja yang seimbang baik dari aspek ekonomi, sosial dan infrastruktur. Disamping itu perlu pemerataan proyek-proyek investasi baik dari pemerintah maupun swasta agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang dapat menarik investor dalam menanamkan modal secara merata di kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan.

Selain itu, Naibaho (2003) pernah menggunakan indikator pembangunan (ekonomi dan sosial) dalam mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia. Indikator yang digunakan Naibaho mengacu pada indikator sosial ekonomi yang digunakan oleh *World Bank* dalam "*World Development Indicator 1998*" dan UNDP dalam "*The Human Development Report 1998*". Dengan menggunakan data tahun 2001 disimpulkan bahwa kelompok provinsi maju dan berkembang

didominasi oleh provinsi-provinsi yang terletak di wilayah Jawa dan ada kesenjangan antara pembangunan di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Martina (2005) meneliti tentang perekonomian di Sumatera Utara periode 1993-2003 dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Hasil penelitian Martina menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan manusia, hal ini diperlihatkan dengan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Hasil dari pengklasifikasian kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menggunakan klasen tipologi menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Karo dan Kota Sibolga termasuk dalam kabupaten/kota yang maju dan tumbuh pesat.

2.5 Kerangka Pikir

Disparitas pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang masih banyak dihadapi oleh banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, dimana telah terjadi ketimpangan baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Banyak faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan suatu daerah, baik faktor ekonomi maupun faktor sosial yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Berdasarkan tinjauan pustaka pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis taksonomik yaitu melihat pola pembangunan (*pattern of development*) dan ukuran pembangunan (*measure of development*) atau indeks pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa mengukur kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ukuran kesejahteraan sangat luas dimensi dan intensitasnya. Meski tidak ada batasan yang jelas tentang substansi kesejahteraan, namun diyakini bahwa kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lahiriah lainnya seperti rekreasi dan hiburan. Berdasarkan pemikiran ini, maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan seperti gambar diagram 1.

Diagram 1. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Dari kerangka pikir seperti pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa dimensi sosial ekonomi dan budaya seperti kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, perumahan dan lingkungan serta teknologi dan informasi. Variabel-variabel pengukur yang akan digunakan pada penelitian

ini untuk menentukan tingkat hidup penduduk suatu kabupaten/kota dibatasi pada beberapa dimensi dan variabel, yaitu :

1. Variabel Dimensi Kesehatan dan Gizi (X_1) mencakup variabel :
 - a. Angka Harapan Hidup (X_{101})
 - b. Persentase balita kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (X_{102})
 - c. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari (kkal) (X_{103})
2. Variabel Dimensi Pendidikan (X_2) mencakup variabel :
 - a. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf (X_{201})
 - b. Rata-rata lama sekolah (X_{202})
 - c. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas (X_{203})
 - d. Angka partisipasi sekolah umur 7 – 12 tahun (X_{204})
 - e. Angka partisipasi sekolah umur 13 – 15 tahun (X_{205})
 - f. Angka partisipasi sekolah umur 16 – 18 tahun (X_{206})
3. Variabel Dimensi Ekonomi (X_3) mencakup variabel :
 - a. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (X_{301})
 - b. Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (X_{302})
 - c. Rasio 20 persen penduduk antara pengeluaran tertinggi dengan pengeluaran terendah (X_{303})
 - d. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (X_{304})
 - e. Persentase pengeluaran untuk non makanan (X_{305})
 - f. Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai (X_{306})
4. Variabel Dimensi Ketenagakerjaan (X_4) terdiri dari variabel :

- a. Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (X_{401})
 - b. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (X_{402})
 - c. Persentase tingkat kesempatan kerja (X_{403})
 - d. Rata-rata jam kerja buruh/karyawan/pekerja seminggu yang lalu (X_{404})
 - e. Persentase pekerja di sektor formal (X_{405})
 - f. Persentase pekerja di sektor pertanian (X_{406})
5. Variabel Dimensi Sosial dan Budaya (X_5) terdiri dari variabel :
- a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton televisi seminggu yang lalu (X_{501})
 - b. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar/ majalah seminggu yang lalu (X_{502})
 - c. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu yang lalu (X_{503})
6. Variabel Dimensi Perumahan dan Lingkungan (X_6) mencakup variabel :
- a. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama rumah (X_{601})
 - b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih (X_{602})
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki lantai rumah sebagian besar bukan dari tanah (X_{603})
 - d. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri (X_{604})
 - e. Persentase rumah tangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran (X_{605})

- f. Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita $> 8 \text{ m}^2$ (X_{606})
 - g. Persentase rumah tangga yang memiliki dinding tembok (X_{607})
7. Variabel Dimensi Teknologi dan Informasi (X_7) mencakup variabel :
- a. Persentase rumah tangga yang mempunyai telepon seluler (X_{701})
 - b. Persentase rumah tangga yang mempunyai komputer (X_{702})
 - c. Persentase rumah tangga yang akses internet sebulan lalu (X_{703})



BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Penelitian analisis disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009. Susenas merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Instrumen Susenas terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu instrumen kor atau keterangan umum yang dikumpulkan setiap tahun dan instrumen modul yaitu keterangan khusus atau spesifik yang dikumpulkan setiap tiga tahun sekali. Ketiga jenis modul yang dikumpulkan adalah :

- (1) Modul konsumsi atau pengeluaran dan pendapatan rumah tangga
- (2) Modul sosial, budaya dan pendidikan
- (3) Modul kesehatan dan perumahan

Sakernas merupakan survei khusus yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang ketenagakerjaan. Secara umum tujuan pengumpulan data sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang mencakup data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran serta beberapa karakteristik penduduk bekerja. Dengan semakin mendesaknya informasi data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas dan kemutakhirannya, maka mulai tahun 2005 sampai

sekarang Sakernas dilaksanakan secara semesteran, yaitu semester I bulan Februari dan semester II pada bulan Agustus.

PDRB dihitung untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dalam PDRB ini masih terkandung faktor inflasi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar dimana dalam PDRB atas dasar konstan faktor inflasi sudah dihilangkan. Untuk menghitung angka PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan konsumsi atau pengeluaran.

3.2. Metode Analisis

3.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis diawali dengan mengamati potensi perekonomian tiap-tiap kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan dengan melihat indeks disparitas kesejahteraan atau tingkat hidup per dimensi dan keseluruhan dimensi. Kondisi ideal suatu kabupaten/kota adalah jika tingkat hidupnya melebihi potensi perekonomian yang dimilikinya. Dengan mengamati peringkat indeks masing-masing kabupaten/kota diharapkan akan dapat dibuat rekomendasi sektor-sektor

manakah yang perlu dibangun untuk meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan penduduk di kabupaten/kota tersebut.

3.2.2 Tahapan Pengukuran Kesejahteraan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari suatu ukuran yang dapat mengukur tingkat hidup penduduk di suatu wilayah. Ukuran yang dicari adalah ukuran yang sederhana, valid dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dapat diperhatikan dari kerangka pikir bahwa kesejahteraan merupakan ukuran yang kompleks, dengan pilihan variabel yang cukup banyak. Untuk menyederhanakan ukuran, maka perlu dilakukan seleksi terhadap variabel per dimensinya dimana tujuan akhirnya adalah mendapatkan variabel yang benar-benar valid untuk bisa menjelaskan dimensi tersebut. Untuk itu dari semua alternatif variabel, pada tahap pertama dipilih salah satu variabel yang paling menggambarkan tingkat hidup penduduk suatu wilayah, variabel ini selanjutnya diperlakukan sebagai validator.

Dari semua alternatif variabel, variabel persentase pengeluaran non makanan (X_{305}) dinilai sebagai variabel yang paling menggambarkan tingkat kesejahteraan hidup penduduk di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan Hukum Angel yang menyatakan bahwa semakin sejahtera penduduk suatu wilayah maka akan semakin besar bagian pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi non makanan. Untuk selanjutnya variabel persentase pengeluaran non makanan akan digunakan sebagai validator. Penentuan ukuran tingkat hidup dimulai dengan mencari ukuran yang valid untuk tiap dimensi. Dari semua variabel yang lolos uji validitas selanjutnya dihitung tingkat reliabilitasnya sebagai pengukur dimensi.

3.2.2.1 Uji Validitas

Validitas suatu variabel menggambarkan keamatan hubungan antara suatu variabel dengan validator. Untuk menguji validitas maka dihitung koefisien korelasi antara variabel kandidat dengan validator yaitu dengan menggunakan *Spearman rank Correlation Coefficient* (J. Soepranto : 2009) dengan formulasi :

$$r = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

dimana :

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

$n =$ jumlah sampel

$d_i =$ selisih nilai (rank) antara dua variabel

Nilai koefisien korelasi dihitung pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$). Suatu variabel dikatakan valid jika signifikansi korelasinya dengan validator ≤ 5 persen. Namun demikian untuk memperkaya variabel yang digunakan dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan diperlebar menjadi 90 persen ($\alpha = 0,10$). Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan beberapa variabel sebenarnya valid namun karena tingkat taraf uji yang dipakai tidak sesuai, maka variabel ini tereliminasi. Akan tetapi nantinya jika variabel tersebut tidak benar-benar valid, maka variabel tersebut akan tereliminasi pada waktu pengujian reliabilitasnya.

Pada dasarnya seorang peneliti bebas menentukan berapa besar interval kepercayaan yang akan dipergunakan. Dalam ilmu sosial, interval kepercayaan yang sering digunakan adalah 90 %, 95 % atau 99 % (Kusharianingsih Candranita dalam Pengantar Statistik Sosial). Menurut Rahayu Astuti dalam materi kuliah

Hipotesis dan Pengujian Hipotesis Penentuan nilai alpha (α) tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Nilai yang sering dipakai adalah 10 %, 5 %, 1 %, Untuk bidang kesehatan masyarakat biasanya digunakan nilai sebesar 5 %. Sedangkan untuk pengujian obat-obatan digunakan batas toleransi kesalahan yang lebih kecil misalnya 1 %, karena mengandung risiko yang fatal. Dalam Dasar-dasar Ekonometrika (Gujarati : 104) disebutkan kelemahan dari pendekatan klasik dalam pengujian hipotesis adalah penentuan α yang dilakukan secara sembarang. Meskipun 1, 5, atau 10 persen merupakan nilai-nilai yang lazim digunakan, tidak ada yang keramat pada angka-angka itu.

3.2.2.2 Pengukuran Tingkat Reliabilitas

Tingkat reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan keeratan hubungan diantara masing-masing variabel yang valid. Tingkat reliabilitas suatu ukuran yang melibatkan k variabel dihitung dengan menggunakan rumus *Cronbach's alpha* dengan formula (Carmines dan Zeller, 1981) :

$$r_{kk} = \frac{\overline{kr_{ij}}}{[1 + (k-1)\overline{r_{ij}}]}$$

Dimana :

$\overline{r_{ij}}$ = rata-rata koefisien korelasi dari semua elemen ($i \neq j$) dalam matrik

korelasi (Carmines dan Zeller, 1981)

$$= \frac{1}{(k-1)(k-1)} \sum_{i \neq j}^{k-1} \sum r_{ij}$$

Semakin tinggi nilai r_{kk} semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu ukuran. Namun demikian perlu diteliti lagi apakah setiap variabel yang digunakan mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap reliabilitas ukuran. Untuk mendapatkan kelompok variabel yang mempunyai hubungan yang cukup erat, maka selanjutnya dihitung kontribusi atau sumbangan masing-masing variabel terhadap reliabilitas ukuran. Makin kuat hubungan antar variabel yang menjadi komponen pengukuran makin tinggi reliabilitas pengukuran tersebut. Untuk menghitung besarnya kontribusi suatu variabel dilihat dari besarnya nilai koefisien masing-masing variabel digunakan rumus :

$$\bar{r}_{i.} = \frac{1}{k-1} \sum_{i \neq j}^{k-1} r_{ij}$$

Dimana :

k = banyaknya variabel yang digunakan

r_{ij} = koefisien korelasi antara variabel ke- i dengan variabel ke- j yang diperoleh dari matrik korelasi

Suatu variabel mempunyai kontribusi reliabilitas yang tinggi jika :

$$\bar{r}_{i.} > \bar{r}_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$$

Dimana : $\sigma_{r_{ij}}$ = standar deviasi dari r_{ij}

3.3. Metode Taksonomik

Penghitungan indeks komposit disparitas kesejahteraan atau tingkat hidup antar kabupaten/kota dilakukan dengan Metode Taksonomik. Metode Taksonomik bermanfaat dan banyak dipakai untuk menyusun peringkat

sekelompok wilayah (negara, daerah atau unit spasial lainnya) berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang berkaitan dengan berbagai ragam kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah seperti daerah atau unit spasial lainnya. Metode pengukuran dalam model taksonomik ini telah dikemukakan oleh sekelompok ahli matematika Polandia di bawah pimpinan Florek (1952) dan telah diusulkan oleh Hellwig (1967) kepada UNESCO untuk membandingkan tingkat perkembangan sosial dan ekonomi berbagai negara di dunia dan selanjutnya telah dipelopori penggunaannya oleh Harbison, Mahrunik, dan Resnik (1970) dalam studi pembangunan berbagai negara. Selain itu metode taksonomik juga dapat dijadikan dasar untuk formasi kebijakan alokasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka memperkecil disparitas regional (Arief, 1993:190).

Metode taksonomik pada dasarnya bertujuan untuk menentukan suatu indeks menyeluruh/komposit (*composite index*) dari berbagai ragam ukuran, yang selanjutnya berdasarkan indeks komposit tersebut dibuat peringkat unit spasialnya. Indeks komposit disparitas terdiri dari dua komponen, yaitu (1) pola pembangunan (*pattern of development*) dan (2) ukuran pembangunan (*measure of development*), kemudian dari ukuran pembangunan tersebut dibuat peringkat unit spasial. Dalam penelitian ini penyusunan indeks disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat didasarkan pada beberapa variabel yang telah lolos uji validitas maupun uji reliabilitas.

Terdapat berbagai formula dalam melihat adanya ketimpangan atau disparitas, salah satunya adalah yang ditemukan oleh Williamson atau yang lebih dikenal dengan istilah *Williamson Index*. Indeks ini untuk mengukur ketimpangan

antar pembangunan antar wilayah, namun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam penghitungan (Sjafrizal, 2009:176). *Williamson Index* menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, sehingga pencapaian kondisi perekonomian suatu wilayah yang dibandingkan bukan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan antar kelompok. Metode lain yang digunakan dalam melihat ketimpangan adalah Gini Ratio yang lebih tepatnya adalah untuk melihat kesenjangan distribusi pendapatan personal dalam masyarakat, namun demikian terdapat kelemahan dari besarnya nilai Gini Ratio yakni tidak dapat menjelaskan letak ketimpangannya.

Pada kondisi sekarang ini, lebih banyak digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi dalam mengukur pencapaian pembangunan dengan titik sentral pada kesejahteraan manusia yang dihitung berdasarkan tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Namun sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak semata hanya pada tiga dimensi di atas, tetapi ada dimensi lain yang perlu untuk dipenuhi untuk melihat bagaimana kesejahteraan penduduk atau masyarakat tercapai. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas misalnya : kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk kreatif dan produktif serta menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak manusia. Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu untuk dapat menjelaskan bagaimana keberhasilan pembangunan manusia, IPM harus dilengkapi dengan

dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya terutama yang dapat diukur seperti : kesempatan untuk dapat menonton televisi, membaca majalah/koran, mengakses internet, menikmati fasilitas perumahan, kesempatan kerja dan lain-lain.

Salah satu kelebihan metode taksonomik yaitu memungkinkan untuk melengkapi banyak variabel dalam dimensi pembangunan manusia selama variabel-variabel tersebut ada ukurannya dan variabel tersebut dilakukan standarisasi ukuran sehingga memiliki ukuran yang sama. Metode taksonomik yang dibangun berdasarkan jarak suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain yang dijadikan acuan sehingga memudahkan dalam penghitungannya. Dengan metode taksonomik, tidak hanya pencapaian sisi perekonomian saja yang dapat dijadikan ukuran akan tetapi pencapaian tingkat hidup atau kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat diukur, apakah pencapaian yang tinggi dari sisi perekonomian berjalan seiring dengan tingkat hidup masyarakatnya

3.3.1 Metode Penghitungan Indeks Komposit

Prosedur penghitungan indeks komposit ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama adalah membentuk matriks dasar (A) dimana baris menunjukkan kabupaten/kota yang diteliti, sedangkan kolom menunjukkan sekumpulan variabel terpilih. Matriks dasar (A) seperti berikut :

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \alpha_{2m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \alpha_{19.1} & \alpha_{19.2} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \alpha_{19.m} \end{bmatrix}$$

dimana :

n = baris = jumlah kabupaten/kota (1, 2, 3, ..., 19)

m = kolom = jumlah variabel/indikator sosial ekonomi (1, 2, 3, ..., m)

α = variabel sosial dan ekonomi

- b. Tahap kedua adalah membuat matriks yang sudah distandardisasi dari matriks dasar sebelumnya. Karena ukuran-ukuran dari dimensi sosial ekonomi yang berkaitan dengan variabel-variabel/indikator tidak seragam, maka perlu dilakukan penyeragaman (*standardization procedure*). Rumus yang digunakan untuk menstandarisasi semua isian sel matriks dasar adalah (Arief, 1993) :

$$\lambda_{ij} = \frac{\alpha_{ij} - \bar{\alpha}_j}{\beta_j}, \text{ dimana :}$$

$$\bar{\alpha}_j = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_{ij}}{n} \quad \beta_j = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\alpha_{ij} - \bar{\alpha}_j)^2}$$

Sehingga diperoleh matriks yang sudah distandardisasi seperti berikut :

$$A_Z = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{2m} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{3m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \lambda_{19.1} & \lambda_{19.2} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{19.m} \end{bmatrix}$$

- c. Tahap ketiga adalah menghitung jarak antar kabupaten/kota (1, 2, 3, ..., n) untuk setiap indikator dan membentuk isian-isian tersebut dalam bentuk matriks sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} \lambda_{11} - \lambda_{21} & \lambda_{12} - \lambda_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{1m} - \lambda_{2m} \\ \lambda_{11} - \lambda_{31} & \lambda_{12} - \lambda_{32} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{1m} - \lambda_{3m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \lambda_{9.1} - \lambda_{11.1} & \lambda_{9.2} - \lambda_{11.2} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{9m} - \lambda_{11m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \lambda_{(n-1)1} - \lambda_{n1} & \lambda_{(n-1)2} - \lambda_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \lambda_{(n-1)m} - \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

- d. Tahap keempat adalah membuat matriks jarak (*distance matrix*) yaitu matriks simetris yang merupakan hasil kali matriks jarak antar kabupaten/kota dengan matriks transposenya. Secara sederhana matriks simetris tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} 0 & \pi_{12} & \pi_{13} & \cdot & \cdot & \cdot & \pi_{1.19} \\ \pi_{21} & 0 & \pi_{23} & \cdot & \cdot & \cdot & \pi_{2.19} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \pi_{3.19} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \pi_{19.1} & \pi_{19.2} & \pi_{19.3} & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \end{bmatrix}$$

dimana :

$$\pi_{ab} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (\lambda_{ak} - \lambda_{bk})^2}$$

$$\pi_{aa} = 0 \text{ dan } \pi_{ab} = \pi_{ba}$$

- e. Tahap kelima adalah menentukan pola pembangunan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui jarak pembangunan masing-masing kabupaten/kota dari pembangunan Kota Padang sebagai daerah yang dijadikan model atau acuan, dengan rumus seperti berikut :

$$\pi_{io} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (\lambda_{ik} - \lambda_{ok})^2}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, 19$$

dimana π_{io} = jarak setiap kabupaten/kota dalam matriks jarak (distance matrix) terhadap (dari) daerah yang dijadikan model.

Semakin tinggi nilai π_{io} maka semakin jauh jarak kabupaten/kota bersangkutan dari kabupaten/kota model (kabupaten/kota yang dijadikan acuan).

- f. Tahap keenam adalah menentukan ukuran pembangunan (λ_i^*), yang memiliki nilai diantara nol dan satu : ($0 \leq \lambda_i^* \leq 1$), tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan pada setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran pembangunan adalah :

$$\lambda_i^* = \frac{\pi_{io}}{\pi_o}$$

dimana :

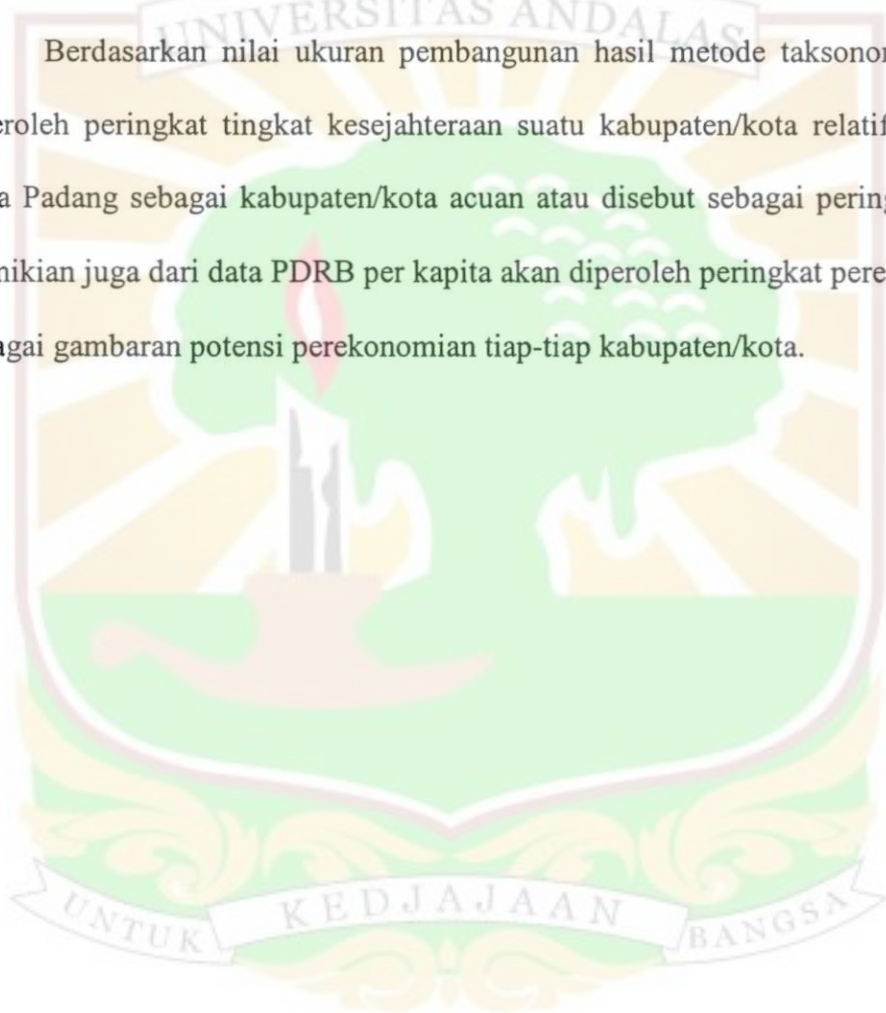
$$\pi_o = \bar{\pi}_{io} + 2\beta_{io}$$

$$\bar{\pi}_{io} = \frac{\sum_{i=1}^{19} \pi_{io}}{19}$$

$$\beta_{io} = \sqrt{\sum_{i=1}^{19} (\pi_{io} - \bar{\pi}_{io})^2}$$

Jika nilai dari ukuran pembangunan semakin mendekati satu, maka kabupaten/kota tersebut semakin tidak/kurang berkembang.

Berdasarkan nilai ukuran pembangunan hasil metode taksonomik, akan diperoleh peringkat tingkat kesejahteraan suatu kabupaten/kota relatif terhadap Kota Padang sebagai kabupaten/kota acuan atau disebut sebagai peringkat IDK. Demikian juga dari data PDRB per kapita akan diperoleh peringkat perekonomian sebagai gambaran potensi perekonomian tiap-tiap kabupaten/kota.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kondisi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Indikator Ekonomi dan Sosial Budaya

Pada bagian ini, analisis secara umum disajikan untuk memberikan gambaran tentang kondisi geografis provinsi Sumatera Barat berikut perbedaan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat berdasarkan beberapa aspek, baik aspek perekonomian daerah maupun aspek dari beberapa dimensi sosial dan ekonomi. Melalui penggambaran ini akan dapat diketahui kabupaten atau kota mana yang layak untuk dijadikan sebagai kabupaten/kota model atau acuan untuk keperluan penghitungan Indeks Disparitas Kesejahteraan maupun PDRB dan kemudian menelaah capaian hasil-hasil pada dimensi sosial ekonomi maupun potensi perekonomian daerahnya.

Ditinjau dari sisi perekonomian, setiap kabupaten/kota mempunyai potensi yang berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Salah satu alat dalam mengukur atau menggambarkan kondisi potensi perekonomian tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang secara khusus dapat dilihat dari empat sudut pandang yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB Nominal), PDRB atas dasar harga konstan (PDRB Riil), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (PDRB Nominal per kapita) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (PDRB riil per kapita).

Berikutnya jika diamati dari dimensi sosial ekonomi, setiap kabupaten/kota juga memiliki output-output yang berbeda-beda terhadap capaian hasil pembangunan.

Output-output pembangunan yang akan dibahas tercermin melalui beberapa variabel terpilih yang secara statistik signifikan untuk mengukur perbedaan tersebut.

4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak diantara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan serta $98^{\circ} 36'$ dan $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur, dengan luas daerah sekitar 42.297,30 km². Luas tersebut setara dengan 2,20 persen dari keseluruhan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah terluas yaitu 6.011,35 km² atau sekitar 14,21 persen, sedangkan Kota Padang Panjang adalah wilayah yang terkecil yaitu sekitar 23,0 km² atau sekitar 0,05 persen. Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah barat, sebelah timur dengan Provinsi Riau, sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu dan di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Dataran Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten seperti kabupaten Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Solok, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan dan kabupaten Pasaman Barat. Selain itu Sumatera Barat juga memiliki beberapa danau diantaranya danau Maninjau, danau Singkarak dan danau kembar. Beberapa sungai besar di pulau Sumatera berhulu di provinsi Sumatera Barat diantaranya sungai Siak, sungai Rokan, sungai Inderagiri atau Batang Kuantan, sungai Kampar dan sungai Batanghari.

Dari keseluruhan wilayah seluas 42.297,30 km² hanya sekitar 0,05 persen yang digunakan untuk perumahan/permukiman. Selanjutnya luas tanah yang

digunakan untuk kampung, perusahaan, industri, jasa dan pertambangan hanya sekitar 2,10 persen, sedangkan tanah yang dimanfaatkan untuk sektor pertanian seperti sawah, tegalan, perkebunan, kebun campuran dan perairan darat masing-masing seluas 5,38 persen, 1,05 persen, 11, 17 persen, 5,93 persen dan 1,65 persen. Selain itu luas tanah rumput, semak/alang-alang, tanah kosong dan tandus seluas 0,10 persen, 2,88 persen, 1,09 persen dan 0,73 persen. Sedangkan tanah yang dipergunakan selain yang disebutkan sebelumnya terdapat 0,57 persen, selebihnya adalah kawasan hutan seluas 67,14 persen dari total luas tanah keseluruhan.

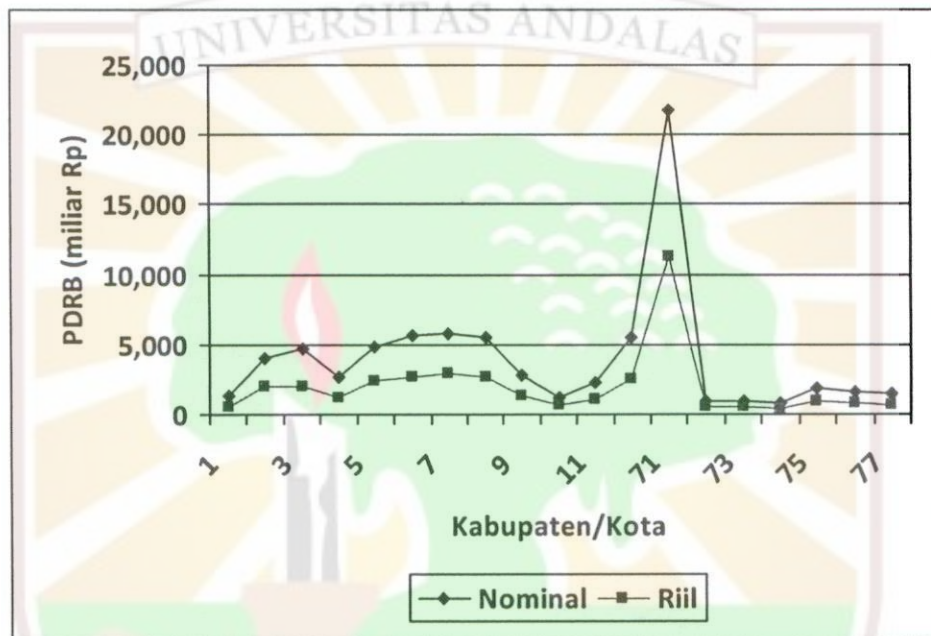
4.1.2. Gambaran Potensi Perekonomian Kabupaten/Kota

Ditinjau dari besarnya PDRB nominal tahun 2009, seperti tampak pada Gambar 4.1 bahwa kota Padang mempunyai potensi perekonomian daerah yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Sumatera Barat, yaitu dengan nilai PDRB nominal sebesar 21.837 milyar rupiah. Potensi perekonomian terbesar kedua dimiliki oleh Kabupaten Agam sebesar 5.822 milyar rupiah, diikuti oleh kabupaten Padang Pariaman, Limapuluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar 5.594 milyar rupiah, 5.529 milyar rupiah dan 5.518 milyar rupiah. Sedangkan kabupaten/kota yang dipandang kurang dalam potensi perekonomian dari sisi nominal adalah kota Padang Panjang (852 milyar rupiah), kota Sawahlunto (976 milyar rupiah) dan kota Solok (982 milyar rupiah).

Sementara jika ditinjau berdasarkan PDRB riil, maka kota Padang tetap menempati urutan pertama dengan nilai PDRB riil sebesar 11.346 milyar rupiah. Posisi tiga besar setelah kota Padang adalah kabupaten Agam, kabupaten Padang Pariaman dan kabupaten Limapuluh Kota dengan nilai PDRB riil masing-masing

sebesar 2.930 milyar rupiah, 2.749 milyar rupiah dan 2.685 milyar rupiah. Sementara kabupaten/kota pada urutan tiga terbawah atau posisi ke 17 sampai 19 adalah kota Padang Panjang (397 milyar rupiah), kota Sawahlunto (494 milyar rupiah) dan kota Solok (498 milyar rupiah).

Gambar 4.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Nominal) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Riil) Menurut Kabupaten/Kota, 2009

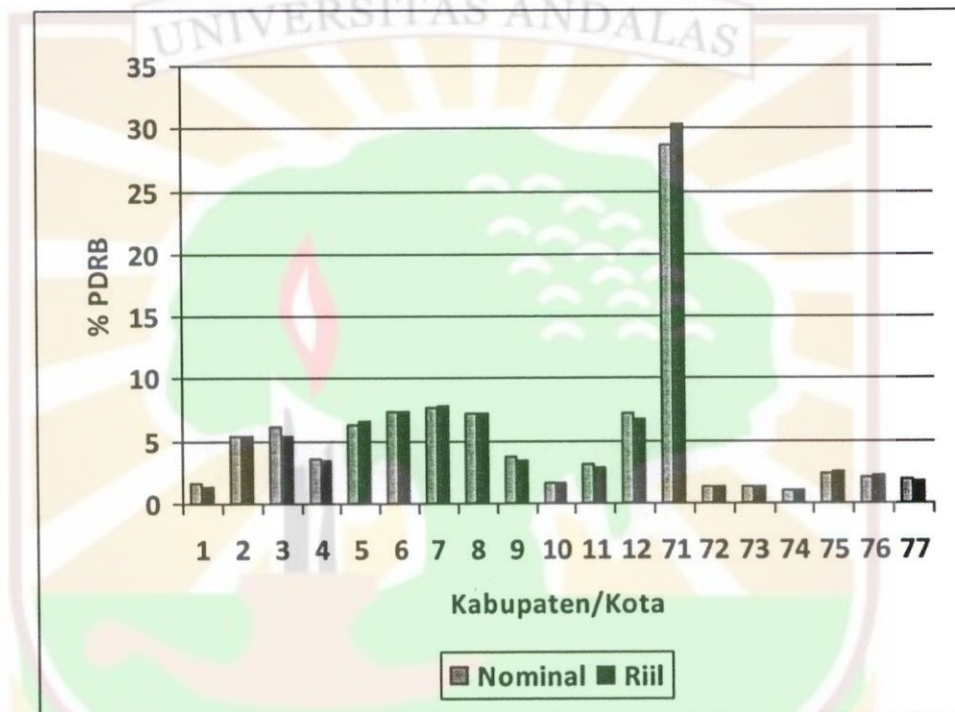


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Gambar 4.2 berikut dapat dilihat bagaimana potensiperekonomian daerah yang tercermin melalui nilai PDRB nominal dan PDRB riil dan persentasenya terhadap total secara visual. Dapat dilihat bahwa Kota Padang memberikan andil sebesar 28,67 persen dari total kumulatif nilai PDRB nominal, kemudian persentase terbesar berikutnya adalah Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman masing-masing sebesar 7,64 persen dan 7,34 persen. Daerah berikutnya yang memberikan andil cukup besar terhadap total PDRB Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Limapuluh Kota dan kabupaten Pasaman Barat masing-masing 7,26

persen dan 7,24 persen. Sedangkan persentase yang dimiliki oleh lima daerah di posisi bawah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,70 persen, Kabupaten Dharmasraya sebesar 1,60 persen, Kota Solok (1,29 persen), Kota Sawahlunto (1,28 persen) dan Kota Padang Panjang (1,12 persen).

Gambar 4.2. Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Nominal) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Riil) Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya apabila diamati dari persentase sebaran nilai PDRB riil, sumbangan Kota Padang mencapai 30,33 persen dari total kumulatif nilai PDRB riil 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam 7,83 persen, kabupaten Padang Pariaman 7,35 persen, kabupaten Limapuluh Kota 7,18 persen dan kabupaten Pasaman Barat 6,80 persen. Sedangkan persentase yang dimiliki oleh lima kabupaten/kota di posisi terendah adalah Kabupaten Solok Selatan (1,64 persen),

Kabupaten Kepulauan Mentawai (1,36 persen), Kota Solok (1,33 persen), Kota Sawahlunto (1,32 persen) dan Kota Padang Panjang (1,06 persen). Dapat dilihat bahwa dari sisi PDRB nominal maupun PDRB riil, nilai absolut dan persentasenya, lima daerah yang menempati posisi teratas yang memberikan sumbangan terhadap PDRB total provinsi Sumatera Barat sama, sedangkan pada posisi lima terbawah dapat dikatakan sama kecuali pada urutan ke 15 dan urutan ke 16.

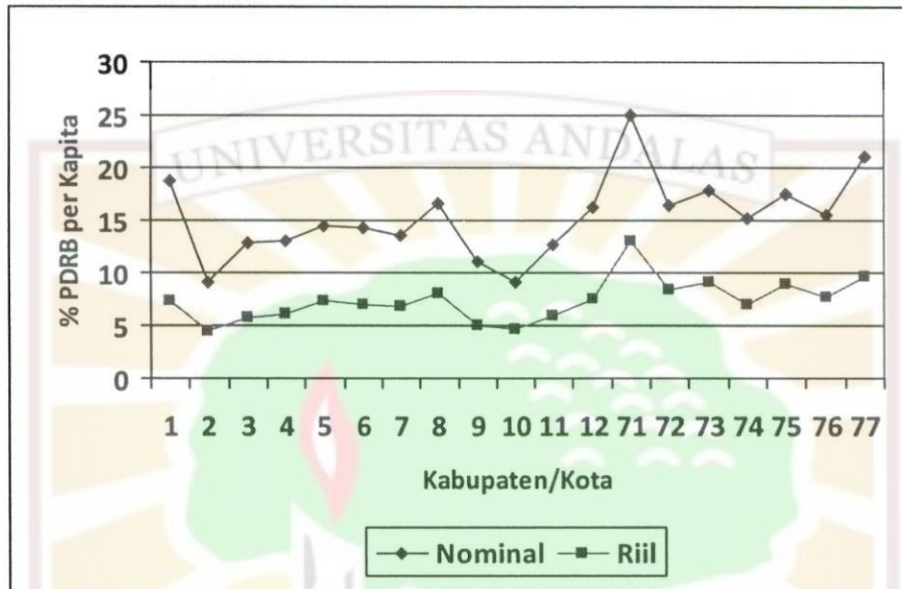
Selanjutnya jika PDRB nominal dan PDRB riil ditimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota, secara visual potensi perekonomian daerah tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3. Pada gambar tersebut nampak bahwa secara per kapita Kota Padang memiliki potensi terbesar dalam PDRB nominal yaitu sebesar 24,94 juta rupiah, kemudian potensi terbesar berikutnya dalam PDRB nominal adalah Kota Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto dan Kota Bukittinggi masing sebesar 21,04 juta rupiah, 18,78 juta rupiah, 17,85 juta rupiah dan 17,45 juta rupiah.

Berikutnya daerah yang menempati posisi tiga terbawah dalam besaran PDRB Nominal per kapita adalah Kabupaten Pasaman (11,04 juta rupiah), Kabupaten Solok Selatan (9,12 juta rupiah) dan Kabupaten Pesisir Selatan (9,10 juta rupiah).

Kemudian jika dilihat berdasarkan nilai PDRB riil per kapita tahun 2009, Kota Padang kembali menempati posisi teratas yaitu 12,96 juta rupiah, berikutnya pada posisi kedua adalah Kota Pariaman sebesar 9,69 juta rupiah, selanjutnya Kota Sawahlunto, Bukittinggi dan Kota Solok yaitu masing-masing sebesar 9,04 juta rupiah, 8,99 juta rupiah dan 8,32 juta rupiah. Sedangkan daerah yang menempati posisi tiga terbawah dalam besaran PDRB riil per kapita adalah Kabupaten Pasaman

(4,93 juta rupiah), Kabupaten Solok Selatan (4,59 juta rupiah) dan Kabupaten Pesisir Selatan (4,46 juta rupiah).

Gambar 4.3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Nominal) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Riil) Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

4.2 Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk meneliti apakah 34 variabel yang terpilih berdasarkan konsep dan definisi dan kajian teoritis, secara statistik juga valid (sahih) untuk mengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota. Untuk keperluan uji ini dipilih satu variabel sebagai wakil dari variabel baru yang dipandang tepat dalam mengukur kesejahteraan suatu wilayah dan menjadikannya sebagai validator. Validator yang dimaksud adalah persentase pengeluaran non makanan (X_{305}) yang dipilih dari dimensi ekonomi. Kemudian secara empiris validitas (kesahihan) dari 33 variabel lainnya yang dipilih sebagai komponen untuk mengukur

disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota dapat dilihat dengan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut dengan validator. Tingkat signifikansi dari setiap variabel dapat dihitung, sehingga dapat ditentukan variabel-variabel mana yang mempunyai taraf signifikansi yang cukup berarti, yang berarti bahwa keeratan hubungan variabel dengan validator adalah nyata.

Dari hasil uji validitas terhadap 33 variabel pengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota terhadap validator dengan menggunakan metode korelasi Spearman dapat dilihat pada Tabel 4.1. Ternyata dari 33 variabel terdapat lima variabel yang mempunyai koefisien korelasi yang tidak signifikan atau tidak nyata, sedangkan 28 variabel lainnya mempunyai koefisien korelasi yang signifikan atau nyata. Korelasi yang signifikan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan validator. Berdasarkan dimensinya, hasil uji validitas tersebut seperti pada uraian berikut.

Pada dimensi kesehatan dan gizi, dari tiga variabel yang digunakan sebagai pengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota, terdapat satu variabel yang signifikan pada taraf uji 10 persen, satu variabel signifikan pada taraf uji 5 persen dan satu variabel tidak signifikan. Variabel yang signifikan adalah angka harapan hidup (X_{101}) dan persentase balita kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (X_{102}).

Kemudian pada dimensi pendidikan, semua variabel pengukur signifikan, lima variabel nyata signifikan taraf uji 1 persen dan satu variabel signifikan pada taraf uji 5 persen. Variabel-variabel pada dimensi pendidikan yang secara statistik mempunyai validitas yang nyata dengan validator adalah angka partisipasi sekolah usia 7 – 12 tahun (X_{204}), sedangkan variabel yang signifikan pada taraf uji 1 persen adalah

persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf (X_{201}), rata-rata lama sekolah (X_{202}), persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas (X_{203}), angka partisipasi sekolah usia 13 – 15 tahun (X_{205}) dan angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun (X_{206}).

Tabel 4.1. Nilai Koefisien Korelasi Spearman dan Nilai Probabilita Masing-masing Variabel Terhadap Validator

No.	Dimensi/Variabel	Koefisien Korelasi	P-Value	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kesehatan dan Gizi	X_{101}	0,4158	0,0779	***
2		X_{102}	0,6421	0,0038	*
3		X_{103}	-0,1947	0,4227	Tidak signifikan
4	Pendidikan	X_{201}	0,6228	0,0053	*
5		X_{202}	0,6737	0,0021	*
6		X_{203}	0,7018	0,0011	*
7		X_{204}	0,4667	0,0456	**
8		X_{205}	0,5281	0,0217	*
9		X_{206}	0,5877	0,0094	*
10	Ekonomi	X_{301}	0,9333	0,0000	*
11		X_{302}	0,4790	0,0397	**
12		X_{303}	-0,0807	0,7425	Tidak signifikan
13		X_{304}	-0,5667	0,0128	*
14		X_{306}	0,0544	0,8259	Tidak signifikan
15		X_{401}	-0,3035	0,2060	Tidak signifikan
16	Ketenaga kerjaan	X_{402}	-0,4614	0,0484	**
17		X_{403}	-0,5211	0,0238	*
18		X_{404}	0,4316	0,0665	***
19		X_{405}	0,8597	0,0000	*
20		X_{406}	0,7614	0,0002	*
21		Sosial dan Budaya	X_{501}	0,7790	0,0001
22	X_{502}		0,8456	0,0000	*
23	X_{503}		0,7351	0,0005	*
24	Perumahan dan Lingkungan	X_{601}	0,8175	0,0000	*
25		X_{602}	0,7175	0,0008	*
26		X_{603}	0,3211	0,1800	Tidak signifikan
27		X_{604}	0,7597	0,0003	*
28		X_{605}	0,7123	0,0009	*
29		X_{606}	0,3912	0,0986	***
30		X_{607}	0,6702	0,0022	*
31	Teknologi dan Informasi	X_{701}	0,8842	0,0000	*
32		X_{702}	0,7684	0,0002	*
33		X_{703}	0,8597	0,0000	*

Catatan :

- * signifikan pada taraf uji 1,00 persen
- ** signifikan pada taraf uji 5,00 persen
- *** signifikan pada taraf uji 10,00 persen

Validator : X_{305}

Pada dimensi ekonomi, variabel pengeluaran per kapita riil disesuaikan (X_{302}) merupakan variabel yang nyata signifikan pada taraf uji 5 persen, sementara variabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (X_{301}) dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan (X_{304}) mempunyai tingkat signifikansi 1 persen. Variabel rasio 20 persen penduduk antara pengeluaran tertinggi dan pengeluaran terendah (X_{303}) dan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai (X_{306}) tidak signifikan terhadap validator. Pada dimensi ketenagakerjaan, terdapat satu variabel yang tidak signifikan yaitu variabel persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (X_{401}) dan variabel rata-rata jam kerja buruh/karyawan/pegawai seminggu lalu (X_{406}), sedangkan variabel dan persentase tingkat kesempatan kerja (X_{403}), variabel persentase pekerja di sektor formal (X_{405}) dan persentase pekerja di sektor non pertanian (X_{406}) mempunyai tingkat signifikansi pada taraf uji 1 persen. Sementara variabel persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (X_{402}) mempunyai validitas yang signifikan dengan validator pada taraf uji 5 persen dan rata-rata jam kerja buruh/karyawan seminggu yang lalu (X_{406}) mempunyai signifikansi sebesar 10 persen. Selanjutnya pada variabel-variabel yang terdapat dalam dimensi sosial dan budaya, semuanya mempunyai validitas yang signifikan dengan validator pada taraf uji 1 persen. Untuk dimensi perumahan dan lingkungan, variabel-variabel yang mempunyai validitas yang signifikan nyata pada taraf uji 1 persen adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama rumah (X_{601}), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih (X_{602}), persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri (X_{604}) dan persentase rumah tangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran (X_{605}) dan variabel persentase rumah tangga yang memiliki dinding tembok (X_{607}), sedangkan satu variabel yakni persentase rumah

tangga dengan luas lantai per kapita $> 8 \text{ m}^2$ (X_{606}) mempunyai signifikansi sebesar 10 persen dan satu variable lainnya yaitu persentase rumah tangga yang memiliki lantai rumah sebagian besar bukan dari tanah (X_{603}) mempunyai validitas yang tidak signifikan dengan validator.

Pada dimensi teknologi dan informasi, variabel persentase rumah tangga yang mempunyai telepon seluler (X_{701}), persentase rumah tangga yang mempunyai komputer (X_{702}) dan persentase rumah tangga yang mengakses internet selama sebulan yang lalu (X_{703}) semuanya mempunyai validitas yang signifikan dengan validator pada taraf uji 1 persen

4.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang sangat dipengaruhi oleh banyaknya variabel yang dicakup sebagai komponen. Selain itu masing-masing variabel juga mempunyai kontribusi terhadap reliabilitas ukuran. Makin besar atau kuat hubungan antar variabel yang menjadi komponen pengukuran, makin tinggi reliabilitas ukuran.

Pada analisis ini, variabel-variabel yang signifikan berdasarkan uji validitas, selanjutnya akan diuji dengan uji reliabilitas yang dilakukan per dimensi maupun keseluruhan dimensi. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas ukuran, jika reliabilitas ukuran yang diuji masih rendah maka dilakukan langkah untuk meningkatkan ukuran reliabilitas dengan mengeluarkan variabel yang kontribusi atau sumbangannya rendah terhadap ukuran. Langkah pengurangan variabel ini dapat dilakukan berulang kali, sampai diperoleh beberapa variabel yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memberikan kontribusi yang besar

terhadap reliabilitas ukuran. Setelah proses uji reliabilitas ini dilakukan, variabel-variabel yang lolos adalah variabel yang secara statistik layak dapat digunakan dalam mengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

4.3.1 Uji Reliabilitas Dimensi Kesehatan dan Gizi

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada dimensi kesehatan dan gizi seperti yang disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa reliabilitas indeks komposit yang dibentuk oleh dua variabel (X_{101} dan X_{102}) cukup besar ($r_{kk} = 0,8623$), hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap reliabilitas indeks. Selanjutnya jika ditelaah per variabel, baik angka harapan hidup (X_{101}) maupun persentase balita kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (X_{102}) masing-masing mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap reliabilitas indeks komposit ($r_i = r_{ij} - \sigma_{rij}$). Oleh karena itu, pada tahap I tidak ada variabel yang dikeluarkan dari proses.

Tabel 4.2 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Kesehatan dan Gizi

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel	
		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	X_{101}	0,7579	
2	X_{102}	0,7579	
	$r_{ij} - \sigma_{rij}$	0,7579	
	r_{kk}	0,8623	
	k	2	

4.3.2 Uji Reliabilitas Dimensi Pendidikan

Hasil uji reliabilitas pada dimensi pendidikan yang dibentuk oleh enam variabel dimensi pendidikan yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek

huruf (X_{201}), rata-rata lama sekolah (X_{202}), persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas (X_{203}), angka partisipasi sekolah umur 7 – 12 tahun (X_{204}), angka partisipasi sekolah umur 13 – 15 tahun (X_{205}) dan angka partisipasi sekolah umur 16 – 18 tahun (X_{206}) pada tahap I adalah sebesar 0,8902, hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama keenam variabel tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap reliabilitas indeks (Tabel 4.3).Selanjutnya jika ditelaah per variabel, keenam variabel di atas mempunyai kontribusi yang besar reliabilitas indeks komposit dimana $r_i > r_{ij} - \sigma_{rij}$ sehingga pada tahap I tidak ada variabel yang dikeluarkan dari proses pengujian dan uji reliabilitas tidak dilanjutkan ke tahap II.

Tabel 4.3 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Pendidikan

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel	
		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	X_{201}	0,5154	
2	X_{202}	0,6600	
3	X_{203}	0,6325	
4	X_{204}	0,5204	
5	X_{205}	0,5319	
6	X_{206}	0,5902	
	$r_{ij} - \sigma_{rij}$	0,4197	
	r_{kk}	0,8902	
	k	6	

4.3.3 Uji Reliabilitas Dimensi Ekonomi

Pada dimensi ekonomi, pada tabel 4.4 dapat dilihat reliabilitas indeks komposit yang dibentuk oleh empat variabel yakni rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (X_{301}), pengeluaran riil disesuaikan (X_{302}), persentase penduduk di atas garis kemiskinan (X_{304}) dan persentase pengeluaran non makanan (X_{305}) bahwa keempat

variabel tersebut secara bersamaan memberikan kontribusi yang besar pada reliabilitas indeks yaitu r_{kk} sebesar 0,8454.

Tabel 4.4 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Ekonomi

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel	
		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	X_{301}	0,7029	
2	X_{302}	0,4328	
3	X_{304}	0,5146	
4	X_{305}	0,6597	
	$r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$	0,3858	
	r_{kk}	0,8454	
	k	4	

Dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing variabel (r_i), ternyata keempat variabel tersebut mempunyai $r_i > r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$, yang berarti bahwa masing-masing variabel mempunyai kontribusi yang tidak kecil terhadap reliabilitas indeks komposit, dengan demikian tidak ada variabel yang harus dikeluarkan pada tahap kedua.

4.3.4 Uji Reliabilitas Dimensi Ketenagakerjaan

Pada dimensi ketenagakerjaan, lima variabel masing-masing persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja (X_{402}), persentase tingkat kesempatan kerja (X_{403}), rata-rata jam kerja buruh/karyawan/pekerja seminggu yang lalu (X_{404}), persentase pekerja di sektor formal (X_{405}) dan persentase pekerja di sektor pertanian (X_{406}) secara bersama-sama memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap reliabilitas indeks yaitu $r_{kk} = 0,8448$. Selain itu, dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing variabel (r_i), terhadap reliabilitas indeks komposit, ternyata kelima variabel tersebut masing-masing mempunyai $r_i > r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$, yang berarti bahwa masing-masing variabel mempunyai kontribusi yang tidak kecil terhadap reliabilitas

indeks komposit, dengan demikian tidak ada variabel yang harus dikeluarkan pada tahap kedua.

Tabel 4.5 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Ketenagakerjaan

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel	
		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	X_{402}	0,5136	
2	X_{403}	0,5912	
3	X_{404}	0,4127	
4	X_{405}	0,5474	
5	X_{406}	0,5412	
	$r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$	0,3656	
	r_{kk}	0,8448	
	k	5	

4.3.5 Uji Reliabilitas Dimensi Sosial dan Budaya

Uji reliabilitas tahap I pada dimensi sosial dan budaya, diperoleh reliabilitas indeks komposit $r_{kk} = 0,9275$, hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel pada dimensi ini mampu memberikan kontribusi yang cukup nyata terhadap reliabilitas indeks komposit (tabel 4.6).

Tabel 4.6 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Sosial dan Budaya

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel	
		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	X_{501}	0,7728	
2	X_{502}	0,8518	
3	X_{503}	0,8053	
	$r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$	0,7451	
	r_{kk}	0,9275	
	k	3	

Ketiga variabel dimaksud adalah persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton televisi seminggu yang lalu (X_{501}), persentase penduduk 10 tahun ke atas yang membaca koran/majalah seminggu yang lalu (X_{502}) dan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu yang lalu (X_{503}). Kemudian dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing variabel (r_{ij}), ternyata ketiga variabel tersebut juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap reliabilitas indeks komposit ($r_i > r_{ij} - \sigma_{rij}$).

4.3.6 Uji Reliabilitas Dimensi Perumahan dan Lingkungan

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada tahap pertama uji reliabilitas, variabel persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita $> 8 \text{ m}^2$ (X_{606}) mempunyai kontribusi yang rendah atau kecil dibandingkan dengan lima variabel lainnya yakni persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama rumah (X_{601}), persentase rumah tangga yang memiliki akses internet (X_{602}), persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri (X_{604}), persentase rumah tangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran (X_{605}) dan yang memiliki dinding tembok (X_{607}). Reliabilitas variabel X_{606} sebesar 0,5197 tidak cukup memberikan kontribusi terhadap indeks komposit karena $r_i < r_{ij} - \sigma_{rij}$ ($0,5197 < 0,5485$). Dengan demikian variabel persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita $> 8 \text{ m}^2$ (X_{606}) harus dikeluarkan dari tahapan analisis, dan proses uji reliabilitas dilanjutkan ke tahap kedua. Pada tahap uji reliabilitas tahap kedua setelah variabel X_{606} dikeluarkan, diperoleh bahwa variabel persentase rumah tangga yang memiliki dinding tembok (X_{607}) mempunyai kontribusi yang rendah dibandingkan dengan empat variabel lainnya dimana reliabilitas variabel

X_{607} sebesar 0,6978 tidak cukup untuk memberikan kontribusi terhadap indeks komposit karena $r_i < r_{ij} - \sigma_{rij}$ ($0,6978 < 0,7036$).

Tabel 4.7 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Perumahan dan Lingkungan

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel		
		I	II	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	X_{601}	0,8260	0,8851	0,9135
2	X_{602}	0,7354	0,8031	0,8626
3	X_{604}	0,7702	0,8404	0,8795
4	X_{605}	0,7765	0,8439	0,9105
5	X_{606}	0,5197	-	-
6	X_{607}	0,6677	0,6978	-
	$r_{ij} - \sigma_{rij}$	0,5485	0,7036	0,8458
	r_{kk}	0,9380	0,9563	0,9705
	k	6	5	4

Dengan demikian variabel persentase rumah tangga yang memiliki dinding tembok (X_{607}) harus dikeluarkan dari tahapan analisis, dan proses uji reliabilitas dilanjutkan ke tahap ketiga. Hasil uji reliabilitas tahap ketiga setelah variabel X_{607} dikeluarkan, ternyata semua variabel sisanya masing-masing memberikan kontribusi yang cukup besar, sehingga tidak ada lagi variabel yang harus dikeluarkan. Pengurangan variabel X_{606} dan X_{607} dari komponen indeks komposit ternyata menyebabkan reliabilitas indeks komposit meningkat dari 0,9380 ke 0,9563 dan menjadi 0,9705, sementara untuk setiap variabel masing-masing juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap reliabilitas indeks komposit. Dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing variabel (r_i), ternyata keempat variabel tersebut mempunyai $r_i > r_{ij} - \sigma_{rij}$, yang berarti bahwa masing-masing variabel mempunyai kontribusi yang tidak kecil terhadap reliabilitas indeks komposit, dengan demikian pemilihan variabel tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

4.3.7 Uji Reliabilitas Dimensi Teknologi dan Informasi

Reliabilitas indeks komposit yang dibentuk oleh tiga variabel pada dimensi teknologi dan informasi hasil hitungan Cronbach's Alpha diperoleh 0,9557, yang berarti secara bersama-sama kontribusi dari ketiga variabel tersebut yaitu persentase rumah tangga yang mempunyai telepon seluler (X_{701}), persentase rumah tangga yang mempunyai komputer (X_{702}) dan persentase rumah tangga yang mengakses internet sebulan yang lalu (X_{703}) cukup besar terhadap realibilitas indeks (lihat tabel 4.8).

Selanjutnya, jika dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing variabel (r_i), ternyata ketiga variabel tersebut mempunyai kontribusi yang cukup besar atau $r_i > r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$, yang berarti bahwa masing-masing variabel mempunyai kontribusi yang tidak kecil terhadap reliabilitas indeks komposit, dengan demikian tidak ada variabel yang harus dikeluarkan pada tahap kedua.

Tabel 4.8 Reliabilitas Variabel pada Dimensi Teknologi dan Informasi

No	Variabel	Reliabilitas Variabel (r_i) pada setiap tahapan pemilihan variabel	
		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	X_{701}	0,8640	
2	X_{702}	0,8790	
3	X_{703}	0,8904	
	$r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$	0,8562	
	r_{kk}	0,9557	
	k	3	

4.3.8 Uji Reliabilitas pada Keseluruhan Dimensi

Dari hasil uji reliabilitas per dimensi, terdapat dua variabel yang ada dalam dimensi perumahan dan lingkungan yaitu variabel persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita $> 8 \text{ m}^2$ (x_{606}) dan variabel persentase rumah tangga yang memiliki dinding tembok (x_{607}) mempunyai kontribusi yang rendah terhadap

reliabilitas indeks komposit, sehingga kedua variabel tersebut harus dikeluarkan. Pada uji reliabilitas yang dilakukan secara menyeluruh terhadap semua dimensi diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Reliabilitas Variabel pada Keseluruhan Dimensi

No.	Variabel	Tahapan Pemilihan Variabel					
		I	II	III	IV	V	VI
1	X ₁₀₁	0,5893	0,6192	0,6361	0,6417	-	-
2	X ₁₀₂	0,7101	0,7446	0,7465	0,7755	0,7792	0,7854
3	X ₂₀₁	0,5883	0,6092	0,6272	0,6450	-	-
4	X ₂₀₂	0,6969	0,7253	0,7417	0,7525	0,7579	0,7538
5	X ₂₀₃	0,6934	0,7291	0,7518	0,7658	0,7844	0,7840
6	X ₂₀₄	0,5396	0,5458	-	-	-	-
7	X ₂₀₅	0,5439	0,5679	0,5575	-	-	-
8	X ₂₀₆	0,6183	0,6495	0,6514	0,6468	-	-
9	X ₃₀₁	0,7352	0,7718	0,7949	0,8057	0,8392	0,8500
10	X ₃₀₂	0,4592	-	-	-	-	-
11	X ₃₀₄	0,6209	0,6511	0,6566	0,6640	0,6798	-
12	X ₃₀₅	0,6743	0,7026	0,7225	0,7322	0,7657	0,7782
13	X ₄₀₂	0,4306	-	-	-	-	-
14	X ₄₀₃	0,5305	0,5276	-	-	-	-
15	X ₄₀₄	0,3732	-	-	-	-	-
16	X ₄₀₅	0,7043	0,7349	0,7567	0,7683	0,7963	0,8060
17	X ₄₀₆	0,7495	0,7806	0,7987	0,8072	0,8227	0,8305
18	X ₅₀₁	0,6967	0,7273	0,7482	0,7590	0,7908	0,7963
19	X ₅₀₂	0,7273	0,7622	0,7830	0,7967	0,8238	0,8375
20	X ₅₀₃	0,6715	0,7098	0,7261	0,7259	0,7483	0,7648
21	X ₆₀₁	0,7532	0,7966	0,8231	0,8340	0,8626	0,8695
22	X ₆₀₂	0,7068	0,7429	0,7644	0,7749	0,7910	0,8033
23	X ₆₀₄	0,7332	0,7725	0,7940	0,8028	0,8255	0,8271
24	X ₆₀₅	0,7219	0,7599	0,7879	0,7971	0,8209	0,8291
25	X ₇₀₁	0,7262	0,7706	0,8048	0,8202	0,8450	0,8589
26	X ₇₀₂	0,7109	0,7564	0,7735	0,7813	0,8043	0,8071
27	X ₇₀₃	0,7207	0,7579	0,7764	0,7855	0,8070	0,8150
	$r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$	0,4704	0,5675	0,6189	0,6505	0,7142	0,7422
	r_{kk}	0,9801	0,9829	0,9841	0,9849	0,9860	0,9865
	k	27	24	22	21	18	17

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (X₃₀₂), persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja (X₄₀₂) dan rata-rata jam kerja buruh/karyawan seminggu yang lalu (X₄₀₄) masing-masing berkontribusi yang rendah terhadap reliabilitas indeks komposit ($r_i < r_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$),

sehingga ketiga variabel tersebut dikeluarkan dari tahapan analisis. Pada tahap kedua uji reliabilitas keseluruhan variabel yang sekarang berjumlah 24 variabel, ternyata ditemukan kembali dua variabel yang mempunyai kontribusi rendah terhadap reliabilitas indeks komposit.

Kedua variabel tersebut adalah angka partisipasi sekolah umur 7-12 tahun (X_{204}) dan persentase tingkat kesempatan kerja (X_{403}). Total variabel sekarang berjumlah 22 variabel karena dua variabel di atas harus dikeluarkan, oleh karena keseluruhan variabel belum mempunyai kontribusi yang cukup atau $r_i > r_{ij} - \sigma_{rij}$ maka kembali dilakukan uji reliabilitas keseluruhan variabel tahap ketiga.

Pada tahap ketiga uji reliabilitas ini, ditemukan kembali satu variabel yaitu angka partisipasi sekolah umur 13-15 tahun yang memiliki kontribusi yang rendah terhadap reliabilitas indeks komposit, sehingga variabel tersebut kembali dikeluarkan. Jumlah variabel secara keseluruhan sekarang berjumlah 21 variabel. Uji reliabilitas kembali dilakukan untuk tahap keempat yang hasilnya dapat dilihat yaitu terdapat tiga variabel lagi yang harus dikeluarkan dari tahapan ini karena mempunyai kontribusi yang rendah terhadap reliabilitas indeks komposit, variabel dimaksud adalah angka harapan hidup (X_{101}), angka melek huruf (X_{201}) dan variabel angka partisipasi sekolah umur 16-18 tahun (X_{206}). Uji reliabilitas kembali dilakukan untuk memastikan bahwa semua variabel tersisa mempunyai kontribusi yang tinggi atau $r_i > r_{ij} - \sigma_{rij}$, pada tahap kelima nampak bahwa ada satu variabel lagi yang mempunyai kontribusi rendah terhadap reliabilitas indeks komposit yakni variabel persentase penduduk di atas garis kemiskinan (X_{304}) sehingga variabel ini harus dikeluarkan dalam tahapan berikutnya. Uji reliabilitas tahap ke enam kembali dilakukan dan hasilnya semua variabel sudah berkontribusi tinggi terhadap reliabilitas indeks komposit. Dengan demikian tidak ada

lagi variabel yang harus dikeluarkan untuk analisis lebih lanjut. Pengurangan beberapa variabel mulai dari tahap pertama sampai tahap keenam ternyata menyebabkan reliabilitas indeks komposit meningkat yakni mulai dari 0,9801 menjadi 0,9865.

Pemilihan variabel yang dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas telah berhasil mengurangi banyaknya variabel yang akan digunakan dalam mengukur indeks disparitas yaitu dari 34 variabel menjadi 17 variabel termasuk variabel validator yang secara statistik layak digunakan untuk mengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota.

4.4 Analisis Deskripsi

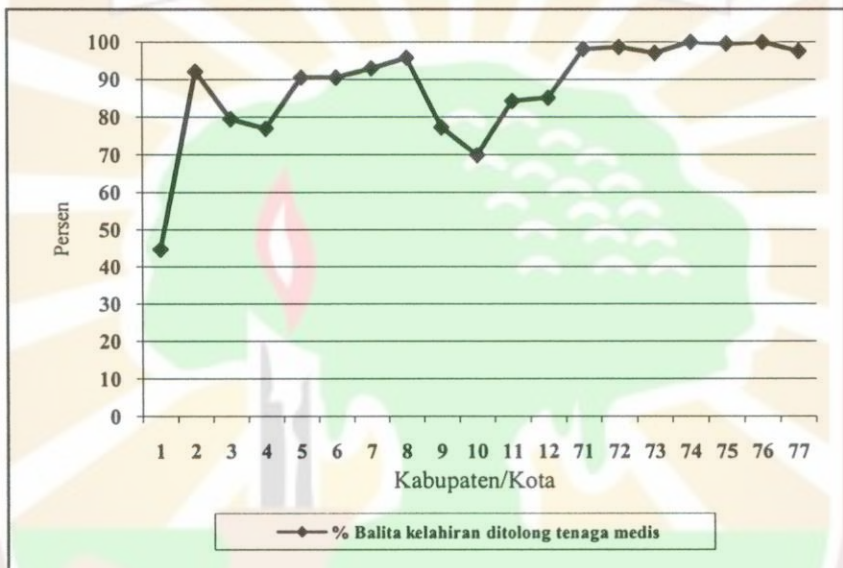
Pada bagian ini dilakukan analisis secara umum yang ditujukan dalam rangka memberikan gambaran tentang perbedaan antar kabupaten/kota berdasarkan variabel-variabel terpilih dalam setiap dimensi.

4.4.1 Deskripsi Dimensi Kesehatan dan Gizi

Pada dimensi kesehatan dan gizi, terdapat satu variabel yang terpilih yang akan digunakan untuk menjelaskan disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat yaitu persentase balita kelahiran ditolong tenaga medis (Tabel A.2 Lampiran 4). Persentase balita kelahiran terakhir ditolong tenaga medis, KotaPadang Panjang menempati posisi terbaik dimana 100,00 persen balita kelahiran terakhir ditolong oleh tenaga medis. Kemudian posisi terbaik kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Payakumbuh (99,86 persen) dan Kota Bukittinggi (99,48 persen). Dalam variabel ini Kabupaten Kepulauan Sijunjung, Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada posisi tiga terakhir dengan persentase masing-masing adalah 76,94 persen, 69,92 persen dan 44,66 persen. Dapat disimpulkan ternyata pengetahuan tentang cara persalinan anak dengan tenaga medis lebih dapat diterima pada penduduk di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah kabupaten terutama pada kabupaten baru.

Gambar 4.4. Variabel Dimensi Kesehatan dan Gizi Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009



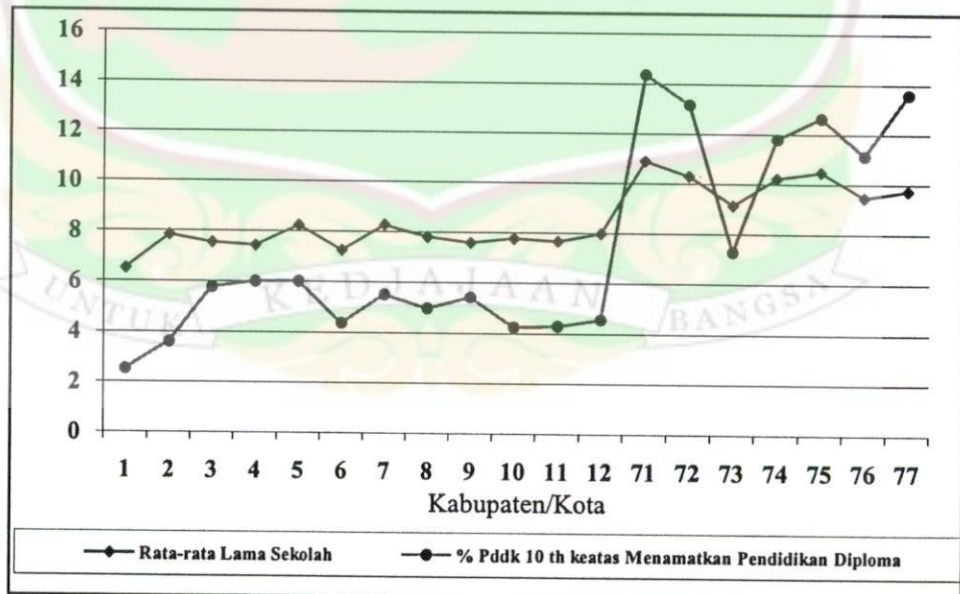
Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

4.4.2. Deskripsi Dimensi Pendidikan

Variabel pendidikan yang akan dipakai dalam analisis disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat yang telah melewati seleksi uji validitas dan reliabilitas adalah variabel rata-rata lama sekolah, dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas (Tabel A.3 lampiran 5 dan 6).

Pada Gambar 4.5, tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Kota Padang secara umum mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan dengan penduduk daerah lainnya, yaitu rata-rata mencapai 10,89 tahun. Kemudian posisi kedua ditempati oleh kota Bukittinggi dan Kota Solok dengan rata-rata lama sekolah mencapai 10,47 tahun dan 10,29 tahun. Sedangkan tiga daerah yang menempati urutan paling bawah dalam rata-rata lama sekolah adalah Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 7,43 tahun, 7,25 tahun dan 6,51 tahun. Pada Gambar 4.5, juga dapat dilihat persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas, ternyata kota Padang juga menempati posisi paling tinggi yakni 14,36 persen, berikutnya adalah Kota Pariaman dengan persentase 13,60 persen dan Kota Solok dengan 13,17 persen. Sementara untuk tiga daerah yang berada pada posisi terbawah adalah Kabupaten Solok (4,25 persen), Kabupaten Pesisir Selatan (3,60 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (2,52 persen).

Gambar 4.5. Variabel Dimensi Pendidikan Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009

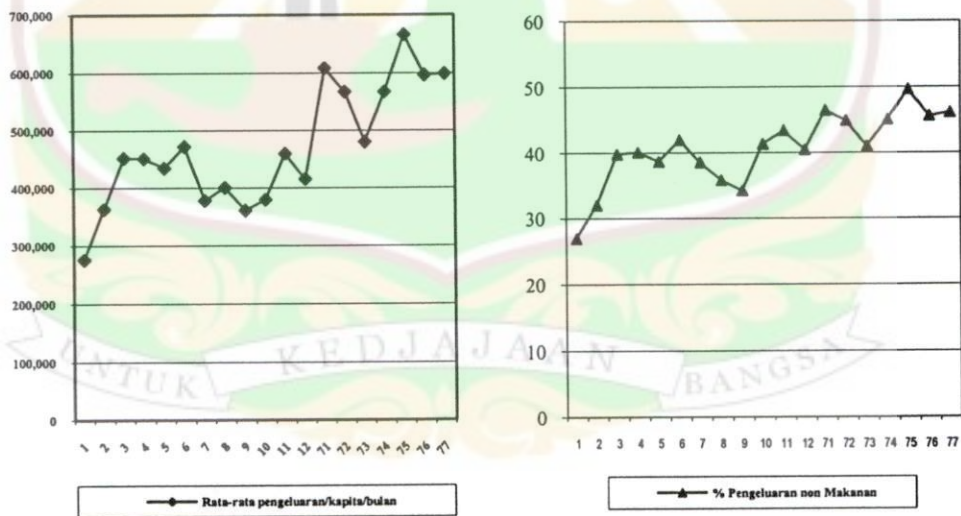


Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

4.4.3. Deskripsi Dimensi Ekonomi

Variabel dalam dimensi ekonomi yang akan menjadi ukuran dalam analisis disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terpilih mencakup dua variabel yaitu rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dan persentase pengeluaran untuk non makanan. Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa penduduk Kota Bukittinggi menempati tempat paling atas dibandingkan dengan delapan belas daerah lainnya, yaitu dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan sebesar Rp 665.000, diikuti oleh Kota Padang dengan Rp 608.000/kapita/ bulan dan Kota Pariaman dengan Rp 598.000/kapita/bulan. Sedangkan penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan terendah berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp 363.000, kemudian penduduk Kabupaten Pasaman dengan Rp 360.000 dan kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Rp 276.000,-.

Gambar 4.6. Variabel Dimensi Ekonomi Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada gambar 4.6 juga dapat dilihat bagaimana besarnya persentase pengeluaran untuk non makanan pada setiap daerah, dimana pengeluaran tertinggi

untuk non makanan berada di Kota Bukittinggi dengan 49,68 persen, berikutnya adalah Kota Padang dengan 46,46 persen dan Kota Pariaman dengan 46,15 persen. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan hanya 26,95 persen, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan dengan 32,02 persen dan Kabupaten Pasaman dengan 34,20 persen.

4.4.4. Deskripsi Dimensi Ketenagakerjaan

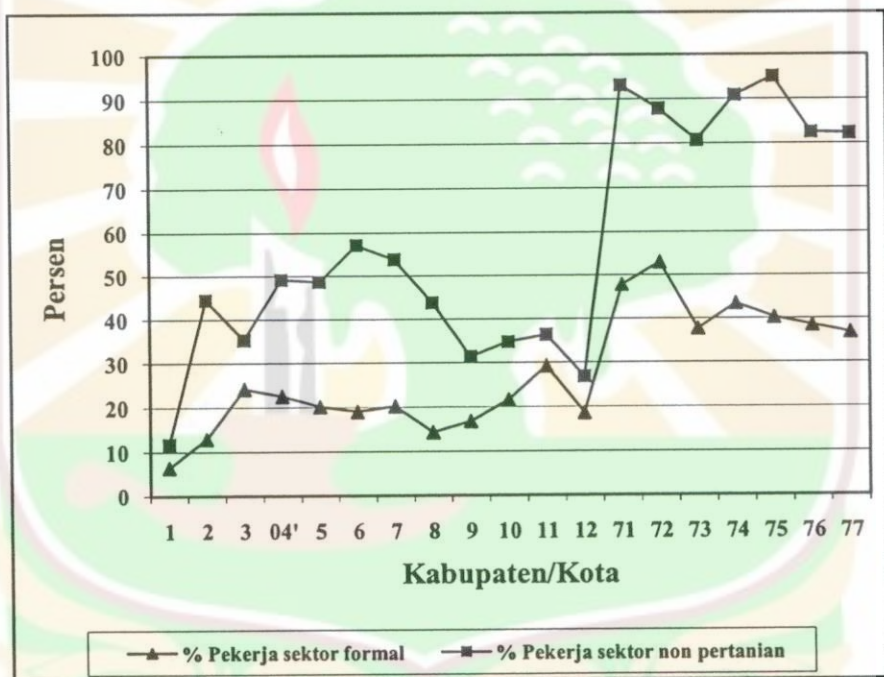
Dua variabel terpilih dari dimensi ketenagakerjaan yang akan digunakan untuk analisis disparitas tingkat kesejahteraan terdiri dari persentase pekerja di sektor formal dan persentase pekerja di sektor non pertanian. Konsep bekerja yang dimaksud dalam analisis ini adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus dalam waktu seminggu yang lalu.

Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa persentase pekerja pada sektor formal terbanyak berada di Kota Solok sebanyak 52,96 persen, selanjutnya di Kota Padang jumlah pekerja sektor formal sebanyak 47,85 persen dan di Kota Padang Panjang sebanyak 43,43 persen. Sedangkan persentase pekerja sektor formal yang paling rendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 6,42 persen, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 12,92 persen dan Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 14,29 persen.

Kota Bukittinggi secara persentase menempati peringkat tertinggi dalam banyaknya pekerja di sektor non pertanian dengan 95,07 persen yang berarti pula bahwa terdapat hanya 4,93 persen penduduk kota ini berusaha di sektor pertanian, sementara kota Padang menempati peringkat kedua dengan 93,11 persen

penduduknya sebagai pekerja di sektor non pertanian dan Kota Padang Panjang menempati peringkat ketiga dengan 90,85 persen. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 11,70 persen yang berarti hampir sebagian besar (88,30 persen) penduduk Kepulauan Mentawai bekerja pada sektor pertanian. Urutan terbawah berikutnya adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan 26,87 persen dan Kabupaten Pasaman dengan 31,45 persen.

Gambar 4.7. Variabel Dimensi Ketenagakerjaan Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

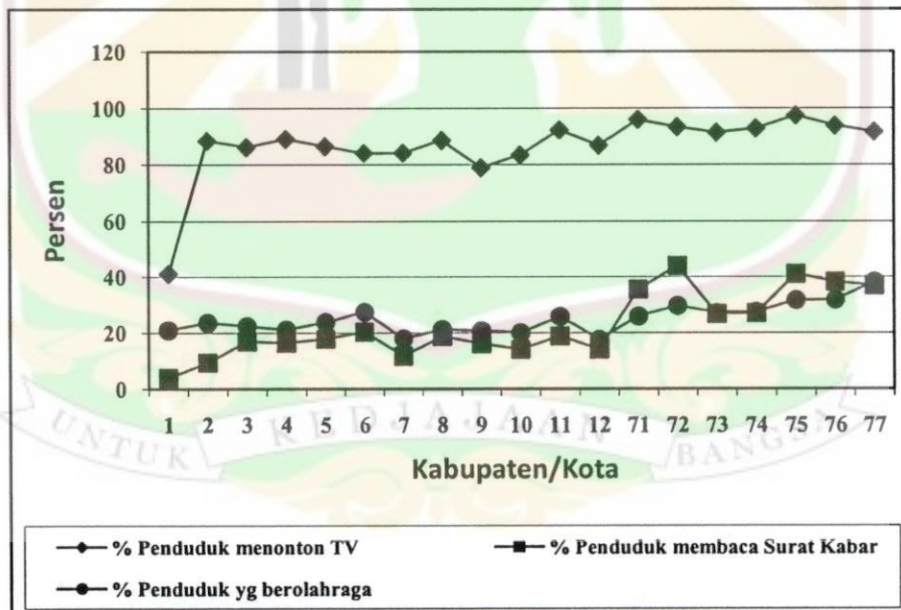
4.4.5. Deskripsi Dimensi Sosial dan Budaya

Pada dimensi sosial dan budaya ini terpilih tiga variabel yang akan digunakan dalam analisis disparitas lebih dalam, ketiga variabel tersebut adalah berkaitan dengan kegiatan sosial budaya dari penduduk berusia 10 tahun ke atas secara perorangan pada

seminggu yang lalu akses terhadap media seperti menonton televisi, membaca surat kabar atau majalah serta partisipasi dalam kegiatan olah raga.

Penduduk Kota Bukittinggi secara umum mempunyai kebiasaan menonton televisi seminggu yang lalu lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton televisi seminggu yang lalu mencapai 97,43 persen. Dua daerah lainnya yang penduduk usia 10 tahun ke atas paling banyak menonton televisi adalah Kota Padang (95,99 persen) dan Kota Payakumbuh (93,86 persen). Sedangkan tiga daerah yang penduduk usia 10 tahun ke atas paling sedikit menonton televisi adalah Kabupaten Solok Selatan (83,47 persen), Kabupaten Pasaman (78,95 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (41,14 persen).

Gambar 4.8. Variabel Dimensi Sosial dan Budaya Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

Minat penduduk Kota Solok dalam membaca surat kabar atau majalah paling tinggi dibandingkan daerah kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Barat, data tahun 2009 menunjukkan 43,94 persen dari penduduk Kota Solok yang berusia 10 tahun ke atas mempunyai kegiatan membaca surat kabar atau majalah seminggu yang lalu. Selain Kota Solok, dua daerah lainnya yang penduduk usia 10 tahun ke atas membaca surat kabar atau majalah dengan persentase yang cukup baik adalah Kota Bukittinggi dengan 41,02 persen dan Kota Payakumbuh dengan 38,17 persen. Sedangkan tiga daerah dengan persentase terendah adalah Kabupaten Agam (11,71 persen), Kabupaten Pesisir Selatan (9,37 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (3,96 persen).

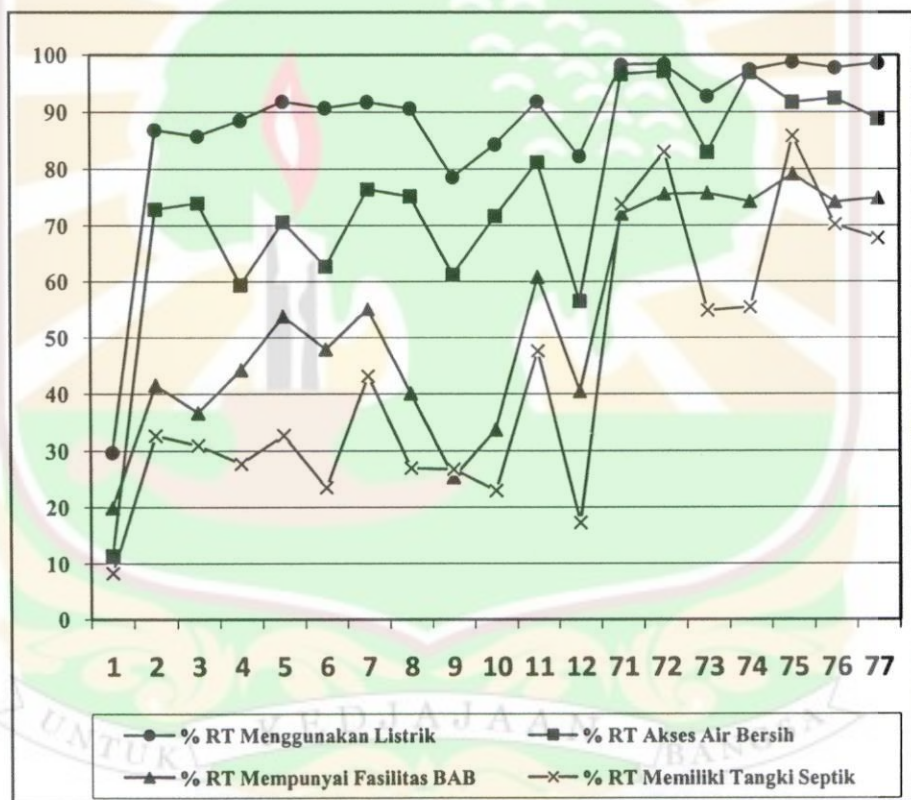
Berikutnya, jika diamati dari persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga seminggu yang lalu, Kota Pariaman menempati posisi paling tinggi yaitu 38,23 persen. Kemudian berturut-turut adalah Kota Payakumbuh (31,84 persen) dan Kota Bukittinggi (31,73 persen). Kabupaten Solok Selatan, Agam dan Pasaman Barat mempunyai persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang rendah dalam melakukan kegiatan olahraga yaitu masing-masing 20,02 persen, 17,96 persen dan 17,71 persen.

4.4.6. Deskripsi Dimensi Perumahan dan Lingkungan

Sebanyak 98,75 persen rumah tangga di Kota Bukittinggi telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah, ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan 18 daerah kabupaten/kota lain di Sumatera Barat (Tabel A.7 Lampiran 11 dan 12). Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai penerangan rumah tertinggi berikutnya adalah Kota Solok dan Kota Padang yaitu

sebesar 98,42 persen dan 98,31 persen. Sedangkan pada tiga posisi terbawah dalam rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah adalah Kabupaten Pasaman Barat (82,27 persen), Kabupaten Pasaman (78,60 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (29,68 persen). Pada variabel persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih, Kota Solok menempati urutan teratas dengan 97,11 persen, Kota Padang Panjang dan Kota Padang berada pada urutan berikutnya dengan 96,89 persen dan 96,59 persen.

Gambar 4.9. Variabel Dimensi Perumahan dan Lingkungan Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menduduki peringkat terbawah dalam persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dengan hanya

sekitar 11,36 persen diikuti pada urutan di atasnya adalah Kabupaten Pasaman Barat (56,49 persen) dan Kabupaten Sijunjung (59,35 persen). Variabel berikutnya yang terpilih pada dimensi perumahan dan lingkungan dalam analisis lebih dalam mengenai disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah persentase rumah tangga memiliki fasilitas buang air besar sendiri dan persentase rumah tangga memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran. Kebanyakan rumah tangga di Kota Bukittinggi dilihat dari kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri dinilai lebih baik dibanding dengan daerah lainnya, hal ini dapat dilihat dari 79,18 persen rumah tangga di kota ini telah memiliki fasilitas tersebut. Hal yang hampir sama juga ditemui di Kota Sawahlunto dan Kota Solok dimana persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri cukup banyak yakni masing-masing sebesar 75,78 persen dan 75,63 persen. Namun demikian di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok Selatan ternyata persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri ini masih sangat rendah, hal ini dapat ditunjukkan dari besarnya persentase kepemilikan tersebut yaitu hanya 19,92 persen, 25,34 persen dan 33,73 persen.

Dilihat dari kepemilikan tangki septik, data tahun 2009 menunjukkan bahwa rumah tangga yang sudah mempunyai tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran belum terlalu banyak. Pada variabel ini, Kota Bukittinggi tetap merupakan daerah yang paling banyak rumah tangganya mempunyai tangki septik dimana 85,84 persen dari total rumah tangga di kota ini sudah memiliki tangki septik. Selanjutnya 83,01 persen rumah tangga di Kota Solok dan 73,81 persen rumah tangga di Kota Padang sudah memiliki fasilitas tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran. Akan tetapi di Kabupaten Solok Selatan hanya 22,92 persen rumah tangga

yang memiliki fasilitas ini, Kabupaten Pasaman Barat dengan 17,24 persen dan yang paling sedikit memiliki tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 8,28 persen rumah tangga saja.

4.4.7. Deskripsi Dimensi Teknologi dan Informasi

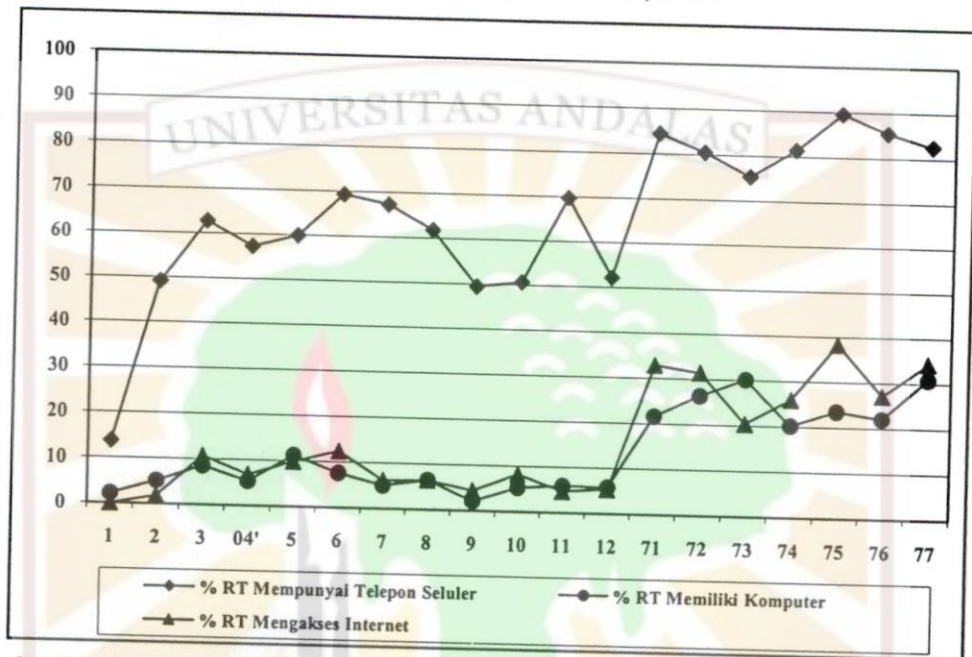
Ditinjau dari dimensi teknologi dan informasi (Tabel A.8 Lampiran 13), diketahui bahwa persentase rumah tangga Kota Bukittinggi yang mempunyai telepon seluler mencapai 89,60 persen, tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Persentase tertinggi berikutnya dicapai oleh Kota Payakumbuh sebesar 85,50 persen dan Kota Padang dengan persentase sebesar 84,46 persen. Sedangkan tiga daerah dengan persentase kepemilikan telepon seluler terendah adalah Kabupaten Solok Selatan dengan 50,63 persen, Kabupaten Pasaman dengan 49,45 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 13,75 persen.

Kota Pariaman menempati urutan pertama dalam rumah tangga yang memiliki komputer (desktop, laptop, notebook), hal ini terlihat bahwa sekitar 30,80 persen rumah tangga di Pariaman ini telah memiliki komputer. Selain itu Sawahlunto dan Kota Solok juga memiliki persentase rumah tangga dengan kepemilikan komputer yang cukup baik, yaitu 30,12 persen dan 26,35 persen. Selanjutnya daerah yang persentase rumah tangganya dinilai paling rendah dalam memiliki komputer adalah Kabupaten Pesisir Selatan (5,11 persen), Kepulauan Mentawai (2,19 persen) dan Kabupaten Pasaman (2,13 persen).

Ditinjau dari persentase rumah tangga yang mengakses internet selama sebulan yang lalu, posisi terbaik dimiliki oleh Kota Bukittinggi dengan persentase sebesar 38,36 persen, diikuti oleh Kota Pariaman dengan 34,32 persen dan Kota

Padang sebesar 32,94 persen. Sementara itu tiga posisi terakhir berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Pasaman dengan 4,48 persen, Kabupaten Pesisir Selatan dengan 1,73 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 0,00 persen.

Gambar 4.10. Variabel Dimensi Teknologi dan Informasi Terpilih Menurut Kabupaten/Kota, 2009



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat

4.5 Analisis Indeks Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota

Penghitungan Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan metode taksonomik menghasilkan dua komponen indeks disparitas yaitu : (1) Pola Pembangunan (*Pattern of Development*) dan (2) Ukuran Pembangunan (*Measure of Development*). Kedua ukuran ini saling berkaitan dalam menentukan besaran indeks tingkat kesejahteraan suatu kabupaten/kota. Pola pembangunan digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota model, dimana semakin tinggi nilai pola pembangunan yang dimiliki suatu kabupaten/kota mengindikasikan bahwa berbagai

karakteristik yang dimiliki oleh kabupaten/kota tersebut dikatakan semakin jauh dari kabupaten/kota model (nilai pola pembangunan kabupaten/kota model sama dengan nol). Sedangkan ukuran pembangunan digunakan untuk menentukan peringkat indeks tingkat kesejahteraan suatu kabupaten/kota yang diteliti, jika nilai dari ukuran pembangunan semakin mendekati satu, maka peringkat indeks disparitas kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota model (nilai ukuran pembangunan kabupaten/kota model sama dengan nol) atau dengan kata lain kabupaten/kota ini semakin tidak berkembang.

Kabupaten/kota yang akan dijadikan acuan adalah kabupaten/kota yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Kota Padang dipilih mengingat disamping sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan juga merupakan daerah yang sangat tinggi potensi ekonominya, dapat dilihat dari besaran PDRB nominal, PDRB riil, PDRB nominal per kapita dan PDRB riil per kapita. Disamping itu Kota Padang juga menempati peringkat lebih baik dalam berbagai dimensi lainnya yang diukur dalam mengukur disparitas tingkat kesejahteraan ini.

Bagian ini membahas peringkat Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota baik secara terpisah maupun secara menyeluruh. Secara terpisah penghitungan disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota dibedakan menjadi 7 dimensi yaitu kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, perumahan dan lingkungan serta teknologi dan informasi. Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota baik secara terpisah maupun secara menyeluruh dihitung berdasarkan variabel-variabel didalam semua dimensi yang telah terpilih melalui uji validitas dan reliabilitas. Selain itu pada bagian ini juga dibahas

keterkaitan antara peringkat Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota dengan peringkat indeks disparitas PDRB. Indeks disparitas PDRB dihitung dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan (PDRB riil per kapita) tahun 2009. Dalam hal ini indeks disparitas PDRB diasumsikan sebagai indikator penyebab atau indikator input yang menyebabkan di daerah atau wilayah tertentu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah atau wilayah lain. Peringkat Indeks Disparitas Kesejahteraan dengan indeks disparitas PDRB seharusnya sama dan searah, apabila potensi perekonomian daerah diimplementasikan secara tepat dan berdaya guna ke dalam berbagai bidang kehidupan penduduk. Secara visual gambar dari kedua jenis peringkat disparitas tersebut seharusnya berhimpitan satu sama lain, artinya potensi perekonomian daerah yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat atau penduduknya. Dengan demikian analisis secara visual akan diperoleh gambaran secara umum tentang seberapa jauh ketimpangan hasil-hasil pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan masyarakat dibandingkan dengan potensi perekonomian daerah yang dimilikinya. Peringkat indeks disparitas PDRB tiap kabupaten/kota ditampilkan pada Tabel lampiran 17.

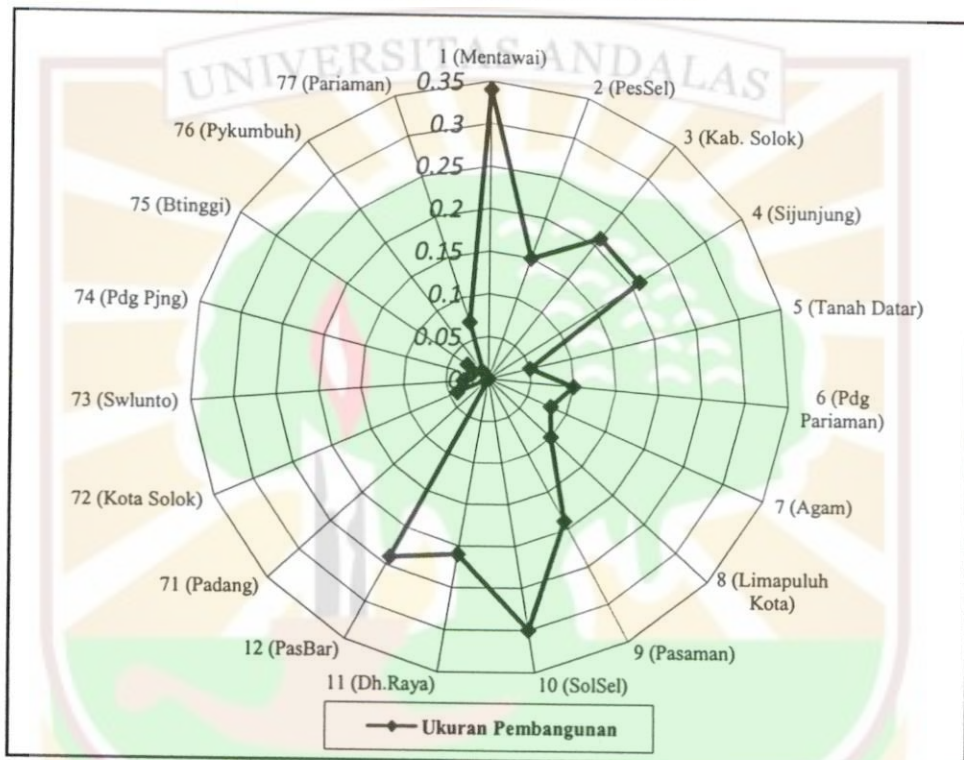
4.5.1 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Kesehatan dan Gizi

Keberhasilan tingkat kesejahteraan yang lebih memadai salah satunya adalah tercermin dari pencapaian di bidang kesehatan dan gizi. Secara umum diakui bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan, maka semakin baik derajat kesehatan penduduk.

Pada hasil uji sebelumnya sudah diperoleh ukuran yang valid, bahwa pencapaian tingkat kesejahteraan bidang kesehatan dan gizi dapat diukur melalui

variabel persentase balita kelahiran ditolong oleh tenaga medis, dengan tingkat reliabilitas sebesar 86 persen. Dari hasil perhitungan dengan metode taksonomik diperoleh ukuran pembangunan dan peringkat Indeks Disparitas Kesejahteraan seperti pada Gambar 4.11 berikut dan Tabel pada lampiran 15.

Gambar 4.11. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Kesehatan dan Gizi



Nilai ukuran pembangunan secara teori berkisar antara 0,00 dan 1,00 seperti terlihat pada gambar 4.11 yang menampilkan ukuran pembangunan dan peringkat Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota pada dimensi kesehatan dan gizi. Semakin tinggi rentang nilai ukuran pembangunan, menunjukkan tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada pembangunan kesehatan dan gizi tampak bahwa nilai ukuran pembangunan berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,35. Ukuran pembangunan bernilai 0,00 adalah ukuran pembangunan kota Padang sebagai

daerah acuan. Semakin jauh nilai ukuran pembangunan suatu kabupaten/kota dari nilai ukuran pembangunan kota Padang, menunjukkan keteringgalan kabupaten/kota tersebut dari kota Padang.

Sebaran kabupaten/kota menurut ukuran pembangunan kesehatan dan gizi terbagi ke dalam tujuh radius. Dalam radius 1 terdiri dari Kota Padang, Kota Solok, Pariaman, Sawahlunto dan Bukittinggi. Lima daerah ini merupakan daerah dengan pembangunan kesehatan dan gizi terbaik. Sedangkan pada radius ke tujuh terdiri dari daerah dengan nilai ukuran pembangunan kesehatan dan gizi terbesar atau dapat diartikan bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang pembangunan kesehatannya terburuk, yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Jika diamati secara langsung dari peringkat Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota baik dengan peringkat terbaik dan terburuk, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik Dan Terburuk di Bidang Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota	% Balita Kelahiran Terakhir Ditolong Tenaga Medis	Peringkat IDK
(1)	(3)	(4)
Padang	98,07	1
Kota Solok	98,58	2
Pariaman	97,49	3
Sawahlunto	97,03	4
Bukittinggi	99,48	5
.	.	.
Solok	79,41	15
Pasaman	77,24	16
Sijunjung	76,94	17
Solok Selatan	69,92	18
Kepulauan Mentawai	44,66	19

Pada tabel tersebut disajikan data input penyusun Indeks Disparitas Kesejahteraan antar kabupaten/kota dimensi kesehatan dan gizi yaitu persentase balita kelahiran ditolong dengan tenaga medis. Melalui data input ini, tiap kabupaten/kota dapat mengevaluasi hal-hal yang menghambat pembangunan kesehatan sekaligus memasang target bagi pembangunan kesehatan di masa yang akan datang.

Tabel 4.10 menyajikan lima daerah dengan pencapaian terbaik dan lima daerah dengan pencapaian terburuk dalam pembangunan kesehatan yaitu Kota Padang, Kota Solok, Pariaman, Sawahlunto dan Bukittinggi. Terlihat dalam hal persentase balita kelahiran terakhir ditolong oleh tenaga medis, kota Bukittinggi paling unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Upaya kabupaten/kota lain untuk mengejar ketertinggalannya dari lima kota terbaik dapat ditempuh melalui peningkatan ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis, perbaikan akses menuju sarana medis, edukasi kesehatan dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya dalam perbaikan kesejahteraan penduduk.

Lima daerah yang paling tertinggal dalam pembangunan kesehatan secara berturut-turut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman dan Kabupaten Solok. Kelima daerah ini harus berjuang keras mengejar ketertinggalan dalam hal kemampuan penduduk dalam penanganan persalinan menggunakan tenaga medis. Sebagai contoh kabupaten Kepulauan Mentawai dengan peringkat IDK kesehatan paling buruk, mempunyai tantangan pembangunan kesehatan dan gizi yang sangat besar. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tantangan yang sangat berat karena dalam hal ini mayoritas persalinan belum ditolong oleh tenaga medis. Ketertinggalan dalam penanganan kelahiran balita terakhir ditolong oleh tenaga medis lebih dari setengah penduduknya dibandingkan dengan lima daerah

yang memiliki persentase kelahiran balita terakhir yang ditolong oleh tenaga medis harus ditempuh dengan usaha yang membutuhkan dukungan dana, program dan partisipasi masyarakat yang luar biasa besar dan mungkin tidak akan dapat dicapai dengan cara yang instan, melainkan dengan usaha yang konsisten dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dimana idealnya semua persalinan ditolong oleh tenaga medis untuk mengurangi resiko terjadinya kematian bayi dan ibu pada proses persalinan.

4.5.2 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Pendidikan

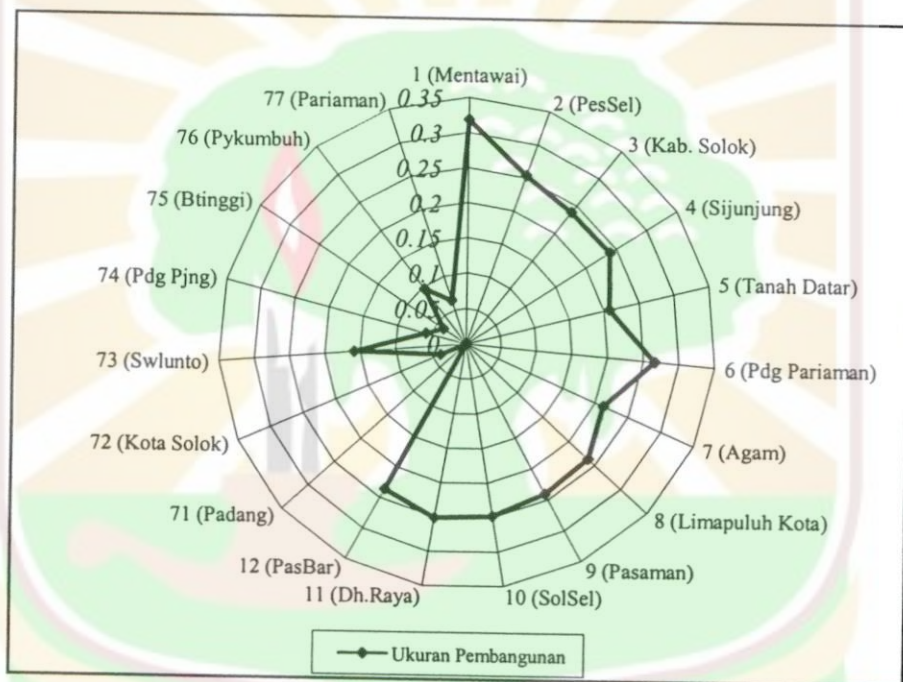
Pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling terkait, pendidikan akan mempengaruhi kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan wawasan. Demikian juga adanya kesejahteraan akan memperlancar seseorang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Penghitungan IDK bidang pendidikan dimaksudkan untuk memetakan sejauhmana kesenjangan penduduk antar kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam hal pencapaian di bidang pendidikan.

Setelah melalui uji validitas dan reliabilitas telah ditentukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan diukur dengan menggunakan dua variabel dengan tingkat reliabilitas mencapai 89 persen, selanjutnya pada penghitungan IDK dimensi pendidikan diperoleh ukuran pembangunan dan peringkat IDK dimensi pendidikan seperti pada Tabel Lampiran 15 dan Gambar 4.12.

Pada Gambar 4.12 tersebut dapat dilihat bahwa nilai ukuran pembangunan bidang pendidikan berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,35 yang terbagi ke dalam tujuh radius. Kota Padang berada pada pusat radar, kemudian Bukittinggi dan Kota Solok berada pada radius pertama, kemudian Kota Padang Panjang dan Pariaman

pada radius kedua dan selanjutnya yang berada pada radius paling luar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika diamati berdasarkan peringkat IDK bidang pendidikan diperoleh lima peringkat terbaik secara berturut-turut adalah Kota Padang, Bukittinggi, Kota Solok, Padang Panjang dan Kota Pariaman (Tabel 4.11). Sedangkan lima daerah dengan peringkat paling bawah adalah Kabupaten Pasaman, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Kepulauan Mentawai.

Gambar 4.12. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Pendidikan



Dibutuhkan upaya sangat keras untuk mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan ini, khususnya untuk daerah yang berada pada lima peringkat paling bawah. Buruknya kualitas sumber daya manusia di lima wilayah tersebut bermula dari rendahnya masa rata-rata lama sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk pada dasarnya merupakan cerminan dan manifestasi dari rendahnya angka partisipasi sekolah. Hingga tahun 2009 secara rata-rata penduduk di lima daerah baru mencapai

pendidikan SD hingga kelas 1 SMP, bahkan di Kepulauan Mentawai rata-rata hanya sampai kelas 6 SD atau kurang dari kelas 1 SMP. Sementara penduduk kota Padang secara rata-rata berpendidikan hingga kelas 2 SMA. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut dibutuhkan dana dan waktu yang cukup lama.

Tabel 4.11. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik di Bidang Pendidikan

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	% Penduduk >10 tahun tamat Diploma +	Peringkat IDK
(1)	(2)	(3)	(4)
Padang	10,89	14,36	1
Bukittinggi	10,47	12,65	2
Kota Solok	10,29	13,17	3
Padang Panjang	10,22	11,81	4
Pariaman	9,73	13,60	5
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Solok Selatan	7,76	4,25	15
Dharmasraya	7,66	4,30	16
Pesisir Selatan	7,84	3,60	17
Padang Pariaman	7,25	4,37	18
Kep. Mentawai	6,51	2,52	19

Rendahnya pencapaian pendidikan juga tergambar pada minimnya kualitas SDM yang dimiliki. Seperti disadari bahwa gerak laju perekonomian perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana pelaksanaan pembangunan dilimpahkan kewenangannya ke pemerintah daerah, sehingga peran SDM yang berkualitas menjadi lebih penting lagi khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan persaingan terbuka dunia luar, maka peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Setiap pelaksana pemerintah daerah harus menyadari bahwa meskipun investasi pendidikan mahal, tetapi tetap harus menjadi prioritas

pembangunan karena masa depan dapat diraih melalui kemajuan di bidang pendidikan.

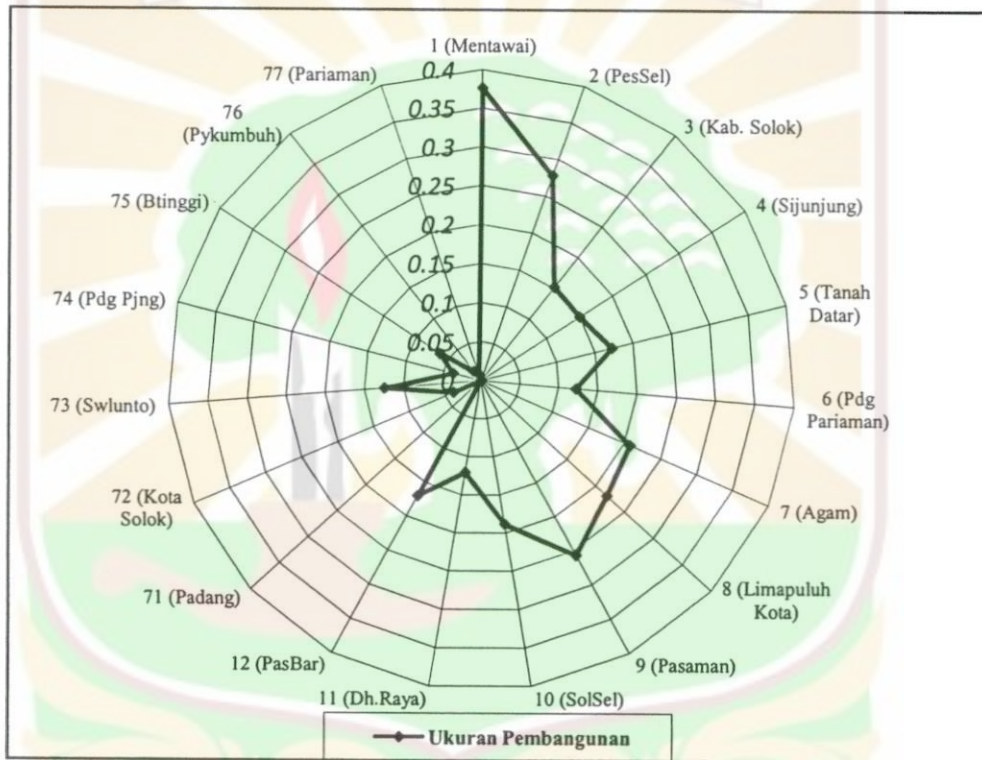
4.5.3 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Ekonomi

Ukuran pencapaian tingkat hidup atau kesejahteraan yang paling mudah dipahami adalah pencapaian kesejahteraan di bidang ekonomi. Secara umum diakui bahwa pencapaian kesejahteraan di bidang ekonomi akan menjadi pemicu untuk pencapaian kesejahteraan pada aspek lainnya. Jika tingkat ekonomi penduduk membaik maka akan timbul kemampuan untuk menginvestasikannya pada aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, hiburan maupun teknologi.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas telah ditentukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di bidang ekonomi diukur dengan menggunakan dua variabel yakni rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dan persentase pengeluaran non makanan dengan tingkat reliabilitas sebesar 85 persen. Selanjutnya dengan menggunakan metode taksonomik, dihitung IDK dimensi ekonomi seperti tertuang pada Tabel Lampiran 15 dan gambar 4.13. Pada gambar tersebut terlihat bahwa nilai ukuran pembangunan bidang ekonomi berada pada rentang skala 0,00 sampai 0,4 dan terbagi ke dalam 8 radius dengan menggunakan interval 0,05 dimana Kota Padang sebagai acuan berada pada pusat radar. Pencapaian ekonomi terbaik setelah kota Padang adalah Kota Pariaman dan Payakumbuh. Sementara pada radius paling luar ditempati oleh Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman sebagai kelompok daerah dengan peringkat buruk dalam pencapaian ekonomi. Pada Tabel 5.12 dapat dilihat lima daerah yang mencapai pembangunan ekonomi terbaik dan terburuk. Tampak Kota Padang secara relatif lebih unggul dari daerah yang lain, maka

selayaknya jika kabupaten/kota yang lain memacu pembangunannya dengan memasang target secara bertahap untuk mengejar ketertinggalan dalam dua aspek ekonomi tersebut dari kota Padang. Kesenjangan pembangunan di bidang ekonomi dapat juga dianalisis melalui pengamatan secara tunggal terhadap setiap aspek penyusun IDK dimensi ekonomi.

Gambar 4.13. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Ekonomi



Bila diperhatikan kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kesenjangan dengan Padang hampir 15 persen, hal yang sama juga dihadapi oleh empat daerah lain yang termasuk lima urutan terbawah dalam pencapaian ekonomi. Hal ini merupakan tantangan pembangunan yang sangat besar. Pengalaman menunjukkan bahwa kemiskinan layaknya lingkaran setan, dan sangat sulit untuk memutus rantai kemiskinan. Apalagi dalam era globalisasi, dimana harga-harga komoditas terkait

harga dunia maka perekonomian penduduk menjadi mudah terguncang. Hal lain yang terkait dengan pencapaian tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi tercermin dari tingginya pengeluaran penduduk untuk konsumsi non makanan. Semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan makanan akan terpenuhi dan mencapai batas maksimal, maka sisa pendapatan akan dikonsumsi untuk kebutuhan non makanan. Pada tabel 5.12 dapat dilihat bagaimana kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk di lima daerah dengan kota Padang dalam hal persentase untuk pengeluaran non makanan.

Tabel 4.12. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik dan Terburuk di Bidang Ekonomi

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per kapita per bulan (000 Rp)	Persentase Pengeluaran Non Makanan	Peringkat IDK
(1)	(2)	(3)	(4)
Padang	608	46,46	1
Pariaman	598	46,15	2
Payakumbuh	596	45,60	3
Padang Panjang	568	45,07	4
Kota Solok	567	44,91	5
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Agam	378	38,54	15
Limapuluh Kota	400	35,80	16
Pasaman	360	34,20	17
Pesisir Selatan	362	32,02	18
Kepulauan Mentawai	276	26,95	19

4.5.4 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Ketenagakerjaan

Seperti diketahui bahwa tingkat kesejahteraan penduduk sangat ditentukan oleh pencapaian di bidang ekonomi, pada sisi lain pencapaian bidang ekonomi tersebut juga sangat ditentukan oleh karakteristik ketenagakerjaan yang digelutinya. Bukti empiris menunjukkan bahwa transformasi perekonomian suatu wilayah diiringi dengan terjadinya transformasi di bidang ketenagakerjaan. Kemajuan pembangunan

biasanya diwarnai dengan terjadinya transformasi struktur lapangan pekerjaan yang semula bersifat agraris menjadi manufaktur, dari pekerja *blue collar* menjadi *white collar* serta dari pekerja informal menjadi pekerja formal. Kemajuan perekonomian juga tercermin dari meningkatnya produktivitas yang salah satunya diukur melalui peningkatan jam kerja.

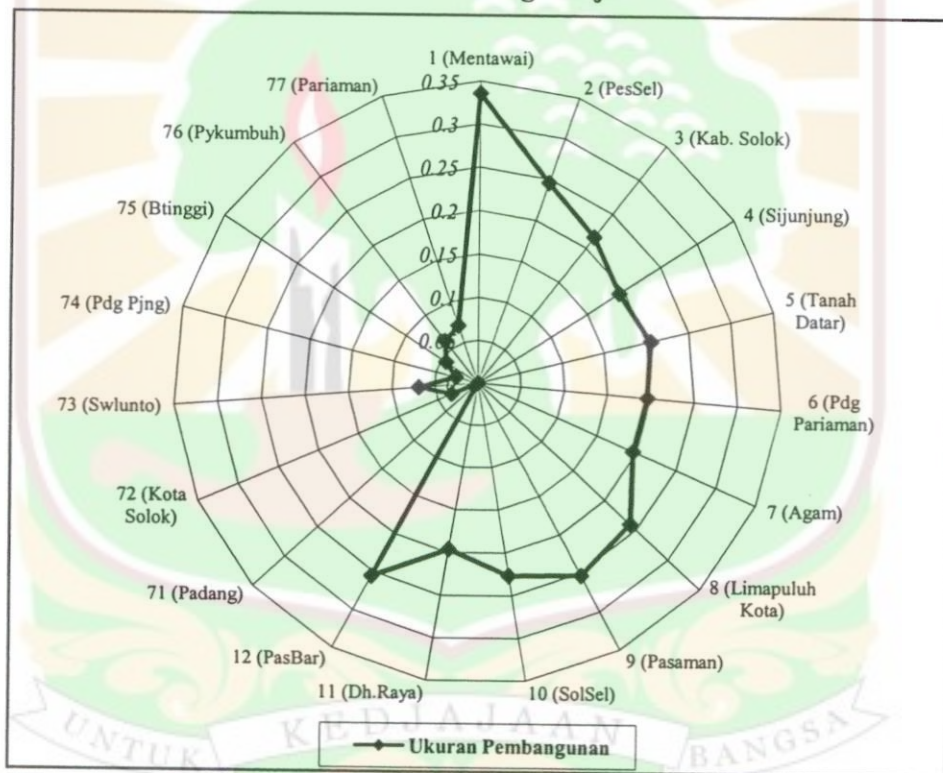
Melalui uji validitas dan reliabilitas telah ditentukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dalam bidang ketenagakerjaan diukur dengan menggunakan dua variabel yakni persentase pekerja sektor formal dan persentase pekerja di sektor non pertanian dengan tingkat reliabilitas sebesar 84 persen. Pada penghitungan IDK dimensi ketenagakerjaan diperoleh ukuran pembangunan seperti terlampir pada Tabel Lampiran 15 dan gambar 4.14.

Pada gambar 4.14 tersebut dapat dilihat bahwa nilai ukuran pembangunan bidang ketenagakerjaan berada pada rentang skala antara 0,00 – 0,35 dan terbagi ke dalam tujuh radius dengan interbal sebesar 0,05. Kota Padang sebagai acuan berada pada pusat radar, kemudian pada pencapaian terbaik bidang ketenagakerjaan berikutnya adalah Padang Panjang, Kota Solok dan Bukittinggi. Sementara pada radius paling luar ditempati oleh Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Pasaman. Disini terlihat begitu besarnya deviasi antar kota dan kabupaten, tampak pada wilayah kota menempati radius satu dan dua, sedangkan pada wilayah kabupaten langsung berada pada radius empat hingga tujuh.

Analisis langsung terhadap peringkat IDK ketenagakerjaan juga mendapatkan hasil yang hampir sama. Lima daerah dengan peringkat ketenagakerjaan terbaik adalah Padang, Padang Panjang, Kota Solok, Bukittinggi dan Payakumbuh, sementara lima peringkat terbawah adalah Kabupaten limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman,

Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. Pengamatan terhadap data input penyusun IDK ketenagakerjaan menunjukkan kesenjangan dalam beberapa variabel, dan ini menjadi tanda adanya kesesenjangan dalam hal tingkat kesejahteraan. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, ketenagakerjaan Kota Padang diwarnai oleh pekerja formal dan bekerja di sektor non pertanian, sementara di lima daerah lain dengan peringkat IDK paling bawah, mayoritas penduduk merupakan pekerja informal yang bekerja di sektor Pertanian.

Gambar 4.14. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Ketenagakerjaan



Pengkategorian pekerja formal dan informal ditetapkan berdasarkan kombinasi silang antara status pekerjaan dan jenis pekerjaan. Pekerja informal biasanya dicirikan dengan jenis pekerjaan yang lebih membutuhkan kekuatan fisik dan cenderung menghasilkan nilai tambah yang rendah. Untuk itu tingginya

persentase pekerja formal dalam ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai salah satu pertanda kemajuan pembangunan, dan adanya kesenjangan persentase pekerja formal antar daerah atau wilayah menjadi indikasi adanya ketimpangan kesejahteraan.

Tabel 4.13. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik dan Terburuk di Bidang Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja sektor Formal	Persentase Pekerja Sektor non Pertanian	Peringkat IDK
(1)	(2)	(3)	(4)
Padang	47,85	93,11	1
Padang Panjang	43,43	90,85	2
Kota Solok	52,96	87,88	3
Bukittinggi	40,27	95,07	4
Payakumbuh	38,47	82,49	5
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Limapuluh Kota	14,29	43,81	15
Pesisir Selatan	12,92	44,49	16
Pasaman	16,80	31,45	17
Pasaman Barat	18,63	26,87	18
Kepulauan Mentawai	6,42	11,70	19

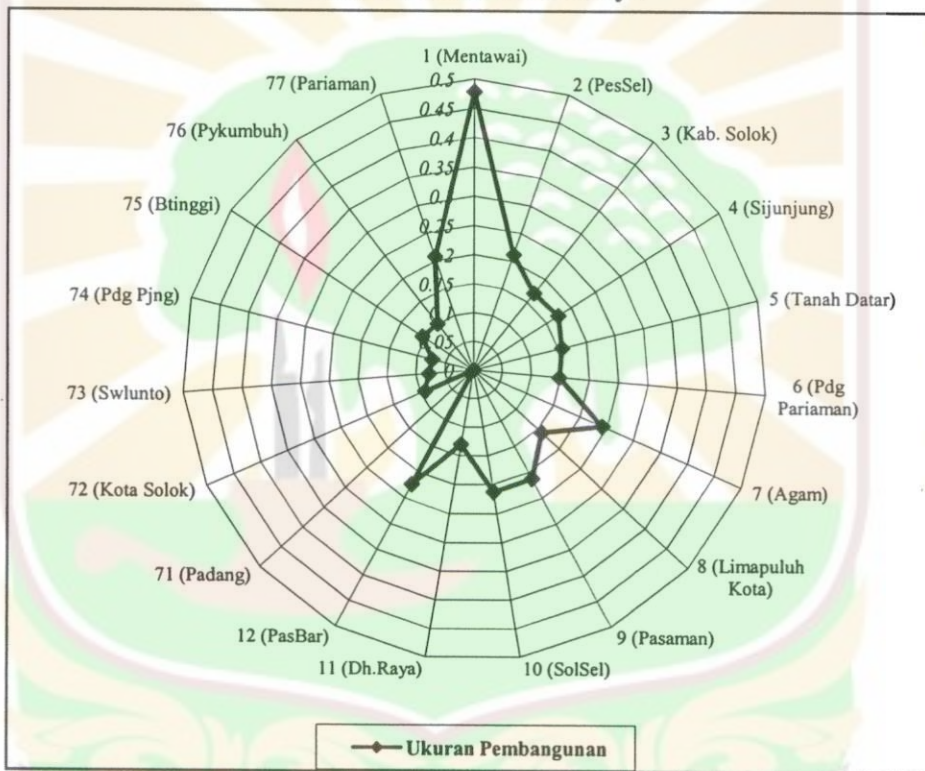
Sektor Pertanian diidentifikasi sebagai sektor yang bernilai tambah rendah, maka kesenjangan kesejahteraan dapat diidentifikasi melalui kesenjangan dalam hal persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian. Pada lima daerah yang tertinggal dalam pembangunan ketenagakerjaan terlihat bahwa pembangunan masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi antara 60 hingga 90 persen, dan hal ini merupakan tanda rendahnya kesejahteraan di lima daerah tersebut.

4.5.5 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Sosial dan Budaya

Keberhasilan dalam tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat melalui pencapaian di bidang sosial dan budaya, dimana semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat maka kondisi sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat tersebut

juga semakin baik. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas sebelumnya diperoleh tiga variabel dimensi sosial dan budaya yang valid digunakan untuk mengukur disparitas tingkat kesejahteraan, secara komposit ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap reliabilitas indeks sebesar 93 persen. Kemudian dengan metode taksonomik, dihitung IDK dimensi sosial dan budaya dan diperoleh nilai ukuran pembangunan dan peringkat IDK sosial dan budaya seperti pada gambar 4.15 dan Tabel Lampiran 16.

Gambar 4.15. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Sosial dan Budaya



Dilihat dari ukuran pembangunan yang menunjukkan ketertinggalan suatu daerah terhadap daerah yang menjadi acuan, diketahui bahwa ukuran pembangunan dimensi sosial dan budaya berada pada rentang 0,00-0,50. Seperti halnya untuk dimensi yang lain, semakin jauh nilai ukuran pembangunan dimensi sosial dan budaya suatu daerah maka ketertinggalan pembangunan terhadap daerah acuan semakin

tinggi. Pada dimensi sosial dan budaya, kembali kepulauan Mentawai berpredikat sebagai daerah yang paling tertinggal dalam pembangunan di bidang sosial dan budaya. Ketertinggalan kepulauan Mentawai sangat mencolok jika melihat pada besarnya nilai ukuran pembangunannya, hampir 5 kali radius jarak antara ukuran pembangunan sosial dan budaya kepulauan Mentawai dengan urutan di atasnya yakni Kabupaten Agam yang berada pada radius keempat.

Berikutnya, bila dilihat peringkat IDK dimensi sosial dan budaya pada Tabel 4.14, pencapaian terbaik dalam pembangunan sosial dan budaya masing-masing ditempati oleh Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Kota Solok dan Payakumbuh. Disparitas sosial dan budaya merupakan cerminan adanya kesenjangan dalam hal tingkat kesejahteraan. Penduduk yang dapat melakukan kegiatan sosial dan budaya adalah penduduk yang memiliki akses untuk melakukan kegiatan tersebut yang perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan waktu dan kesadaran untuk melakukannya. Secara umum semakin sejahtera penduduk semakin mempunyai peluang untuk melakukan kegiatan sosial dan budaya.

Aspek sosial budaya seperti menonton televisi, membaca surat kabar/majalah dan melakukan aktifitas olah raga jika dilakukan akan memberikan nilai tambah bagi individu dan masyarakat. Dengan menonton televisi dan membaca surat kabar akan ada peningkatan kapasitas wawasan dan informasi yang diharapkan akan memberikan nilai positif untuk perbaikan kehidupan selanjutnya. Demikian halnya dengan aktifitas olah raga, maka setiap individu yang melakukannya akan dapat meningkatkan derajat kesehatan yang pada gilirannya akan membantu dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.

Empat daerah lainnya yang menempati peringkat paling bawah pada IDK dimensi sosial dan budaya selain Kepulauan Mentawai berturut-turut adalah

Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Pasaman dan Solok Selatan. Pada tabel 4.14 di atas terlihat bagaimana kesenjangan yang terjadi antara daerah-daerah yang paling bawah dalam hal menonton televisi terutama di kepulauan Mentawai, hal ini merefleksikan dari adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan karena untuk dapat menonton televisi rumahtangga paling tidak harus memiliki sarana televisi.

Tabel 4.14. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik dan Terburuk di Bidang Sosial dan Budaya

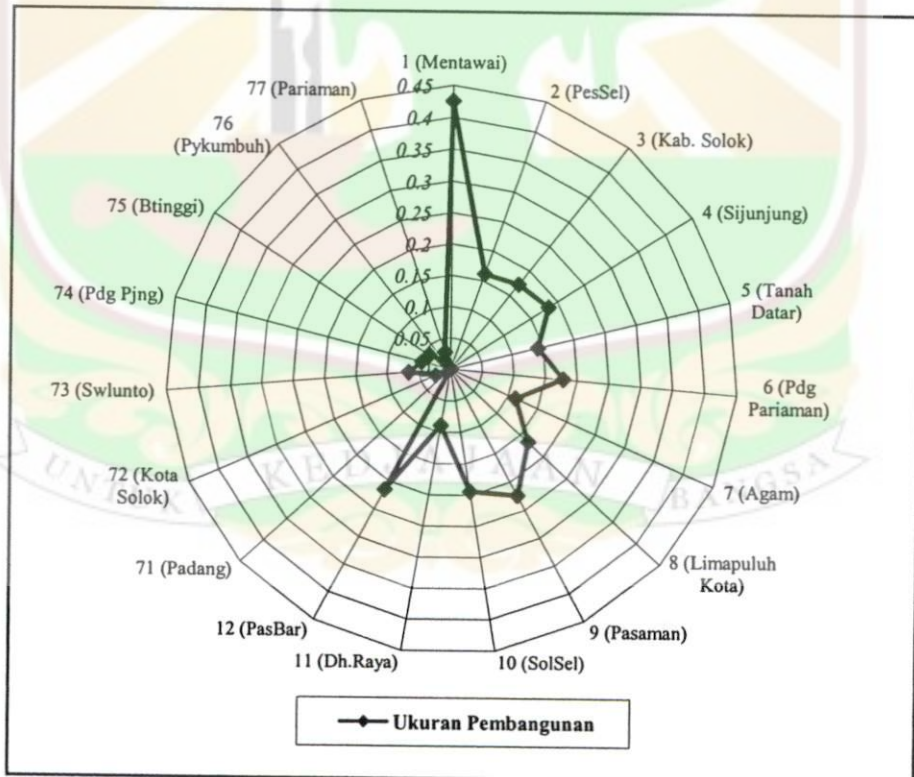
Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk 10 th ke atas			Peringkat IDK
	Menonton Televisi seminggu yang lalu	Membaca Surat kabar/majalah Seminggu yang lalu	Melakukan Olahraga Seminggu yang lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang	95,99	35,50	25,94	1
Padang Panjang	92,89	27,02	27,58	2
Sawahlunto	91,46	26,74	27,19	3
Kota Solok	93,38	43,94	29,69	4
Payakumbuh	93,86	38,17	31,84	5
.
.
.
Solok Selatan	83,47	14,11	20,02	15
Pasaman	78,95	16,10	20,80	16
Pasaman Barat	86,89	14,11	17,71	17
Agam	84,16	11,71	17,96	18
Kepulauan Mentawai	41,14	3,96	20,97	19

Dalam kaitannya dengan kegiatan membaca surat kabar/majalah, penduduk di lima daerah yang mengalami keteringgalan pembangunan sosial dan budaya secara umum juga belum membaca surat kabar. Kebiasaan membaca surat kabar di kelima daerah tersebut rata-rata hanya 16 persen, bahkan di Kepulauan Mentawai hanya 4 persen saja.

4.5.6 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Perumahan dan Lingkungan

Dimensi perumahan dan lingkungan seperti halnya dimensi pendidikan merupakan salah satu dimensi yang penting untuk diperhitungkan dalam melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Hal ini mengingat dari 19 variabel yang dinyatakan valid untuk mengukur disparitas tingkat kesejahteraan, 4 diantaranya berasal dari kedua dimensi tersebut. Selain itu, kontribusi dari keempat variabel tersebut dalam menerangkan reliabilitas indeks komposit juga yang tertinggi, yaitu 97 persen. Setelah keempat variabel diatas lolos uji validitas dan reliabilitas dan penghitungan IDK dilakukan, output dari dimensi perumahan dan lingkungan berupa ukuran pembangunan dapat dilihat pada Gambar 4.16 dan Tabel Lampiran 16.

Gambar 4.16. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Perumahan dan Lingkungan



Ukuran pembangunan di bidang perumahan dan lingkungan berada pada rentang skala antara 0,00 hingga 0,45. Pola yang terjadi pada bidang perumahan dan lingkungan ini hampir sama dengan pola pada dimensi sosial dan budaya, dimana Kabupaten kepulauan Mentawai sangat mencolok jika melihat pada besarnya nilai ukuran pembangunannya, selisih hampir 5 radius jarak antara ukuran pembangunan perumahan dan lingkungan di kepulauan Mentawai dengan urutan di atasnya yakni Kabupaten Pasaman yang berada pada radius keempat.

Ditinjau berdasarkan peringkat IDK dimensi perumahan dan lingkungan, lima daerah dengan peringkat terbaik berturut-turut adalah kota Padang, Payakumbuh, Kota Solok, Pariaman dan Bukittinggi. Meskipun kota Padang tidak menempati peringkat teratas pada setiap variabel, namun secara rata-rata semua variabel pada dimensi ini menunjukkan angka yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lainnya.

Lima daerah yang dinilai cukup tertinggal dalam pembangunan bidang perumahan dan lingkungan adalah Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai. Kelima daerah ini secara rata-rata mengalami kesenjangan yang cukup signifikan terutama Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berbagai aspek pembangunan perumahan dan lingkungan. Dapat diperhatikan bagaimana besaran persentase pada setiap variabel dimensi perumahan dan lingkungan di Kepulauan Mentawai sangat memprihatinkan karena sangat jauh selisihnya dengan persentase variabel yang sama di daerah lainnya.

Kesenjangan tingkat kesejahteraan lima daerah yang terbawah dibandingkan dengan Padang, Bukittinggi dan Kota Solok dalam hal penggunaan listrik, terlihat bahwa rumah tangga di Kepulauan Mentawai hanya 30 persen saja yang

menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama atau selisih 60 persen dibandingkan dengan rumah tangga pengguna listrik di 3 kota di atas. Keteringgalan ini diduga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang tentunya berdampak pada kurangnya kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi listrik dan juga ketersediaan prasarana listrik yang mungkin belum menjangkau ke seluruh wilayah di kabupaten tersebut.

Tabel 4.15. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik dan Terburuk di Bidang Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga				Peringkat IDK
	Menggunakan Listrik	Memiliki akses air bersih	Memiliki Fasilitas BAB	Memiliki Tangki Septik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padang	98,31	96,59	72,08	73,81	1
Payakumbuh	97,74	92,46	74,24	70,16	2
Kota Solok	98,42	97,11	75,63	83,01	3
Pariaman	98,58	88,85	74,90	67,72	4
Bukittinggi	98,75	91,67	79,18	85,84	5
.
.
Sijunjung	88,47	59,35	44,22	27,75	15
Solok Selatan	84,34	71,67	33,73	22,92	16
Pasaman Barat	82,27	56,49	40,45	17,24	17
Pasaman	78,60	61,21	25,34	26,70	18
Kepulauan Mentawai	29,68	11,36	19,92	8,28	19

Kesenjangan juga terjadi dalam hal akses terhadap air bersih, kembali kepulauan Mentawai menjadi daerah yang sangat minim akses terhadap air bersih. Permasalahan akses terhadap air bersih seringkali timbul sebagai bagian dari keadaan alam yang kurang mendukung dalam hal ketersediaan air bersih, di sisi lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih juga belum menjangkau ke seluruh wilayah. Rendahnya akses rumah tangga terhadap air bersih juga terkait dengan keterbatasan kemampuan rumah tangga untuk mengkonsumsi air bersih. Jika

kemampuan ekonomi rumah tangga memadai, maka rumah tangga tentunya akan berusaha mengkonsumsi air bersih sekalipun dengan cara membeli. Maka tepat kiranya jika akses rumah tangga terhadap air bersih dijadikan sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat kesejahteraan antar wilayah.

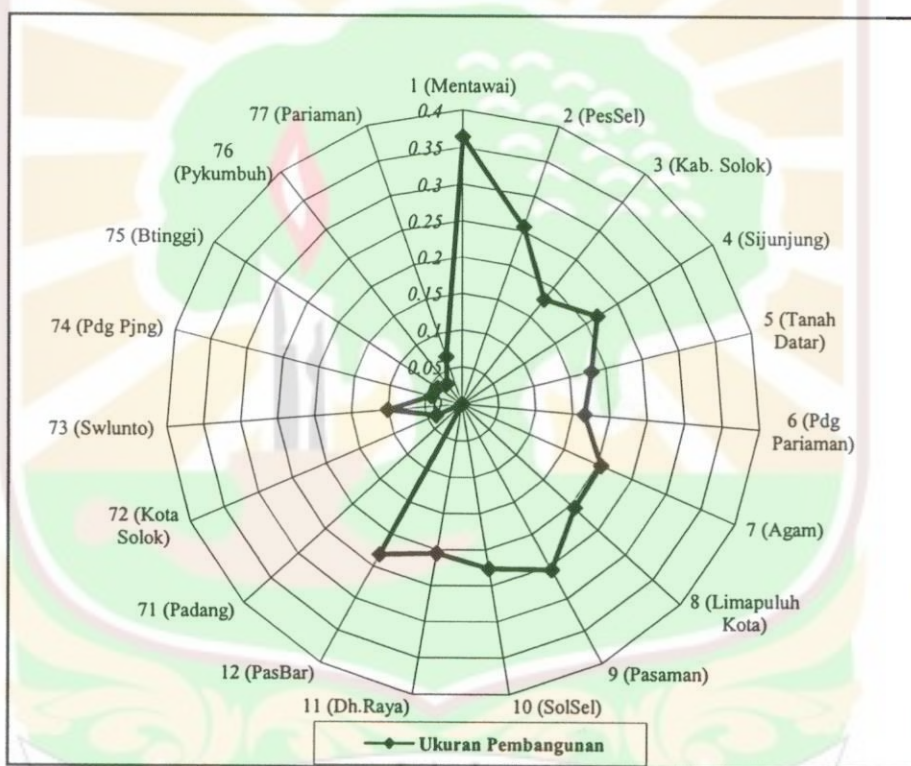
Keberadaan tangki septik menjadi salah satu indikator kesehatan rumah tangga, karena tanpa tangki septik maka lingkungan rumah tangga akan tercemar yang akan berdampak pada kondisi kesehatan rumah tangga. Kepemilikan tangki septik tampaknya masih menjadi bagian permasalahan untuk pembangunan perumahan dan lingkungan di lima daerah yang tertinggal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman tercatat sebagai dua daerah yang terparah dalam hal kepemilikan tangki septik dimana hanya kurang dari seperempat rumah tangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat, karena pembangunan tangki septik mungkin tidak begitu banyak menyerap biaya namun pengaruhnya akan sangat besar jika hal tersebut tidak dilakukan yakni mencemarkan lingkungan hidup dan mengganggu kesehatan.

4.5.7 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Dimensi Teknologi dan Informasi

Dalam peradaban dunia yang semakin modern, tuntutan kepemilikan atau akses terhadap teknologi dan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik akan tercermin juga dari sisi pencapaian di bidang teknologi dan informasi, artinya semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka semakin baik pula kepemilikan atau akses terhadap teknologi dan informasi.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, diperoleh tiga variabel untuk mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan di bidang teknologi dan informasi. Secara bersama-sama ketiga variabel ini memberikan kontribusi terhadap reliabilitas indeks komposit sebesar 80 persen. Pada penghitungan IDK dihasilkan ukuran pembangunan dan peringkat IDK dimensi teknologi dan informasi seperti pada Tabel Lampiran 16 dan gambar 4.17.

Gambar 4.17. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Dimensi Teknologi dan Informasi



Ukuran pembangunan pada dimensi ini berada pada kisaran rentang skala 0,00 hingga 0,36. Nilai ukuran pembangunan tertinggi 0,36 dimiliki oleh Kepulauan Mentawai, berarti kabupaten ini menunjukkan ketertinggalan pembangunan bidang teknologi dan informasi karena jaraknya yang jauh dari pusat skala.

Lima peringkat terbaik pada dimensi teknologi dan informasi adalah Padang, Payakumbuh, Kota Solok, Bukittinggi dan Padang Panjang. Jika merujuk dari variabel pengukur teknologi dan informasi, Padang tetap merupakan daerah dengan persentase yang relatif baik dalam pengukuran dimensi ini. Teknologi dan informasi merupakan bagian dari gaya hidup, dan gaya hidup biasanya terkait dengan kemampuan ekonomi penduduk. Oleh karena itu untuk meningkatkan pemakaian teknologi dan informasi dapat ditempuh dengan upaya meningkatkan perekonomian penduduk yang disertai dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses penduduk dalam menjangkau teknologi dan informasi.

Tabel 4.16. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik dan Terburuk di Bidang Teknologi dan Informasi

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga			Peringkat IDK
	Memiliki Telepon Seluler	Memiliki Komputer	Mengakses internet	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang	84,46	21,66	32,94	1
Payakumbuh	85,50	22,08	27,13	2
Kota Solok	80,55	26,35	31,45	3
Bukittinggi	89,60	23,56	38,36	4
Padang Panjang	81,46	20,25	25,98	5
.
.
.
Solok Selatan	50,63	5,33	8,30	15
Pasaman Barat	52,15	5,86	5,39	16
Pasaman	49,45	2,13	4,48	17
Pesisir Selatan	49,09	5,11	1,79	18
Kepulauan Mentawai	13,75	2,19	0,00	19

Tabel 4.16 juga menampilkan lima daerah dengan peringkat IDK paling bawah, yaitu Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. Dalam hal penggunaan telepon seluler, secara rata-rata kurang dari 30 persen rumah tangga yang memakainya, tampak bagaimana kesenjangan

antara kelima daerah tersebut dengan lima daerah peringkat terbaik yang secara rata-rata sudah lebih dari 65 persen rumah tangga menggunakan telepon seluler.

Komputer saat ini merupakan media kerja yang sudah biasa digunakan, kepemilikan komputer menjadi simbol kemajuan dan kesejahteraan. Adanya kesenjangan dalam hal kepemilikan komputer menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesejahteraan. Secara rata-rata pada variabel kepemilikan komputer menunjukkan hal yang cukup menggembirakan, dimana rentang antara yang tertinggi dan terendah dalam kepemilikan tidak terlalu lebar.

Kesenjangan juga terjadi dalam hal kemampuan rumah tangga dalam mengakses internet. Sekitar 33 rumah tangga dari 100 rumah tangga di kota Padang memiliki kemampuan untuk mengakses internet dalam sebulan yang lalu, sedangkan pada lima daerah dengan peringkat IDK terbawah tidak sampai 10 rumah tangga yang dapat mengakses internet bahkan di kepulauan Mentawai tidak ada sama sekali rumah tangga yang dapat mengakses internet.

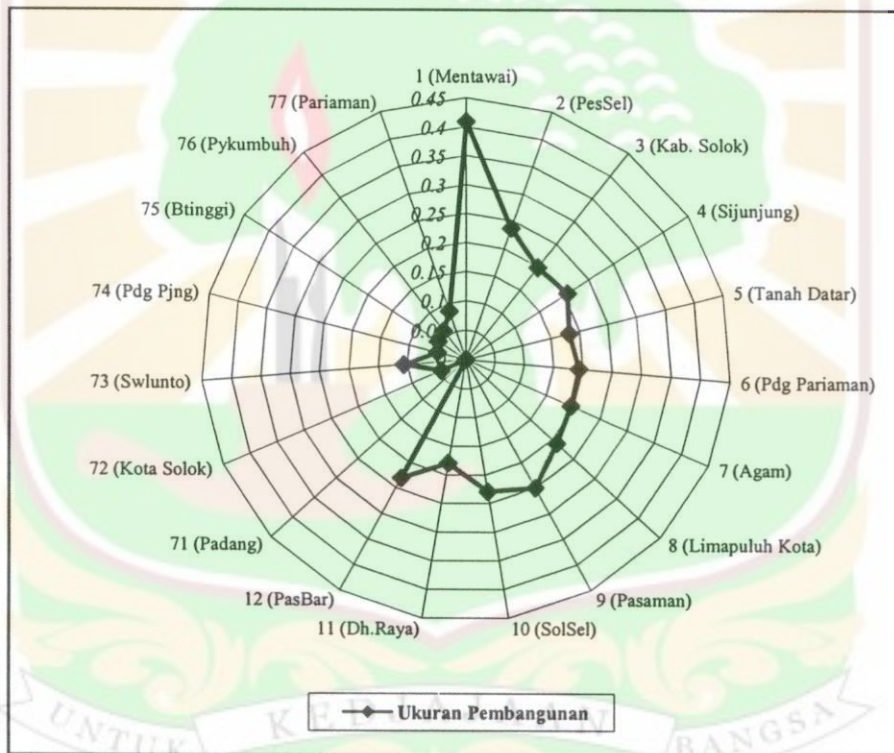
4.5.8 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Seluruh Dimensi

Dengan menggunakan sebanyak 17 variabel yang telah lolos uji validitas dan uji reliabilitas, ditambah dengan variabel pengeluaran non makanan yang sebelumnya diberlakukan sebagai validator, selanjutnya disusun Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota (IDK) dengan menggunakan metode taksonomik dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran 17 dan gambar 4.18 di bawah ini.

Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa ukuran pembangunan tersebar dalam sembilan radius. Pusat radar adalah kota Padang sebagai daerah acuan dengan nilai ukuran pembangunan 0,00. Semakin jauh posisi kabupaten/kota dari pusat radar

maka semakin tertinggal kabupaten/kota tersebut dalam hal tingkat kesejahteraan. Daerah terdekat berikutnya adalah kota Solok dan Padang Panjang dengan jarak ukuran pembangunannya dengan Padang relatif tidak terlalu jauh. Lebih lanjut pada Gambar 4.18 terlihat daerah yang berada pada radius paling luar yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan hal ini dimaknai sebagai daerah yang paling tertinggal dalam keseluruhan dimensi pembangunan karena ukuran pembangunannya berada pada posisi yang paling jauh dari kota Padang.

Gambar 4.18. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Seluruh Dimensi

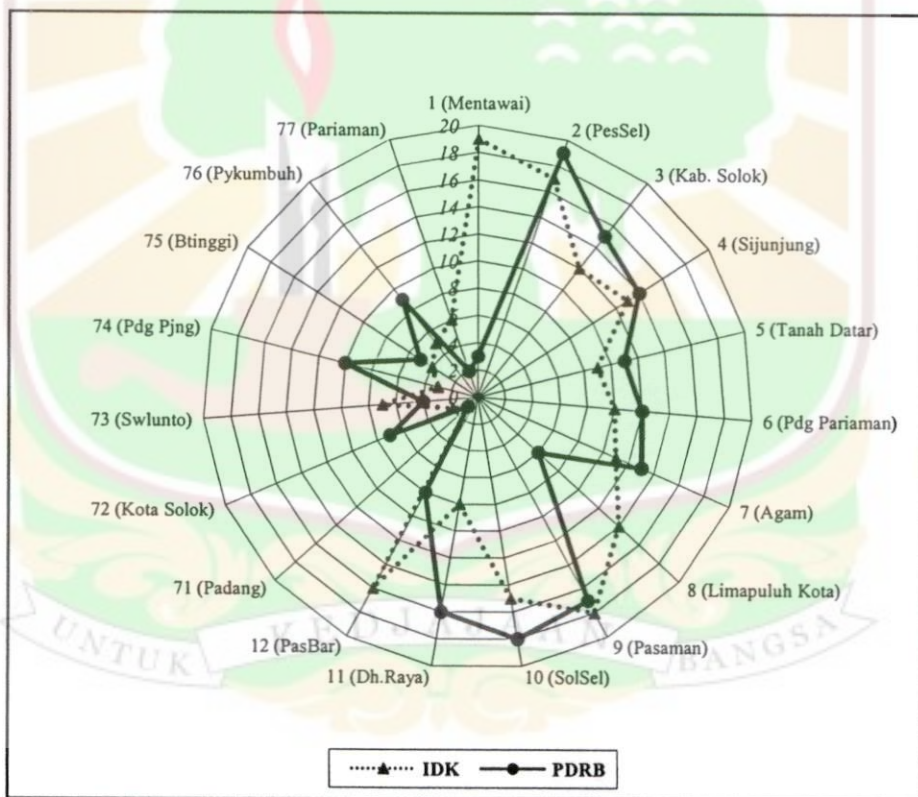


Secara umum semua kabupaten berada pada radius ke empat dan kelima kecuali Kepulauan Mentawai yang berada jauh di radius paling luar, sementara untuk kota berada pada radius kedua kecuali untuk Sawahlunto yang berada pada radius

ketiga. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa analisis berdasarkan pengamatan secara langsung terhadap nilai ukuran pembangunan lebih sensitif bila dibandingkan dengan mengamati peringkat IDK, karena nilai peringkat tidak mengandung intensitas nilai jarak yang sesungguhnya terhadap daerah acuan.

Bila analisis dilanjutkan dengan mengamati secara bersama-sama antara peringkat IDK dibandingkan dengan peringkat PDRB per kapita. Hal ini dilakukan untuk menjawab apakah daerah-daerah yang memiliki potensi perekonomian baik (PDRB per kapita tinggi) juga memiliki tingkat kesejahteraan yang baik.

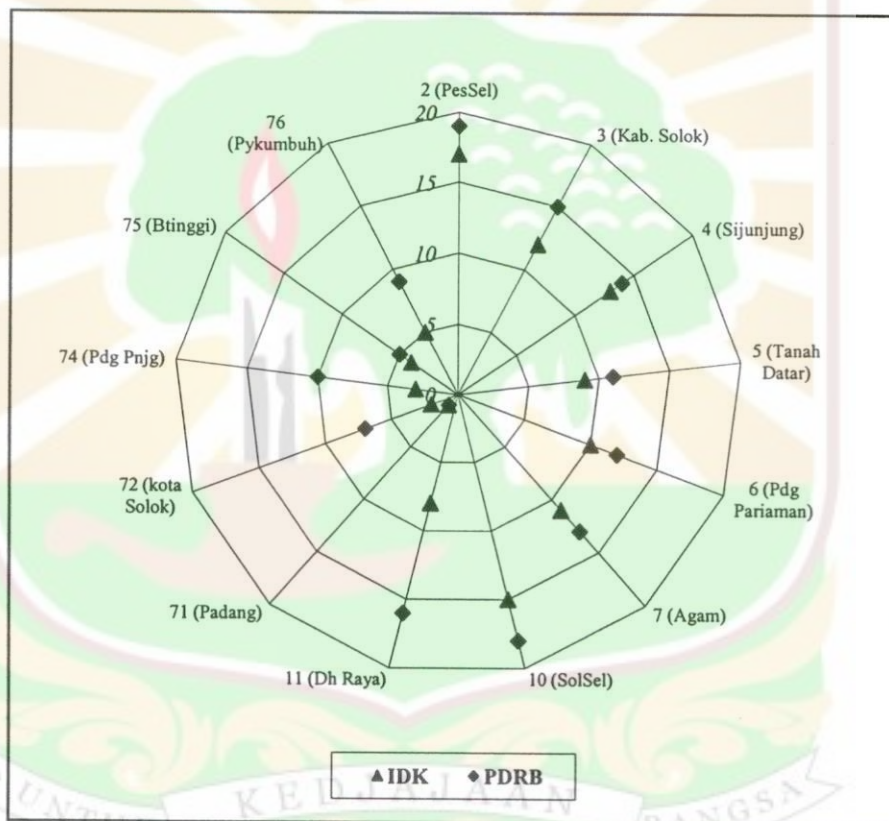
Gambar 4.19. Peringkat IDK dan Peringkat PDRB Kabupaten/Kota



Gambar 4.19 menampilkan sebaran peringkat IDK keseluruhan dimensi disandingkan dengan peringkat PDRB per kapita untuk tiap kabupaten/kota. Posisi

ideal suatu kabupaten/kota adalah jika kabupaten/kota tersebut mampu mengoptimalkan potensi perekonomiannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal atau paling tidak tingkat kesejahteraan penduduk seirama dengan potensi perekonomian yang dimiliki (peringkat IDK lebih baik dari peringkat PDRB per kapita). Untuk pengamatan yang lebih mudah maka gambar 4.19 dipecah menjadi dua gambar yaitu gambar 4.20 dan 4.21.

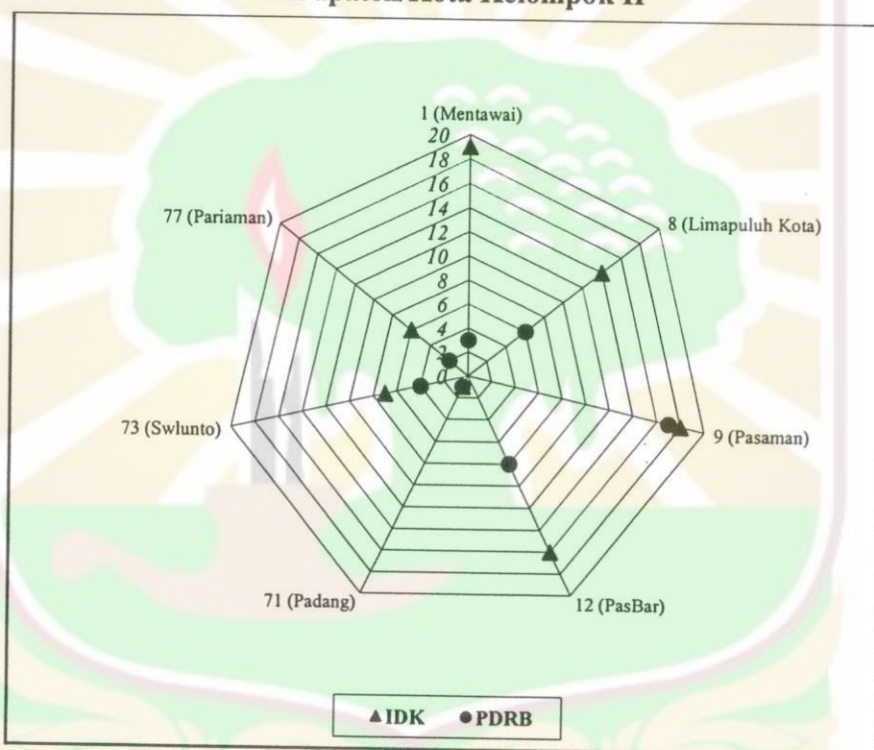
Gambar 4.20. Peringkat IDK dan Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Kelompok I



Gambar 4.20 adalah kelompok kabupaten/kota yang memiliki peringkat IDK lebih baik dari peringkat PDRB yang ditandai dengan lokasi peringkat PDRB yang berada pada radius luar sementara peringkat IDK berada pada radius dalam. Kelompok ini merepresentasikan kabupaten/kota yang dapat mengoptimalkan potensi

perekonomiannya untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya. Semakin jauh jarak antara posisi peringkat PDRB dengan jarak peringkat IDK menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut semakin optimal dalam memanfaatkan potensi perekonomiannya. Kabupaten/kota yang berkategori sebagai kabupaten/kota yang efektif dalam penggunaan PDRB dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk adalah Kabupaten Dharmasraya, Padang Panjang, Kota Solok dan Payakumbuh.

Gambar 4.21. Peringkat IDK dan Peringkat PDRB Kabupaten/Kota Kelompok II



Gambar 4.21 merupakan kelompok kabupaten/kota yang memiliki peringkat IDK lebih buruk dari peringkat PDRB yang ditandai dengan lokasi peringkat IDK yang berada pada radius luar sementara peringkat PDRB berada pada radius dalam. Ini merupakan kelompok kabupaten/kota yang kurang optimal dalam memanfaatkan potensi perekonomian untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin

jauh jarak antara posisi peringkat PDRB dengan peringkat IDK menunjukkan kabupaten/kota tersebut semakin tidak optimal dalam pemanfaatan potensi perekonomian. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori ini adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pasaman Barat.

Pada Tabel 4.17 berikut menyajikan lima daerah yang mempunyai peringkat terbaik IDK yang secara berturut-turut ditempati oleh Padang, Kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh.

Tabel 4.17. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terbaik Seluruh Dimensi Dikaitkan Dengan Peringkat Indeks Disparitas PDRB

Kabupaten/Kota	Kesejahteraan		PDRB	
	Ukuran Pembangunan	Peringkat	Ukuran Pembangunan	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang	0,00000	1	0,00000	1
Kota Solok	0,04540	2	0,20048	7
Padang Panjang	0,04975	3	0,23146	10
Bukittinggi	0,05603	4	0,17593	5
Payakumbuh	0,06204	5	0,22261	9

Terwujudnya IDK yang baik untuk Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tidak terlepas dari adanya dukungan dari potensi perekonomian yang dimilikinya, sementara Kota Solok dan Padang Panjang dapat dikategorikan sebagai daerah yang mampu dengan baik mengoptimalkan sumber dan potensi ekonominya, hal ini disebabkan karena peringkat PDRB per kapita yang tidak terlalu baik tetapi mampu dalam mewujudkan tingkat kehidupan penduduk yang lebih baik.

Berikutnya pada Tabel 4.18 disajikan lima daerah yang mempunyai peringkat IDK terburuk yang berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Pasaman dan Kepulauan Mentawai. Secara umum kelima daerah tersebut mendapatkan peringkat yang buruk karena disebabkan oleh potensi

perekonomiannya yang kurang bagus. Yang sangat memprihatinkan adalah kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat dimana potensi perekonomian yang diwakili oleh peringkat PDRB per kapita cukup menjanjikan. Terlihat bahwa Kepulauan Mentawai berada pada peringkat ke tiga dalam PDRB per kapita namun pada IDK berada pada posisi terbawah atau Kabupaten Pasaman Barat memiliki peringkat ke delapan dalam PDRB per kapita tetapi peringkat IDK berada posisi ke enam belas.

Tabel 4.18. Lima Kabupaten/Kota dengan Peringkat IDK Terburuk Seluruh Dimensi Dikaitkan Dengan Peringkat Indeks Disparitas PDRB

Kabupaten/Kota	Kesejahteraan		PDRB	
	Ukuran Pembangunan	Peringkat	Ukuran Pembangunan	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Solok Selatan	0,22923	15	0,37151	18
Pasaman Barat	0,23029	16	0,20300	8
Pesisir Selatan	0,23692	17	0,37206	19
Pasaman	0,24952	18	0,32636	17
Kepulauan Mentawai	0,40944	19	0,14477	3

4.5.9 Indeks Disparitas Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota Level Kabupaten/Kota

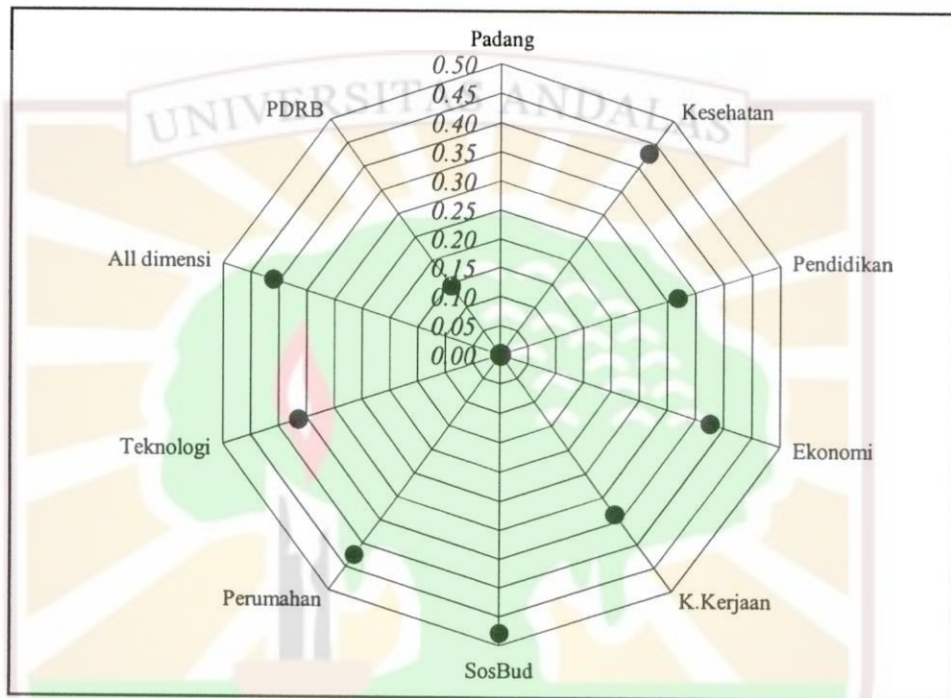
Analisis IDK pada level kabupaten/kota dilakukan dengan tujuan untuk memetakan persoalan pembangunan secara keseluruhan di kabupaten/kota, utamanya yang terkait dengan kesejahteraan penduduk. Melalui peta persoalan yang ada, tiap kabupaten/kota selanjutnya dapat menyusun strategi terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk maupun peningkatan PDRB per kapita.

a. Kepulauan Mentawai

Melalui Gambar 4.22 terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat buruk, karena IDK keseluruhan dimensi berada pada peringkat terakhir. Persoalan mendasar adalah bagaimana dengan poren

perekonomian yang begitu baik, tetapi tingkat kesejahteraan penduduk menjadi sangat buruk. Tabel 4.19 menyajikan besarnya gap kesenjangan antara Kepulauan Mentawai terhadap Kota Padang.

Gambar 4.22. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dalam hal ini fokus pembangunan untuk Kepulauan Mentawai mutlak pada seluruh bidang karena mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yakni bidang Kesehatan, Pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, perumahan dan lingkungan serta teknologi. Modal dasar pembangunan itu sendiri telah dimiliki oleh Kepulauan Mentawai dimana besarnya PDRB per kapita mencapai peringkat ke tiga.

Bila diperhatikan pada tabel 4.19 tersebut, tampak bahwa gap atau kesenjangan yang terjadi antara Kepulauan Mentawai terhadap Padang begitu lebarnya. Mulai dari persoalan pada kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga medis

sampai persoalan rata-rata lama sekolah dan penduduk yang berpendidikan diploma ke atas. Kesenjangan dalam pengeluaran non makanan sebesar -19,51 persen, diartikan bahwa level kesejahteraan penduduk Kepulauan Mentawai sangat sangat rendah. Ketenagakerjaan Kepulauan Mentawai lebih didominasi oleh pekerja informal dan masih tingginya kontribusi sector pertanian. Seperti diketahui bahwa sektor informal dan sektor pertanian sampai saat ini masih diartikan sebagai sektor yang mempunyai nilai tambah rendah.

Tabel 4.19. Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Kota Padang

Dimensi	Kepulauan Mentawai	Padang	Gap
Kesehatan dan Gizi			
% Kelahiran Balita Terakhir Ditolong Tenaga Medis	44,66	98,07	-53,41
Pendidikan			
Rata-rata Lama Sekolah (th)	6,51	10,89	-4,38
% Penduduk 10 th ke atas yang berpendidikan Diploma ke atas	2,52	14,36	-11,84
Ekonomi			
Rata-rata pengeluaran per kapita (000 Rp)	275,76	607,98	-332,22
% Pengeluaran non makanan	26,95	46,46	-19,51
Ketenagakerjaan			
% Pekerja di sektor formal	6,42	47,85	-41,43
% Pekerja sektor non pertanian	11,70	93,11	-81,41
Sosial dan Budaya			
% Penduduk yang menonton TV	41,14	95,99	-54,85
% Penduduk yang membaca surat kabar/majalah	3,96	35,50	-31,54
% Penduduk yang berolahraga	20,97	25,94	-4,97
Perumahan dan Lingkungan			
% Rumah tangga memakai listrik	29,68	98,31	-68,63
% Rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih	11,36	96,59	-85,23
% Rumah tangga memiliki fasilitas BAB sendiri	19,92	72,08	-52,16
% Rumah tangga memiliki tangki septik	8,28	73,81	-65,53
Teknologi dan Informasi			
% Rumah tangga memiliki telepon seluler	13,75	84,46	-70,71
% Rumah tangga memiliki computer	2,19	21,66	-19,47
% Rumah tangga mengakses internet	0,00	32,94	-32,94
PDRB Riil per Kapita (juta Rp)	7,39	12,96	-5,57

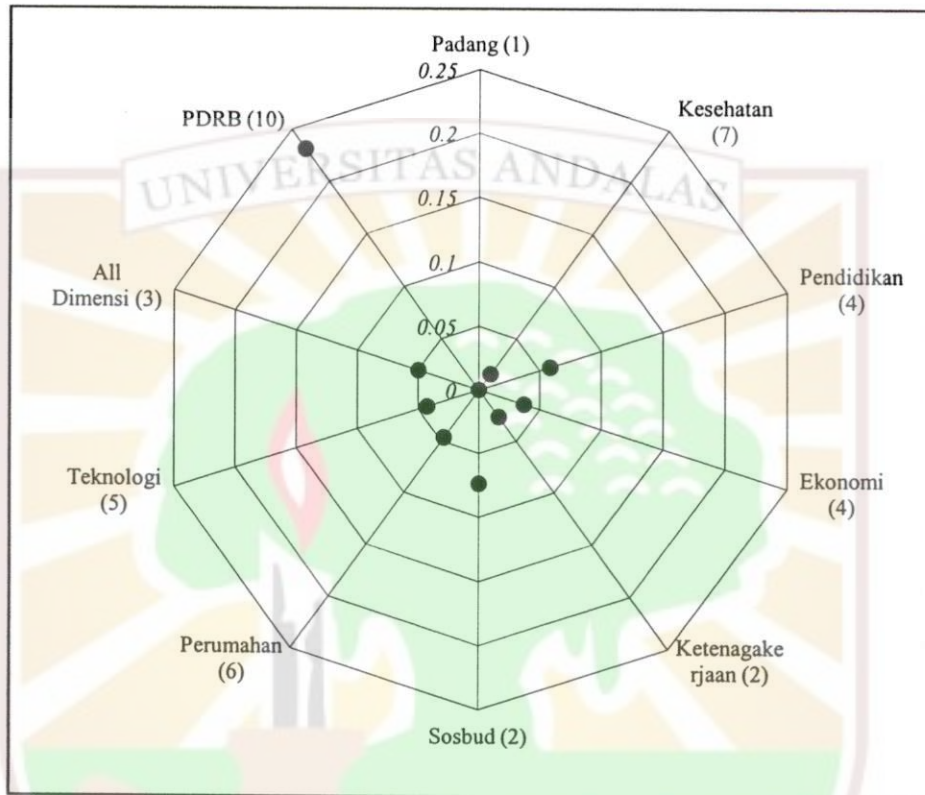
Intensitas kesejahteraan juga terefleksi pada aspek perumahan dan lingkungan, terlihat bahwa Kepulauan Mentawai mempunyai sejumlah gap negatif di semua variabel perumahan dari Kota Padang. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Kepulauan Mentawai memiliki banyak tantangan dalam pembangunan perumahan seperti penambahan jaringan listrik pada rumah tangga, peningkatan akses terhadap air bersih, peningkatan kepemilikan jamban sendiri dan tangki septik.

b. Kota Padang Panjang

Padang Panjang adalah termasuk salah satu daerah yang sukses dalam pembangunan karena berhasil mewujudkan kesejahteraan penduduknya, ditandai oleh peringkat IDK keseluruhan dimensi yang berada pada peringkat 3. Meskipun dukungan potensi perekonomian daerah dimana PDRB per kapita kota ini hanya berada pada peringkat ke 10, namun pemerataan dalam perwujudan kesejahteraan penduduk dapat dilakukan dengan maksimal. Pada gambar 4.23 terlihat bagaimana posisi Kota Padang Panjang pada beberapa dimensi. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, ternyata posisi dimensi ketenagakerjaan dan social budaya yang didasarkan pada variable pekerja formal, pekerja non pertanian, penduduk yang menonton televisi, membaca surat kabar dan penduduk yang berolah raga menempati posisi kedua setelah Padang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemenuhan akan beberapa kebutuhan yang terkait dengan kesejahteraan sudah dapat dilakukan dengan baik. Demikian halnya pada dimensi ekonomi dan dimensi pendidikan, Kota Padang Panjang masih menempati posisi yang cukup baik. Namun keberhasilan Padang Panjang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk masih perlu

ditingkatkan lagi, utamanya pada bidang kesehatan, perumahan dan teknologi informasi.

Gambar 4.23. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDK Kota Padang Panjang



4.6 Implikasi Kebijakan

“People are the real wealth of nation” merupakan kalimat yang dikutip kembali dalam *Human Development Report* Tahun 2010 sekaligus untuk memperingati 20 tahun publikasi tersebut. Secara substantive kalimat tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan suatu negara merupakan representasi dan kondisi penduduknya. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa pembangunan manusia adalah focus dari pembangunan bangsa.

Masih berdasarkan HDR 2010, pembangunan manusia dikonsepsikan sebagai perluasan konsep kebebasan manusia untuk hidup lama, sehat dan kreatif; mencapai tujuan yang dianggap berharga; dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang setara dan berkelanjutan didunia ini. Manusia berfungsi ganda sebagai pelaksana maupun yang menikmati pembangunan tersebut baik secara individu atau dalam kelompok. Berdasarkan konsep tersebut maka terdapat tiga komponen dalam pembangunan manusia yaitu kesejahteraan, pemberdayaan dan keadilan.

Implikasi dari uraian tersebut adalah bahwa pembangunan harus memperhatikan kondisi kesejahteraan manusia secara luas. Begitu pula dengan indicator keberhasilan pembangunan wilayah tidak bisa hanya dengan memasukkan variable yang menggambarkan kondisi wilayah dan mencakup satu aspek saja seperti ekonomi. Ulasan yang diberikan pada bab pembahasan sejalan dengan kondisi tersebut. Pada kasus Provinsi Sumatera Barat, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak otomatis memberikan gambaran keberhasilan pembangunan pada aspek lainnya.

Pada Kabupaten Pasaman Barat terlihat bahwa peringkat indek PDRB ada pada posisi 8. Namun pada aspek lainnya posisinya berada pada level terbawah jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kondisi perekonomian Kabupaten Pasaman Barat banyak dipengaruhi oleh keberhasilan sector perkebunan sehingga nilai PDRBnya cukup tinggi. Namun perlu diperhatikan tingginya PDRB tidak akan selalu sejalan dengan tingkat kesehatan dan pendidikan penduduknya. Padahal dalam konsep pembangunan manusia kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting untuk diperhatikan. Jika kesehatan dan pendidikan penduduk tidak baik maka keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan dimasa datang juga akan terancam.

Kondisi sebaliknya ada pada Kabupaten Dharmasraya, daerah dengan pencapaian aspek ekonomi kurang baik (peringkat bawah) dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Namun secara keseluruhan pembangunan Kabupaten Dharmasraya berada dilevel tengah. Kondisi tersebut didukung oleh aspek sosial budaya dan aspek perumahan dan lingkungan. Selanjutnya dari nilai korelasi *spearman* pada peringkat indek masing-masing dimensi pembangunan dengan peringkat indek secara keseluruhan, maka terlihat bahwa peringkat pada dimensi perumahan dan lingkungan, teknologi dan tenaga kerja memiliki hubungan tertinggi dengan peringkat secara keseluruhan. Sebaliknya peringkat dimensi ekonomi memiliki korelasi yang paling lemah bersama peringkat dimensi social budaya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan itu sendiri harus memperhatikan aspek yang lebih luas bukan sekedar dimensi ekonomi.

Tabel 4.20. Korelasi Spearman Antara Peringkat IndeK Keseluruhan dengan Peringkat IndeK di Masing-masing Dimensi

Dimensi	Korelasi	Significant
(1)	(2)	(3)
Kesehatan dan Gizi	0.896	0.000
Pendidikan	0.872	0.000
Ekonomi	0.860	0.000
Tenaga Kerja	0.933	0.000
Sosial Budaya	0.825	0.000
Perumahan dan Lingkungan	0.951	0.000
Teknologi	0.947	0.000

Implikasi kebijakan dalam pembangunan adalah bahwa perencanaan dan program pembangunan harus memperhatikan aspek yang lebih luas bukan sekedar meningkatkan PDRB dan pendapatan perkapita. Tingginya pendapatan perkapita atau

PBRD tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan seluruh penduduk terutama jika ketimpangan masih sangat tinggi. Beberapa dimensi yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Dimensi teknologi dan tenaga kerja, dimensi tersebut akan berpengaruh pada aspek struktur ekonomi maupun produktifitas tenaga kerja. Jika tingkat teknologi yang kuasai penduduk tinggi maka struktur ekonomi juga akan bergerak pada sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi. Konsekuensinya kondisi perekonomian akan maju lebih cepat. Begitupula dengan kemampuan yang tinggi maka produktifitas tenaga kerja akan tinggi yang akan bermanfaat pada kesejahteraan individu maupun perbaikan kondisi secara makro.
2. Dimensi perumahan dan lingkungan serta kesehatan dan gizi, keduanya terkait pada level kesehatan penduduk. Jika kesehatan penduduk baik, maka produktifitas juga akan menjadi lebih baik. Selain itu sumber daya yang terbuang akibat keluhan kesehatan akan makin berkurang.
3. Dimensi Pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Ada pergeseran bahwa kemajuan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam (*natural resources*), namun lebih ditentukan oleh kemampuan SDM (*human capital*). Kondisi tersebut lebih mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Dimensi sosial budaya, kondisi sosial budaya diyakini merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Stabilitas, keamanan, saling percaya serta partisipasi penduduk

dalam kegiatan sosial merupakan beberapa aspek dalam kondisi sosial budaya. Aspek-aspek tersebut merupakan faktor pendorong bagi keberhasilan pembangunan dan keberadaannya lebih dikenal sebagai modal sosial (*Social Capital*).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan diantaranya adalah :

1. Penerapan metode taksonomik dapat memberikan sinyal atau peringatan dini tentang sejauh mana potensi perekonomian daerah seperti tercermin dalam berbagai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang berorientasi kepada rakyat. Secara sederhana, hasil indeks disparitas kesejahteraan atau tingkat hidup antar kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dijadikan sebuah alternatif pilihan dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan suatu daerah.
2. Dari sebanyak 34 variabel awal yang akan digunakan dalam menyusun indeks disparitas, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terpilih 17 variabel dari tujuh dimensi termasuk validator yang secara statistik layak digunakan untuk mengukur disparitas tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota.
3. Secara keseluruhan dimensi IDK diukur dengan menggunakan 17 variabel dengan tingkat reliabilitas 99 persen. Kota Padang, Kota Solok dan Padang Panjang tercatat sebagai daerah dengan peringkat terbaik IDK seluruh dimensi, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan Kepulauan Mentawai menempati peringkat terbawah. Hal yang diinginkan dari kabupaten/kota adalah posisi ideal, dimana daerah mampu mengoptimalkan

potensi dan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan tingkat hidup yang maksimal atau setidaknya tingkat hidup penduduk sejalan dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

4. Daerah yang berkategori sebagai kabupaten/kota yang efektif dalam penggunaan PDRB untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk adalah Kabupaten Dharmasraya, Padang Panjang, Kota Solok dan Payakumbuh. Daerah yang tidak optimal dalam pemanfaatan potensi perekonomian untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Limapuluh Kota dan Pasaman Barat.

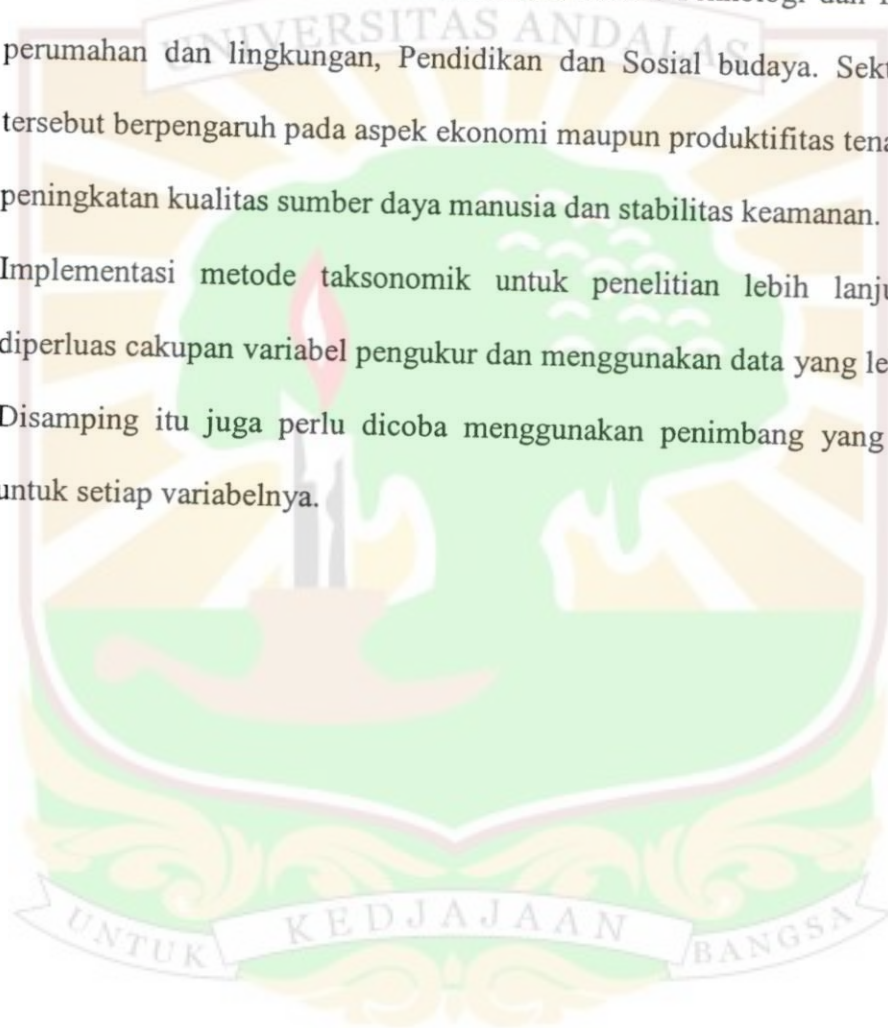
5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran kepada yang berkepentingan dalam pengelolaan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan bagi peneliti selanjutnya antara lain :

1. Program pembangunan harus memperhatikan aspek yang lebih luas bukan hanya sekedar meningkatkan PDRB dan pendapatan per kapita, karena tingginya pendapatan per kapita tidak selalu seirama dengan tingkat kesejahteraan penduduk.
2. Perlu adanya perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkan potensi perekonomian yang cukup besar dari suatu daerah sehingga mampu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Disparitas tingkat hidup terjadi karena kurang optimalnya suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi sementara ada daerah lain dengan

sumber perekonomian yang sangat terbatas mampu secara maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk.

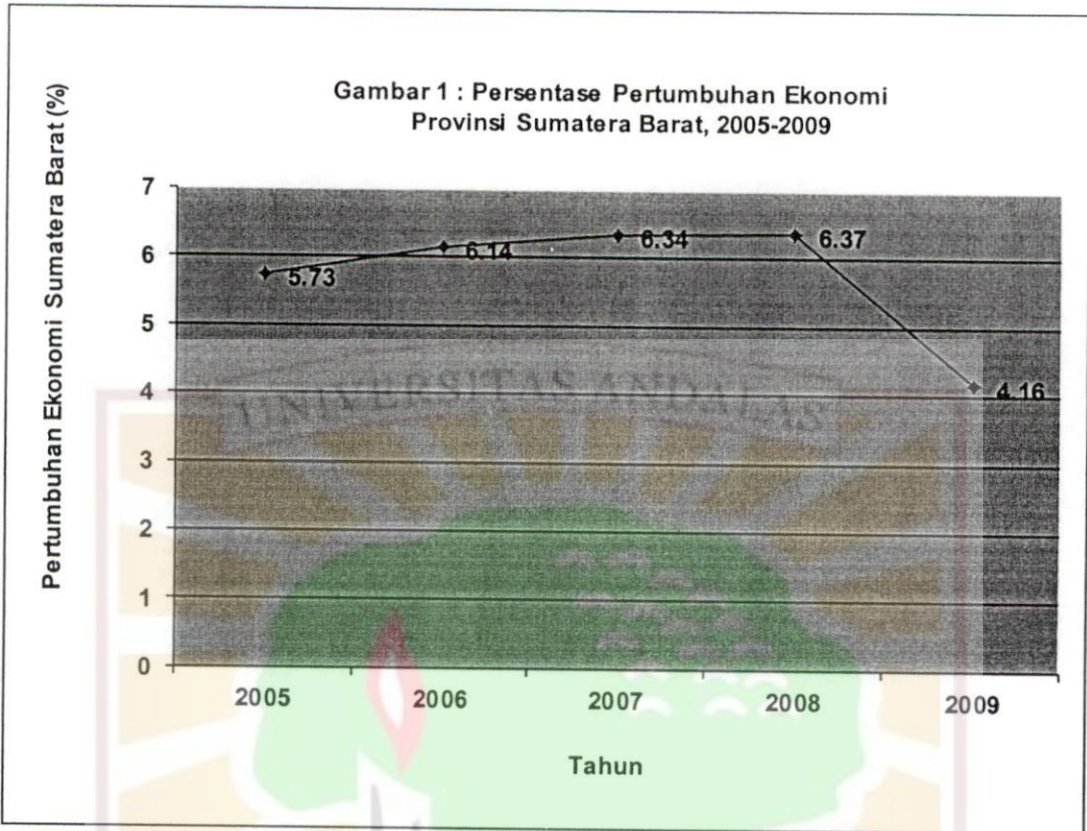
3. Untuk mengurangi adanya disparitas kesejahteraan atau tingkat hidup penduduk, ada 4 (empat) dimensi atau sektor yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi, dimana ke empat sektor tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Sektor dimaksud adalah Teknologi dan Informasi, perumahan dan lingkungan, Pendidikan dan Sosial budaya. Sektor-sektor tersebut berpengaruh pada aspek ekonomi maupun produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas keamanan.
4. Implementasi metode taksonomik untuk penelitian lebih lanjut, perlu diperluas cakupan variabel pengukur dan menggunakan data yang lebih baru. Disamping itu juga perlu dicoba menggunakan penimbang yang berbeda untuk setiap variabelnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Arief, Sritua. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2008. Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2009. Jakarta : BPS.
- 2009. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009. Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat.
- 2010. PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2010. Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat.
- 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional Sumatera Barat Tahun 2009. Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat.
- 2009. Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat Tahun 2009. Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat.
- 2009. Ketenagakerjaan di Sumatera Barat Tahun 2009. Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat.
- 1998. Kumpulan Bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS], Bappenas, UNDP. 2004. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004. Jakarta : BPS, Bappenas, UNDP.
- Barrios, Salvatore & Eric Strobl. 2006. The Dynamics of Regional Inequalities : European Economy, Economic Paper. July 2005. Brussel.
- Carmines J. Edward and Richard A. Zeller. Realibility and Validity Assesment Vol. 17. A Sage University Paper : USA
- Candranita, Kusharianingsih. 2009. Pengantar Statistik Sosial. 2007. Jakarta : UT
- Gujarati, Damodar. 2008. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta : Erlangga

- Islam, Iyanatul and Habibullah Khan . 1989. Regional Disparities in Basic, Needs and Poverty in Indonesia. Department of Economics. Singapore
- Lessman, Christian. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Disparity : A Panel Data Approach for OECD Countries.
- Liang, Zhicheng. 2005. Financial Development, Growth and Regional Disparity in Post-reform China. France. Centre d'Etudes et de Recherches sur le Developpement International (CERDI), Universite d'Auvergne.
- Mardiana. 2006. Disparitas Pembangunan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Banten Terhadap Kota Tangerang SEbelum dan Sesudah Banten Menjadi Provinsi [Skripsi]. Jakarta : STIS
- Naibaho, Marlina. 2003. Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Sosial Ekonomi Tahun 2001 [Skripsi]. Jakarta. STIS
- Noegroho, Yoenanto Sinung dan Lana Soelistianingsih. 2007. Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional. Jakarta : Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Panorama, Maya. 2003. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan [Tesis]. Palembang : Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- PPSK Bank Indonesia – LP3E FE Unpad. 2008. Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang : Baduose Media.
- Sjafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Padang : Praninta Offset.
- Soepranto, J. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta : Erlangga
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarsih, Wachyu dkk. 2000. Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi. Jakarta : BPS.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat



**Tabel A.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Nominal) dan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (PDRB Riil)
Menurut Kabupaten/Kota, 2009****

Kode	Kabupaten/Kota	PDRB Nominal		PDRB Nominal per Kapita (juta Rp)
		Jumlah (Juta Rp)	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	1,294,918.53	1.70	18.78
02	Pesisir Selatan	4,080,689.70	5.36	9.10
03	Solok	4,639,066.33	6.09	12.89
04	Sijunjung	2,712,528.65	3.56	13.11
05	Tanah Datar	4,844,419.12	6.36	14.39
06	Padang Pariaman	5,593,875.62	7.34	14.35
07	Agam	5,821,983.04	7.64	13.50
08	Limapuluh Kota	5,528,842.99	7.26	16.56
09	Pasaman	2,889,122.78	3.79	11.04
10	Solok Selatan	1,220,622.65	1.60	9.12
11	Dharmasraya	2,346,484.20	3.08	12.59
12	Pasaman Barat	5,517,733.25	7.24	16.30
71	Padang	21,837,054.01	28.67	24.94
72	Solok	981,609.60	1.29	16.40
73	Sawahlunto	976,280.96	1.28	17.85
74	Padang Panjang	852,202.50	1.12	15.09
75	Bukittinggi	1,881,187.92	2.47	17.45
76	Payakumbuh	1,653,091.47	2.17	15.46
77	Pariaman	1,488,216.45	1.95	21.04
	Sumatera Barat	76,159,929.77	100.00	15.77

Sumber : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000, 2005 - 2009

***) Angka sementara

**Tabel A.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Nominal) dan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (PDRB Riil)
Menurut Kabupaten/Kota, 2009****

Lanjutan

Kode	Kabupaten/Kota	PDRB Riil		PDRB Riil per Kapita (juta Rp)
		Jumlah (Juta Rp)	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	509,396.33	1.36	7.39
02	Pesisir Selatan	2,002,248.56	5.35	4.46
03	Solok	2,047,621.51	5.47	5.69
04	Sijunjung	1,273,140.01	3.40	6.15
05	Tanah Datar	2,468,737.03	6.60	7.33
06	Padang Pariaman	2,749,336.74	7.35	7.05
07	Agam	2,929,871.69	7.83	6.80
08	Limapuluh Kota	2,684,575.15	7.18	8.04
09	Pasaman	1,289,261.24	3.45	4.93
10	Solok Selatan	614,813.74	1.64	4.59
11	Dharmasraya	1,088,105.30	2.91	5.84
12	Pasaman Barat	2,544,855.11	6.80	7.52
71	Padang	11,345,637.06	30.33	12.96
72	Solok	497,623.06	1.33	8.32
73	Sawahlunto	494,392.38	1.32	9.04
74	Padang Panjang	396,823.88	1.06	7.02
75	Bukittinggi	969,590.89	2.59	8.99
76	Payakumbuh	818,071.97	2.19	7.65
77	Pariaman	685,632.24	1.83	9.69
	Sumatera Barat	37,409,733.88	100.00	7.75

Sumber : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000, 2005 - 2009

**) Angka sementara

Tabel A.2. Data Dimensi Kesehatan dan Gizi Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup ^{a)} (tahun)	Persentase Balita Kelahiran Terakhir Ditolong Tenaga Medis ^{b)}	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita/hari ^{c)} (kkal)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	68.36	44.66	1,855.98
02	Pesisir Selatan	67.03	92.03	2,226.11
03	Solok	66.25	79.41	2,302.75
04	Sijunjung	66.58	76.94	2,262.45
05	Tanah Datar	70.58	90.54	2,302.71
06	Padang Pariaman	68.28	90.53	2,289.37
07	Agam	68.85	92.94	2,139.43
08	Limapuluh Kota	68.08	95.73	2,182.15
09	Pasaman	67.10	77.24	2,616.67
10	Solok Selatan	64.48	69.92	2,338.78
11	Dharmasraya	65.75	84.26	2,366.57
12	Pasaman Barat	64.88	85.14	2,559.50
71	Padang	70.64	98.07	1,952.09
72	Solok	69.51	98.58	2,230.76
73	Sawahlunto	71.44	97.03	2,268.15
74	Padang Panjang	70.95	100.00	2,161.81
75	Bukittinggi	71.37	99.48	2,183.16
76	Payakumbuh	70.46	99.86	2,111.50
77	Pariaman	68.79	97.49	2,180.80

Sumber : ^{a)} Indeks Pembangunan Manusia 2009

^{b)} Diolah dari Susenas KOR, 2009

^{c)} Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sumatera Barat, 2008

Tabel A.3. Data Dimensi Pendidikan Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk usia di atas 15 thn Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Persentase Penduduk > 10 th Menamatkan Pendidikan Diploma ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	92.44	6.51	2.52
02	Pesisir Selatan	93.32	7.84	3.60
03	Solok	97.11	7.54	5.77
04	Sijunjung	93.42	7.43	6.00
05	Tanah Datar	96.64	8.23	6.01
06	Padang Pariaman	94.47	7.25	4.37
07	Agam	97.84	8.27	5.51
08	Limapuluh Kota	98.71	7.80	4.97
09	Pasaman	98.40	7.58	5.42
10	Solok Selatan	97.38	7.76	4.25
11	Dharmasraya	95.83	7.66	4.30
12	Pasaman Barat	98.18	7.98	4.56
71	Padang	99.49	10.89	14.36
72	Solok	98.51	10.29	13.17
73	Sawahlunto	98.50	9.13	7.28
74	Padang Panjang	99.29	10.22	11.81
75	Bukittinggi	99.55	10.47	12.65
76	Payakumbuh	99.17	9.46	11.14
77	Pariaman	98.36	9.73	13.60

Sumber: ^{a)} Indeks Pembangunan Manusia 2009

^{b)} Diolah dari Susenas KOR, 2009

Tabel A.3. Data Dimensi Pendidikan Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Lanjutan

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
		7 - 12 thn	13 - 15 thn	16 - 18 thn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	88.31	86.69	66.11
02	Pesisir Selatan	98.59	94.83	68.22
03	Solok	97.32	86.97	60.90
04'	Sijunjung	98.88	88.20	51.15
05	Tanah Datar	98.75	90.49	62.06
06	Padang Pariaman	98.85	88.71	71.43
07	Agam	95.38	82.67	65.15
08	Limapuluh Kota	98.44	84.13	53.13
09	Pasaman	97.64	84.85	49.05
10	Solok Selatan	98.41	90.53	64.88
11	Dharmasraya	97.32	88.19	55.51
12	Pasaman Barat	98.12	78.86	56.15
71	Padang	99.19	92.46	75.44
72	Solok	99.58	90.30	76.02
73	Sawahlunto	99.51	95.82	78.04
74	Padang Panjang	99.02	94.40	75.38
75	Bukittinggi	98.30	91.56	74.58
76	Payakumbuh	98.29	94.71	77.01
77	Pariaman	99.28	95.78	75.01

Sumber ^{b)} Diolah dari Susenas KOR, 2009

Tabel A.4. Data Dimensi Ekonomi Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita/bulan ^{a)} (Rp)	Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan ^{b)} (Rp.000)	Rasio 20 persen Penduduk antara Pengeluaran Tertinggi dan Terendah ^{c)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	275,759.00	606.23	9.87
02	Pesisir Selatan	362,835.06	628.93	3.31
03	Solok	451,977.53	623.85	3.61
04'	Sijunjung	451,001.33	632.74	3.35
05	Tanah Datar	434,635.26	628.06	4.00
06	Padang Pariaman	472,015.89	629.28	4.23
07	Agam	378,112.95	628.31	9.51
08	Limapuluh Kota	400,206.86	608.70	6.62
09	Pasaman	360,802.69	638.48	7.52
10	Solok Selatan	379,334.88	611.11	7.43
11	Dharmasraya	459,789.27	606.62	6.93
12	Pasaman Barat	415,081.78	619.52	6.67
71	Padang	607,979.13	644.31	7.17
72	Solok	567,066.88	632.50	5.96
73	Sawahlunto	480,303.27	623.01	5.96
74	Padang Panjang	566,769.64	645.60	6.04
75	Bukittinggi	665,458.25	648.49	6.42
76	Payakumbuh	596,007.06	633.52	4.97
77	Pariaman	598,203.42	628.14	5.91

Sumber ^{a)} Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Barat, 2009

^{b)} Indeks Pembangunan Manusia, 2009

^{c)} Diolah dari Susenas KOR, 2009

Tabel A.4. Data Dimensi Ekonomi Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Lanjutan

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan ^{a)}	Persentase Pengeluaran Non Makanan ^{b)}	Rata-rata Upah Buruh/ Karyawan/Pegawai ^{c)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	79.46	26.95	1,715,300.00
02	Pesisir Selatan	89.44	32.02	1,610,563.00
03	Solok	87.85	39.80	1,094,431.00
04	Sijunjung	90.20	40.08	1,138,916.00
05	Tanah Datar	93.07	38.67	1,576,116.00
06	Padang Pariaman	87.59	41.95	1,327,373.00
07	Agam	90.14	38.54	1,387,895.00
08	Limapuluh Kota	90.02	35.80	1,427,050.00
09	Pasaman	87.53	34.20	1,294,897.00
10	Solok Selatan	88.34	41.34	1,138,302.00
11	Dharmasraya	88.60	43.38	1,183,328.00
12	Pasaman Barat	90.39	40.47	1,392,268.00
71	Padang	94.28	46.46	1,699,951.00
72	Solok	93.24	44.91	1,487,792.00
73	Sawahlunto	97.58	41.01	1,683,351.00
74	Padang Panjang	92.42	45.07	1,608,481.00
75	Bukittinggi	93.81	49.68	1,437,729.00
76	Payakumbuh	89.85	45.60	1,503,825.00
77	Pariaman	94.52	46.15	1,407,548.00

Sumber ^{a)} Data dan Informasi Kemiskinan

^{c)} Keadaan Pekerja di Sumatera Barat, 2009

Tabel A.5. Data Dimensi Ketenagakerjaan Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ^{a)}	Persentase Penduduk 15 th Ke atas Yang Bekerja ^{a)}	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	74.21	70.06	94.41
02	Pesisir Selatan	62.14	56.10	90.28
03	Solok	67.74	64.68	95.49
04'	Sijunjung	68.23	64.81	94.99
05	Tanah Datar	66.56	63.42	95.29
06	Padang Pariaman	65.57	61.28	93.46
07	Agam	67.59	65.04	96.22
08	Limapuluh Kota	72.19	67.79	93.91
09	Pasaman	65.04	61.12	93.98
10	Solok Selatan	63.95	58.26	91.10
11	Dharmasraya	64.35	61.03	94.85
12	Pasaman Barat	65.73	61.71	93.89
71	Padang	54.95	46.23	84.14
72	Solok	58.85	52.19	88.69
73	Sawahlunto	58.63	49.21	83.93
74	Padang Panjang	64.47	57.38	89.00
75	Bukittinggi	69.22	63.12	91.19
76	Payakumbuh	69.17	63.49	91.79
77	Pariaman	63.96	58.45	91.38

Sumber : ^{a)} Keadaan Angkatan Kerja di Sumatera Barat, 2009

Tabel A.5. Data Dimensi Ketenagakerjaan Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Lanjutan

Kode	Kabupaten/Kota	Rata-rata Jam Kerja Buruh/Karyawan/ Pekerja seminggu Yang lalu ^{b)}	Persentase Pekerja di Sektor Formal ^{a)}	Persentase Pekerja di Sektor Non Pertanian ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	37.05	6.42	11.70
02	Pesisir Selatan	36.93	12.92	44.49
03	Solok	36.61	24.15	35.37
04'	Sijunjung	37.18	22.50	49.17
05	Tanah Datar	38.83	20.12	48.66
06	Padang Pariaman	38.90	19.00	57.11
07	Agam	35.23	20.21	53.78
08	Limapuluh Kota	40.87	14.29	43.81
09	Pasaman	36.30	16.80	31.45
10	Solok Selatan	37.73	21.63	34.78
11	Dharmasraya	38.02	29.26	36.40
12	Pasaman Barat	39.29	18.63	26.87
71	Padang	44.44	47.85	93.11
72	Solok	49.69	52.96	87.88
73	Sawahlunto	38.66	37.69	80.75
74	Padang Panjang	43.41	43.43	90.85
75	Bukittinggi	46.69	40.27	95.07
76	Payakumbuh	36.63	38.47	82.49
77	Pariaman	35.99	36.81	82.26

Sumber ^{a)} Keadaan Angkatan Kerja di Sumatera Barat, 2009

^{b)} Keadaan Pekerja di Sumatera Barat, 2009

Tabel A.6. Data Dimensi Sosial dan Budaya Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk usia 10 thn ke atas		
		Menonton Televisi Seminggu Yang lalu (3)	Membaca Surat Kabar/Majalah Seminggu Yang lalu (4)	Melakukan Olahraga Seminggu Yang lalu (5)
01	Kepulauan Mentawai	41.14	3.96	20.97
02	Pesisir Selatan	88.46	9.37	23.63
03	Solok	86.29	16.98	22.44
04	Sijunjung	89.13	16.48	21.17
05	Tanah Datar	86.58	17.78	23.80
06	Padang Pariaman	84.14	20.33	27.51
07	Agam	84.16	11.71	17.96
08	Limapuluh Kota	88.66	18.82	21.25
09	Pasaman	78.95	16.10	20.80
10	Solok Selatan	83.47	14.11	20.02
11	Dharmasraya	92.32	18.85	25.86
12	Pasaman Barat	86.89	14.11	17.71
71	Padang	95.99	35.50	25.94
72	Solok	93.38	43.94	29.69
73	Sawahlunto	91.46	26.74	27.19
74	Padang Panjang	92.89	27.02	27.58
75	Bukittinggi	97.43	41.02	31.73
76	Payakumbuh	93.86	38.17	31.84
77	Pariaman	91.68	36.94	38.23

Sumber Diolah dari Susenas

Tabel A.7. Data Dimensi Perumahan dan Lingkungan Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga			
		Menggunakan Listrik sbg Sumber Penerangan Rumah	Memiliki Akses Terhadap Air Bersih	Memiliki Lantai Rumah Sebagian Besar Bukan Tanah	Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Milik Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kepulauan Mentawai	29.68	11.36	94.70	19.92
02	Pesisir Selatan	86.82	72.89	94.53	41.51
03	Solok	85.79	74.03	96.94	36.70
04'	Sijunjung	88.47	59.35	96.69	44.22
05	Tanah Datar	91.81	70.58	98.54	53.77
06	Padang Pariaman	90.68	62.65	99.26	47.92
07	Agam	91.68	76.48	98.31	55.07
08	Limapuluh Kota	90.58	75.19	98.70	40.09
09	Pasaman	78.60	61.21	96.00	25.34
10	Solok Selatan	84.34	71.67	97.39	33.73
11	Dharmasraya	91.82	81.21	92.72	60.78
12	Pasaman Barat	82.27	56.49	97.75	40.45
71	Padang	98.31	96.59	97.68	72.08
72	Solok	98.42	97.11	96.21	75.63
73	Sawahlunto	92.76	83.02	98.69	75.78
74	Padang Panjang	97.39	96.89	95.84	74.25
75	Bukittinggi	98.75	91.67	99.16	79.18
76	Payakumbuh	97.74	92.46	98.23	74.24
77	Pariaman	98.58	88.85	98.77	74.90

Sumber: Diolah dari Susenas

Tabel A.7. Data Dimensi Perumahan dan Lingkungan Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Lanjutan

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga		
		Memiliki Tangki Septik Sebagai Tempat Pembuangan Akhir	Dengan Luas Lantai per Kapita > 8 m ²	Memiliki Dinding Rumah Tembok
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	8.28	69.29	10.59
02	Pesisir Selatan	32.70	85.52	62.42
03	Solok	30.93	74.87	65.41
04'	Sijunjung	27.75	80.41	65.16
05	Tanah Datar	32.66	82.92	74.16
06	Padang Pariaman	23.45	87.75	85.64
07	Agam	43.19	88.50	62.58
08	Limapuluh Kota	26.93	81.84	70.24
09	Pasaman	26.70	74.47	65.08
10	Solok Selatan	22.92	74.16	61.45
11	Dharmasraya	47.67	88.68	69.46
12	Pasaman Barat	17.24	72.87	50.35
71	Padang	73.81	88.17	83.55
72	Solok	83.01	75.90	75.42
73	Sawahlunto	54.83	77.81	77.01
74	Padang Panjang	55.45	83.10	73.59
75	Bukittinggi	85.84	79.39	73.77
76	Payakumbuh	70.16	85.90	74.94
77	Pariaman	67.72	92.18	85.75

Sumber: Diolah dari Susenas

Tabel A.8. Data Dimensi Teknologi dan Informasi Dirinci Menurut Kabupaten dan Jenis Variabel, 2009

Kode	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga		
		Memiliki Telepon Seluler	Memiliki Komputer (desktop, laptop, notebook)	Mengakses Internet selama Sebulan yang Lalu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kepulauan Mentawai	13.75	2.19	0.00
02	Pesisir Selatan	49.09	5.11	1.79
03	Solok	62.75	8.57	10.72
04'	Sijunjung	57.30	5.44	6.87
05	Tanah Datar	59.89	11.27	9.92
06	Padang Pariaman	69.31	7.65	12.42
07	Agam	67.28	5.13	6.28
08	Limapuluh Kota	61.81	6.53	6.50
09	Pasaman	49.45	2.13	4.48
10	Solok Selatan	50.63	5.33	8.30
11	Dharmasraya	69.74	5.94	4.74
12	Pasaman Barat	52.15	5.86	5.39
71	Padang	84.46	21.66	32.94
72	Solok	80.55	26.35	31.45
73	Sawahlunto	75.35	30.12	20.45
74	Padang Panjang	81.46	20.25	25.98
75	Bukittinggi	89.60	23.56	38.36
76	Payakumbuh	85.50	22.08	27.13
77	Pariaman	82.61	30.80	34.32

Sumber Diolah dari Susenas

Tabel A.9. Hasil Perhitungan Indeks Komposit Disparitas Kabupaten/Kota

Provinsi	Dimensi Kesehatan & Gizi			Dimensi Pendidikan		
	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Mentawai	0.90884	0.42996	19	1.07525	0.31830	19
02 Pesisir Selatan	0.10273	0.04860	10	0.85658	0.25357	17
03 Solok	0.31754	0.15022	15	0.80410	0.23803	12
04 Sijunjung	0.35952	0.17009	17	0.81104	0.24008	13
05 Tanah Datar	0.12823	0.06066	11	0.70119	0.20757	8
06 Padang Pariaman	0.12834	0.06072	12	0.89961	0.26630	18
07 Agam	0.08731	0.04131	9	0.71811	0.21257	9
08 Limapuluh Kota	0.03987	0.01886	8	0.80129	0.23720	11
09 Pasaman	0.35451	0.16771	16	0.81228	0.24045	14
10 Solok Selatan	0.47902	0.22662	18	0.83745	0.24790	15
11 Dharmasraya	0.23494	0.11115	14	0.84804	0.25104	16
12 Pasaman Barat	0.22006	0.10411	13	0.79627	0.23571	10
71 Padang	0.00000	0.00000	1	0.00000	0.00000	1
72 Solok	0.00868	0.00410	2	0.13152	0.03893	3
73 Sawahlunto	0.01767	0.00836	4	0.53501	0.15837	7
74 Padang Panjang	0.03282	0.01553	7	0.19678	0.05825	4
75 Bukittinggi	0.02404	0.01137	5	0.12866	0.03808	2
76 Payakumbuh	0.03037	0.01437	6	0.32661	0.09668	6
77 Pariaman	0.00988	0.00468	3	0.21813	0.06457	5

Tabel A.9. Hasil Perhitungan Indeks Komposit Disparitas Kabupaten/Kota

Lanjutan

Provinsi	Dimensi Ekonomi			Dimensi Ketenagakerjaan		
	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Mentawai	1.11776	0.37609	19	1.05062	0.33561	19
02 Pesisir Selatan	0.82617	0.27798	18	0.76930	0.24575	16
03 Solok	0.45176	0.15200	11	0.67595	0.21593	13
04 Sijunjung	0.44615	0.15012	10	0.60666	0.19379	8
05 Tanah Datar	0.51250	0.17244	13	0.64258	0.20527	12
06 Padang Pariaman	0.36184	0.12175	8	0.61459	0.19633	11
07 Agam	0.61848	0.20810	15	0.61323	0.19589	9
08 Limapuluh Kota	0.65199	0.21937	16	0.75280	0.24048	15
09 Pasaman	0.76331	0.25683	17	0.79152	0.25285	17
10 Solok Selatan	0.56016	0.18848	14	0.70960	0.22668	14
11 Dharmasraya	0.35924	0.12087	7	0.61384	0.19608	10
12 Pasaman Barat	0.50439	0.16971	12	0.79917	0.25529	18
71 Padang	0.00000	0.00000	1	0.00000	0.00000	1
72 Solok	0.11343	0.03817	5	0.10372	0.03313	3
73 Sawahlunto	0.36971	0.12440	9	0.21492	0.06866	6
74 Padang Panjang	0.11019	0.03708	4	0.08238	0.02632	2
75 Bukittinggi	0.18854	0.06344	6	0.13799	0.04408	4
76 Payakumbuh	0.04544	0.01529	3	0.19478	0.06222	5
77 Pariaman	0.02570	0.00865	2	0.22225	0.07099	7

Tabel A.9. Hasil Perhitungan Indeks Komposit Disparitas Kabupaten/Kota

Lanjutan

Provinsi	Dimensi Sosial & Budaya			Dimensi Perumahan & Lingkungan		
	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Mentawai	1.27512	0.47824	19	1.71828	0.42499	19
02 Pesisir Selatan	0.56285	0.21110	14	0.64994	0.16075	11
03 Solok	0.45093	0.16912	11	0.69603	0.17215	13
04 Sijunjung	0.46234	0.17340	12	0.73930	0.18286	15
05 Tanah Datar	0.41714	0.15645	9	0.57099	0.14123	10
06 Padang Pariaman	0.39376	0.14768	8	0.71994	0.17807	14
07 Agam	0.64434	0.24166	18	0.45296	0.11203	9
08 Limapuluh Kota	0.42419	0.15909	10	0.67563	0.16711	12
09 Pasaman	0.56655	0.21248	16	0.90622	0.22414	18
10 Solok Selatan	0.56591	0.21225	15	0.78659	0.19455	16
11 Dharmasraya	0.34745	0.13031	7	0.36239	0.08963	8
12 Pasaman Barat	0.59645	0.22370	17	0.87101	0.21543	17
71 Padang	0.00000	0.00000	1	0.00000	0.00000	1
72 Solok	0.24485	0.09183	4	0.10286	0.02544	3
73 Sawahlunto	0.20721	0.07771	3	0.26681	0.06599	7
74 Padang Panjang	0.19744	0.07405	2	0.18785	0.04646	6
75 Bukittinggi	0.28182	0.10570	6	0.16055	0.03971	5
76 Payakumbuh	0.27073	0.10154	5	0.06693	0.01655	2
77 Pariaman	0.55233	0.20715	13	0.11488	0.02841	4

Tabel A.9. Hasil Perhitungan Indeks Komposit Disparitas Kabupaten/Kota

Lanjutan

Provinsi	Dimensi Teknologi & Informasi			Keseluruhan			PDRB		
	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Mentawai	1.19767	0.36415	19	3.21686	0.40944	19	0.37473	0.14477	3
02 Pesisir Selatan	0.84074	0.25562	18	1.86138	0.23692	17	0.96305	0.37206	19
03 Solok	0.59158	0.17987	10	1.56403	0.19907	12	0.73241	0.28296	15
04 Sijunjung	0.71550	0.21754	14	1.62061	0.20627	13	0.71950	0.27797	14
05 Tanah Datar	0.59102	0.17970	9	1.42584	0.18148	9	0.64127	0.24775	11
06 Padang Pariaman	0.54569	0.16592	8	1.51841	0.19326	10	0.64364	0.24866	12
07 Agam	0.67419	0.20499	11	1.53517	0.19540	11	0.69530	0.26862	13
08 Limapuluh Kota	0.67969	0.20666	13	1.65343	0.21045	14	0.50964	0.19689	6
09 Pasaman	0.84042	0.25553	17	1.96039	0.24952	18	0.84474	0.32636	17
10 Solok Selatan	0.74593	0.22680	15	1.80097	0.22923	15	0.96161	0.37151	18
11 Dharmasraya	0.67572	0.20545	12	1.41027	0.17950	8	0.75072	0.29003	16
12 Pasaman Barat	0.76403	0.23230	16	1.80934	0.23029	16	0.52545	0.20300	8
71 Padang	0.00000	0.00000	1	0.00000	0.00000	1	0.00000	0.00000	1
72 Solok	0.12535	0.03811	3	0.35671	0.04540	2	0.51892	0.20048	7
73 Sawahlunto	0.33066	0.10054	7	0.83240	0.10595	7	0.43089	0.16647	4
74 Padang Panjang	0.14059	0.04275	5	0.39085	0.04975	3	0.59911	0.23146	10
75 Bukittinggi	0.12980	0.03947	4	0.44019	0.05603	4	0.45538	0.17593	5
76 Payakumbuh	0.11056	0.03362	2	0.48744	0.06204	5	0.57621	0.22261	9
77 Pariaman	0.21957	0.06676	6	0.68133	0.08672	6	0.23702	0.09157	2

MACRO PROGRAM MATLAB UNTUK PENGOLAHAN INDEKS DISPARITAS SUMATERA BARAT

```

function indeks(disparitas)

% VARIABEL DIMENSI KESEHATAN & GIZI
x101=disparitas(:,1);
x102=disparitas(:,2);
x103=disparitas(:,3);

% VARIABEL DIMENSI PENDIDIKAN
x201=disparitas(:,4);
x202=disparitas(:,5);
x203=disparitas(:,6);
x204=disparitas(:,7);
x205=disparitas(:,8);
x206=disparitas(:,9);

% VARIABEL DIMENSI EKONOMI
x301=disparitas(:,10);
x302=disparitas(:,11);
x303=disparitas(:,12);
x304=disparitas(:,13);
x305=disparitas(:,14);
x306=disparitas(:,15);

% VARIABEL DIMENSI KETENAGAKERJAAN
x401=disparitas(:,16);
x402=disparitas(:,17);
x403=disparitas(:,18);
x404=disparitas(:,19);
x405=disparitas(:,20);
x406=disparitas(:,21);

% VARIABEL DIMENSI SOSBUD
x501=disparitas(:,22);
x502=disparitas(:,23);
x503=disparitas(:,24);

% VARIABEL DIMENSI PERUMAHAN & LINGKUNGAN
x601=disparitas(:,25);
x602=disparitas(:,26);
x603=disparitas(:,27);
x604=disparitas(:,28);
x605=disparitas(:,29);
x606=disparitas(:,30);

```



```
x607=disparitas(:,31);
```

```
% VARIABEL DIMENSI TEKNOLOGI & INFORMASI
```

```
x701=disparitas(:,32);
```

```
x702=disparitas(:,33);
```

```
x703=disparitas(:,34);
```

```
% VARIABEL PDRB
```

```
x801=disparitas(:,35);
```

```
%---1. UJI VALIDITAS ---
```

```
X11=[x101, x102, x103];
```

```
X21=[x201, x202, x203, x204, x205, x206];
```

```
X31=[x301, x302, x303, x304, x306];
```

```
X41=[x401, x402, x403, x404, x405, x406];
```

```
X51=[x501, x502, x503];
```

```
X61=[x601, x602, x603, x604, x605, x606, x607];
```

```
X71=[x701, x702, x703];
```

```
T1=[X11, X21, X31, X41, X51, X61, X71];
```

```
[Rv1,Pv1]=corr(x305,T1,'type','spearman','rows','all','tail','ne');
```

```
filename=['Validitas' '.xls'];
```

```
fin=fopen(filename,'w');
```

```
fprintf(fin,'%20.5f\t%20.5f\r\n',[Rv1', Pv1']');
```

```
fclose(fin);
```

```
fprintf(1,['Nilai Rv1 & Pv1 tersimpan dalam file' filename]);
```

```
% --- 2. UJI RELIABILITAS
```

```
% --- 2.1. UJI RELIABILITAS PER DIMENSI
```

```
%--- 2.1.1 UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI KESEHATAN & GIZI, TAHAP 1 ---
```

```
X12=[x101, x102];
```

```
[Rr11]=abs(corr(X12,X12,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd11=Rr11-diag(diag(Rr11),0);
```

```
k11=length(Rd11(:,1));
```

```
rij11=(sum(sum(Rd11)))/(k11*(k11-1));
```

```
rkk11=(k11*rij11)/(1+(k11-1)*rij11);
```

```
ri11=(sum(Rd11)')/(k11-1);
```



```
TAU1rij=sqrt((sum(sum(Rd11.^2))-(k11*(k11-1))*(mean(mean(Rd11))*k11^2/(k11*(k11-1)))^2)/(k11*(k11-1)));
DEV1rij=rij11-TAU1rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Kesehatan_T1' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri11; DEV1rij; rkk11; k11]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri11, DEV1rij, rkk11, & k11 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.2.1 UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI PENDIDIKAN, TAHAP 1 ---

```
X22=[x201, x202, x203, x204, x205, x206];
```

```
[Rr21]=abs(corr(X22,X22,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd21=Rr21-diag(diag(Rr21),0);
k21=length(Rd21(:,1));
rij21=(sum(sum(Rd21)))/(k21*(k21-1));
rkk21=(k21*rij21)/(1+(k21-1)*rij21);
```

```
ri21=(sum(Rd21))/(k21-1);
```

```
TAU2rij=sqrt((sum(sum(Rd21.^2))-(k21*(k21-1))*(mean(mean(Rd21))*k21^2/(k21*(k21-1)))^2)/(k21*(k21-1)));
DEV2rij=rij21-TAU2rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Pendidikan_T1' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri21; DEV2rij; rkk21; k21]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri21, DEV2rij, rkk21, & k21 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.3.1 UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI EKONOMI, TAHAP 1 ---

```
X32=[x301, x302, x304, x305];
```

```
[Rr31]=abs(corr(X32,X32,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd31=Rr31-diag(diag(Rr31),0);
k31=length(Rd31(:,1));
rij31=(sum(sum(Rd31)))/(k31*(k31-1));
rkk31=(k31*rij31)/(1+(k31-1)*rij31);
```

```
ri31=(sum(Rd31))/(k31-1);
```

```
TAU31rij=sqrt((sum(sum(Rd31.^2))-(k31*(k31-1))*(mean(mean(Rd31))*k31^2/(k31*(k31-1)))^2)/(k31*(k31-1)));
DEV31rij=rij31-TAU31rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Ekonomi_T1' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri31; DEV31rij; rkk31; k31]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri31, DEV31rij, rkk31, & k31 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.4.1 UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI KETENAGAKERJAAN, TAHAP 1 -

```
X42=[x402, x403, x404, x405, x406];
```

```
[Rr41]=abs(corr(X42,X42,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd41=Rr41-diag(diag(Rr41),0);
k41=length(Rd41(:,1));
rij41=(sum(sum(Rd41)))/(k41*(k41-1));
rkk41=(k41*rij41)/(1+(k41-1)*rij41);
```

```
ri41=(sum(Rd41)')/(k41-1);
```

```
TAU41rij=sqrt((sum(sum(Rd41.^2))-(k41*(k41-1))*(mean(mean(Rd41))*k41^2/(k41*(k41-1)))^2)/(k41*(k41-1)));
DEV41rij=rij41-TAU41rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Ketenagakerjaan_T1' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri41; DEV41rij; rkk41; k41]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri41, DEV41rij, rkk41, & k41 tersimpan dalam file' filename]);
```

%--- 2.5.1 UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI SOSIAL & BUDAYA, TAHAP 1 ---

```
X52=[x501, x502, x503];
```

```
[Rr51]=abs(corr(X52,X52,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd51=Rr51-diag(diag(Rr51),0);
k51=length(Rd51(:,1));
rij51=(sum(sum(Rd51)))/(k51*(k51-1));
```

```
rkk51=(k51*rij51)/(1+(k51-1)*rij51);
```

```
ri51=(sum(Rd51'))/(k51-1);
```

```
TAU51rij=sqrt((sum(sum(Rd51.^2))-(k51*(k51-1))*(mean(mean(Rd51))*k51^2/(k51*(k51-1)))^2)/(k51*(k51-1)));  
DEV51rij=rij51-TAU51rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Sosial_T1' '.xls'];  
fin=fopen(filename,'w');  
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri51; DEV51rij; rkk51; k51]);  
fclose(fin);  
fprintf(1,['Nilai ri51, DEV51rij, rkk51, & k51 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.6.1. UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI PERUMAHAN & LINGKUNGAN, TAHAP 1 ---

```
X62=[x601, x602, x604, x605, x606, x607];
```

```
[Rr61]=abs(corr(X62,X62,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd61=Rr61-diag(diag(Rr61),0);  
k61=length(Rd61(:,1));  
rij61=(sum(sum(Rd61)))/(k61*(k61-1));  
rkk61=(k61*rij61)/(1+(k61-1)*rij61);
```

```
ri61=(sum(Rd61'))/(k61-1);
```

```
TAU61rij=sqrt((sum(sum(Rd61.^2))-(k61*(k61-1))*(mean(mean(Rd61))*k61^2/(k61*(k61-1)))^2)/(k61*(k61-1)));  
DEV61rij=rij61-TAU61rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Perumahan_T1' '.xls'];  
fin=fopen(filename,'w');  
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri61; DEV61rij; rkk61; k61]);  
fclose(fin);  
fprintf(1,['Nilai ri61, DEV61rij, rkk61, & k61 tersimpan dalam file' filename]);
```

%--- 2.6.2. UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI PERUMAHAN & LINGKUNGAN, TAHAP 2 ---

```
X63=[x601, x602, x604, x605, x607];
```

```
[Rr62]=abs(corr(X63,X63,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd62=Rr62-diag(diag(Rr62),0);
```



```

k62=length(Rd62(:,1));
rij62=(sum(sum(Rd62)))/(k62*(k62-1));
rkk62=(k62*rij62)/(1+(k62-1)*rij62);

ri62=(sum(Rd62))/(k62-1);

TAU62rij=sqrt((sum(sum(Rd62.^2))-(k62*(k62-
1))*(mean(mean(Rd62))*k62^2/(k62*(k62-1)))^2)/(k62*(k62-1)));
DEV62rij=rij62-TAU62rij;

```

```

filename=['Reliabilitas_Perumahan_T2' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri62; DEV62rij; rkk62; k62]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri62, DEV62rij, rkk62, & k62 tersimpan dalam file' filename]);

```

%---2.6.3. UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI PERUMAHAN & LINGKUNGAN, TAHAP 3 ---

```

X64=[x601, x602, x604, x605];

[Rr63]=abs(corr(X64,X64,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));

Rd63=Rr63-diag(diag(Rr63),0);
k63=length(Rd63(:,1));
rij63=(sum(sum(Rd63)))/(k63*(k63-1));
rkk63=(k63*rij63)/(1+(k63-1)*rij63);

ri63=(sum(Rd63))/(k63-1);

TAU63rij=sqrt((sum(sum(Rd63.^2))-(k63*(k63-
1))*(mean(mean(Rd63))*k63^2/(k63*(k63-1)))^2)/(k63*(k63-1)));
DEV63rij=rij63-TAU63rij;

```

```

filename=['Reliabilitas_Perumahan_T3' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri63; DEV63rij; rkk63; k63]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri63, DEV63rij, rkk63, & k63 tersimpan dalam file' filename]);

```

%--- 2.7.1. UJI RELIABILITAS UNTUK DIMENSI TEKNOLOGI & INFORMASI, TAHAP 1 ---

```

X72=[x701, x702, x703];

```

```
[Rr71]=abs(corr(X72,X72,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd71=Rr71-diag(diag(Rr71),0);
```

```
k71=length(Rd71(:,1));
```

```
rij71=(sum(sum(Rd71)))/(k71*(k71-1));
```

```
rkk71=(k71*rij71)/(1+(k71-1)*rij71);
```

```
ri71=(sum(Rd71)')/(k71-1);
```

```
TAU71rij=sqrt((sum(sum(Rd71.^2))-(k71*(k71-
```

```
1))*(mean(mean(Rd71))*k71^2/(k71*(k71-1)))^2)/(k71*(k71-1)));
```

```
DEV71rij=rij71-TAU71rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Teknologi_T1' '.xls'];
```

```
fin=fopen(filename,'w');
```

```
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri71; DEV71rij; rkk71; k71]);
```

```
fclose(fin);
```

```
fprintf(1,['Nilai ri71, DEV71rij, rkk71, & k71 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.2.1. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN, TAHAP 1 ---

```
T2=[x101, x102, x201, x202, x203, x204, x205, x206, x301, x302, x304, x305, x402,  
x403, x404, x405, x406, x501, x502, x503, x601, x602, x604, x605, x701, x702, x703];
```

```
[Rr81]=abs(corr(T2,T2,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd81=Rr81-diag(diag(Rr81),0);
```

```
k81=length(Rd81(:,1));
```

```
rij81=(sum(sum(Rd81)))/(k81*(k81-1));
```

```
rkk81=(k81*rij81)/(1+(k81-1)*rij81);
```

```
ri81=(sum(Rd81)')/(k81-1);
```

```
TAU81rij=sqrt((sum(sum(Rd81.^2))-(k81*(k81-
```

```
1))*(mean(mean(Rd81))*k81^2/(k81*(k81-1)))^2)/(k81*(k81-1)));
```

```
DEV81rij=rij81-TAU81rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Keseluruhan_T1' '.xls'];
```

```
fin=fopen(filename,'w');
```

```
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri81; DEV81rij; rkk81; k81]);
```

```
fclose(fin);
```

```
fprintf(1,['Nilai ri81, DEV81rij, rkk81, & k81 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.2.2. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN, TAHAP 2 ---


```
T3=[x101, x102, x201, x202, x203, x204, x205, x206, x301, x304, x305, x403, x405,
x406, x501, x502, x503, x601, x602, x604, x605, x701, x702, x703];
```

```
[Rr82]=abs(corr(T3,T3,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd82=Rr82-diag(diag(Rr82),0);
k82=length(Rd82(:,1));
rij82=(sum(sum(Rd82)))/(k82*(k82-1));
rkk82=(k82*rij82)/(1+(k82-1)*rij82);
```

```
ri82=(sum(Rd82)')/(k82-1);
```

```
TAU82rij=sqrt((sum(sum(Rd82.^2))-(k82*(k82-1))*
(mean(mean(Rd82))*k82^2/(k82*(k82-1)))^2)/(k82*(k82-1)));
DEV82rij=rij82-TAU82rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Keseluruhan_T2' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f \r\n',[ri82; DEV82rij; rkk82; k82]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri82, DEV82rij, rkk82, & k82 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---2.2.3. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN, TAHAP 3 ---

```
T4=[x101, x102, x201, x202, x203, x205, x206, x301, x304, x305, x405, x406, x501,
x502, x503, x601, x602, x604, x605, x701, x702, x703];
```

```
[Rr83]=abs(corr(T4,T4,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd83=Rr83-diag(diag(Rr83),0);
k83=length(Rd83(:,1));
rij83=(sum(sum(Rd83)))/(k83*(k83-1));
rkk83=(k83*rij83)/(1+(k83-1)*rij83);
```

```
ri83=(sum(Rd83)')/(k83-1);
```

```
TAU83rij=sqrt((sum(sum(Rd83.^2))-(k83*(k83-1))*
(mean(mean(Rd83))*k83^2/(k83*(k83-1)))^2)/(k83*(k83-1)));
DEV83rij=rij83-TAU83rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Keseluruhan_T3' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f \r\n',[ri83; DEV83rij; rkk83; k83]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri83, DEV83rij, rkk83, & k83 tersimpan dalam file' filename]);
```


%--- 2.2.4. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN, TAHAP 4 ---

```
T5=[x101, x102, x201, x202, x203, x206, x301, x304, x305, x405, x406, x501, x502, x503, x601, x602, x604, x605, x701, x702, x703];
```

```
[Rr84]=abs(corr(T5,T5,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd84=Rr84-diag(diag(Rr84),0);
```

```
k84=length(Rd84(:,1));
```

```
rij84=(sum(sum(Rd84)))/(k84*(k84-1));
```

```
rkk84=(k84*rij84)/(1+(k84-1)*rij84);
```

```
ri84=(sum(Rd84))/(k84-1);
```

```
TAU84rij=sqrt((sum(sum(Rd84.^2))-(k84*(k84-1))*(mean(mean(Rd84))*k84^2/(k84*(k84-1)))^2)/(k84*(k84-1)));
```

```
DEV84rij=rij84-TAU84rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Keseluruhan_T4' '.xls'];
```

```
fin=fopen(filename,'w');
```

```
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri84; DEV84rij; rkk84; k84]);
```

```
fclose(fin);
```

```
fprintf(1,['Nilai ri84, DEV84rij, rkk84, & k84 tersimpan dalam file' filename]);
```

%--- 2.2.5. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN, TAHAP 5 --- TIDAK LANJUT TAHAP 5----

```
T6=[x102, x202, x203, x301, x304, x305, x405, x406, x501, x502, x503, x601, x602, x604, x605, x701, x702, x703];
```

```
[Rr85]=abs(corr(T6,T6,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd85=Rr85-diag(diag(Rr85),0);
```

```
k85=length(Rd85(:,1));
```

```
rij85=(sum(sum(Rd85)))/(k85*(k85-1));
```

```
rkk85=(k85*rij85)/(1+(k85-1)*rij85);
```

```
ri85=(sum(Rd85))/(k85-1);
```

```
TAU85rij=sqrt((sum(sum(Rd85.^2))-(k85*(k85-1))*(mean(mean(Rd85))*k85^2/(k85*(k85-1)))^2)/(k85*(k85-1)));
```

```
DEV85rij=rij85-TAU85rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Keseluruhan_T5' '.xls'];
```

```
fin=fopen(filename,'w');
```

```
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri85; DEV85rij; rkk85; k85]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri85, DEV85rij, rkk85, & k85 tersimpan dalam file' filename]);
```

%--- 2.2.5. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN, TAHAP 5 --- TIDAK LANJUT
TAHAP 5----

```
T7=[x102, x202, x203, x301, x305, x405, x406, x501, x502, x503, x601, x602, x604,
x605, x701, x702, x703];
```

```
[Rr86]=abs(corr(T7,T7,'type','spearman','rows','all','tail','ne'));
```

```
Rd86=Rr86-diag(diag(Rr86),0);
k86=length(Rd86(:,1));
rij86=(sum(sum(Rd86)))/(k86*(k86-1));
rkk86=(k86*rij86)/(1+(k86-1)*rij86);
```

```
ri86=(sum(Rd86)')/(k86-1);
```

```
TAU86rij=sqrt((sum(sum(Rd86.^2))-(k86*(k86-
1))*(mean(mean(Rd86))*k86^2/(k86*(k86-1)))^2)/(k86*(k86-1)));
DEV86rij=rij86-TAU86rij;
```

```
filename=['Reliabilitas_Keseluruhan_T6' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5f\r\n',[ri86; DEV86rij; rkk86; k86]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai ri86, DEV86rij, rkk86, & k86 tersimpan dalam file' filename]);
```

%---3. PENGHITUNGAN DISPARITAS---

3.1. TRANSFORMASI VARIABEL

```
X1=[x102];
X2=[x202, x203];
X3=[x301, x305];
X4=[x405, x406];
X5=[x501, x502, x503];
X6=[x601, x602, x604, x605];
X7=[x701, x702, x703];
T=[X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7];
D=[x801];
```

```
n=length(x101);
```

% 3.2. MEAN

```
MX1=mean(X1);  
MX2=mean(X2);  
MX3=mean(X3);  
MX4=mean(X4);  
MX5=mean(X5);  
MX6=mean(X6);  
MX7=mean(X7);  
MT=mean(T);  
MD=mean(D);
```

% 3.3. STANDAR DEVIASI

```
DX1=(var(X1)*(n-1)).^0.5;  
DX2=(var(X2)*(n-1)).^0.5;  
DX3=(var(X3)*(n-1)).^0.5;  
DX4=(var(X4)*(n-1)).^0.5;  
DX5=(var(X5)*(n-1)).^0.5;  
DX6=(var(X6)*(n-1)).^0.5;  
DX7=(var(X7)*(n-1)).^0.5;  
DT=(var(T)*(n-1)).^0.5;  
DD=(var(D)*(n-1)).^0.5;
```

%---3.4. DISPARITAS PER DIMENSI---

%---3.4.1. DISPARITAS DIMENSI KESEHATAN & GIZI ---

```
MX11=MX1';  
MX12=MX11(:,ones(size(x101)));  
MX13=MX12';  
DX11=DX1';  
DX12=DX11(:,ones(size(x101)));  
DX13=DX12';
```

```
AX1=(X1-MX13)./DX13;
```

```
AX11=AX1';  
AX101=AX11(:,13);  
AX102=AX101(:,ones(size(x101)));  
AX10=AX102';
```

```
PX1=AX1-AX10;  
PX11=PX1';  
PX12=sqrt((PX11.^2));  
PX10=PX12';
```



```

MPX10=mean(PX10);
DPX10=sqrt(var(PX10)*(n-1));

PiX101=MPX10+2*DPX10;
PiX10=(PiX101(:,ones(size(x101))))';
LX1=PX10./PiX10;

HX1=[PX10, LX1];

```

%--- 3.4.2. DISPARITAS DIMENSI PENDIDIKAN---

```

MX21=MX2';
MX22=MX21(:,ones(size(x101)));
MX23=MX22';
DX21=DX2';
DX22=DX21(:,ones(size(x101)));
DX23=DX22';

AX2=(X2-MX23)./DX23;

AX21=AX2';
AX201=AX21(:,13);
AX202=AX201(:,ones(size(x101)));
AX20=AX202';

PX2=AX2-AX20;
PX21=PX2';
PX22=sqrt(sum(PX21.^2));
PX20=PX22';

MPX20=mean(PX20);
DPX20=sqrt(var(PX20)*(n-1));

PiX201=MPX20+2*DPX20;
PiX20=(PiX201(:,ones(size(x101))))';
LX2=PX20./PiX20;

HX2=[PX20, LX2];

```

%--- 3.4.3. DISPARITAS DIMENSI EKONOMI---

```

MX31=MX3';
MX32=MX31(:,ones(size(x101)));
MX33=MX32';
DX31=DX3';
DX32=DX31(:,ones(size(x101)));
DX33=DX32';

```

AX3=(X3-MX33)./DX33;

AX31=AX3';

AX301=AX31(:,13);

AX302=AX301(:,ones(size(x101)));

AX30=AX302';

PX3=AX3-AX30;

PX31=PX3';

PX32=sqrt(sum(PX31.^2));

PX30=PX32';

MPX30=mean(PX30);

DPX30=sqrt(var(PX30)*(n-1));

PiX301=MPX30+2*DPX30;

PiX30=(PiX301(:,ones(size(x101))))';

LX3=PX30./PiX30;

HX3=[PX30, LX3];

%--- 3.4.4. DISPARITAS DIMENSI KETENAGAKERJAAN---

MX41=MX4';

MX42=MX41(:,ones(size(x101)));

MX43=MX42';

DX41=DX4';

DX42=DX41(:,ones(size(x101)));

DX43=DX42';

AX4=(X4-MX43)./DX43;

AX41=AX4';

AX401=AX41(:,13);

AX402=AX401(:,ones(size(x101)));

AX40=AX402';

PX4=AX4-AX40;

PX41=PX4';

PX42=sqrt(sum(PX41.^2));

PX40=PX42';

MPX40=mean(PX40);

DPX40=sqrt(var(PX40)*(n-1));

PiX401=MPX40+2*DPX40;

```

PiX40=(PiX401(:,ones(size(x101))))';
LX4=PX40./PiX40;

HX4=[PX40, LX4];

```

%--- 3.4.5. DISPARITAS DIMENSI SOSIAL & BUDAYA ---

```

MX51=MX5';
MX52=MX51(:,ones(size(x101)));
MX53=MX52';
DX51=DX5';
DX52=DX51(:,ones(size(x101)));
DX53=DX52';

AX5=(X5-MX53)./DX53;

AX51=AX5';
AX501=AX51(:,13);
AX502=AX501(:,ones(size(x101)));
AX50=AX502';

PX5=AX5-AX50;
PX51=PX5';
PX52=sqrt(sum(PX51.^2));
PX50=PX52';

MPX50=mean(PX50);
DPX50=sqrt(var(PX50)*(n-1));

PiX501=MPX50+2*DPX50;
PiX50=(PiX501(:,ones(size(x101))))';
LX5=PX50./PiX50;

HX5=[PX50, LX5];

```

%--- 3.4.6. DISPARITAS DIMENSI PERUMAHAN & LINGKUNGAN ---

```

MX61=MX6';
MX62=MX61(:,ones(size(x101)));
MX63=MX62';
DX61=DX6';
DX62=DX61(:,ones(size(x101)));
DX63=DX62';

```


AX6=(X6-MX63)./DX63;

AX61=AX6';

AX601=AX61(:,13);

AX602=AX601(:,ones(size(x101)));

AX60=AX602';

PX6=AX6-AX60;

PX61=PX6';

PX62=sqrt(sum(PX61.^2));

PX60=PX62';

MPX60=mean(PX60);

DPX60=sqrt(var(PX60)*(n-1));

PiX601=MPX60+2*DPX60;

PiX60=(PiX601(:,ones(size(x101))))';

LX6=PX60./PiX60;

HX6=[PX60, LX6];

%--- 3.4.7. DISPARITAS DIMENSI TEKNOLOGI & INFORMASI ---

MX71=MX7';

MX72=MX71(:,ones(size(x101)));

MX73=MX72';

DX71=DX7';

DX72=DX71(:,ones(size(x101)));

DX73=DX72';

AX7=(X7-MX73)./DX73;

AX71=AX7';

AX701=AX71(:,13);

AX702=AX701(:,ones(size(x101)));

AX70=AX702';

PX7=AX7-AX70;

PX71=PX7';

PX72=sqrt(sum(PX71.^2));

PX70=PX72';

MPX70=mean(PX70);

DPX70=sqrt(var(PX70)*(n-1));

PiX701=MPX70+2*DPX70;

```
PiX70=(PiX701(:,ones(size(x101))))';  
LX7=PX70./PiX70;
```

```
HX7=[PX70, LX7];
```

```
%--- 3.5. DISPARITAS KESELURUHAN---
```

```
MT1=MT';  
MT2=MT1(:,ones(size(x101)));  
MT3=MT2';  
DT1=DT';  
DT2=DT1(:,ones(size(x101)));  
DT3=DT2';
```

```
AT=(T-MT3)./DT3;  
AT1=AT';  
AT01=AT1(:,13);  
AT02=AT01(:,ones(size(x101)));  
AT0=AT02';
```

```
PT=AT-AT0;  
PT1=PT';  
PT2=sqrt(sum(PT1.^2));  
PT0=PT2';
```

```
MPT0=mean(PT0);  
DPT0=sqrt(var(PT0)*(n-1));
```

```
PiT01=MPT0+2*DPT0;  
PiT0=(PiT01(:,ones(size(x101))))';  
LT=PT0./PiT0;
```

```
HT=[PT0, LT];
```

```
%--- 3.6. DISPARITAS PDRB---
```

```
MD1=MD';  
MD2=MD1(:,ones(size(x101)));  
MD3=MD2';  
DD1=DD';  
DD2=DD1(:,ones(size(x101)));  
DD3=DD2';
```

```
AD=(D-MD3)./DD3;
```



```
AD1=AD';
AD01=AD1(:,13);
AD02=AD01(:,ones(size(x101)));
AD0=AD02';
```

```
PD=AD-AD0;
PD1=PD';
PD2=sqrt((PD1.^2));
PD0=PD2';
```

```
MPD0=mean(PD0);
DPD0=sqrt(var(PD0)*(n-1));
```

```
PiD01=MPD0+2*DPD0;
PiD0=(PiD01(:,ones(size(x101))))';
LD=PD0./PiD0;
```

```
HD=[PD0, LD];
```

```
filename=['indeks-Komposit' '.xls'];
fin=fopen(filename,'w');
fprintf(fin,'%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5ft%20.5f\r\n',[HX1
HX2 HX3 HX4 HX5 HX6 HX7 HT HD]);
fclose(fin);
fprintf(1,['Nilai HX1, HX2, HX3, HX4, HX5, HX6, HX7, HT, dan HD tersimpan dalam
file' filename]);
```

```
end
```

